

JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Februari 2021	Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	5 Maret 2021
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Maret 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	8 Maret 2021
Tanggal Penjatahan	:	4 Maret 2021			

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ULIMA NITRA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT ULIMA NITRA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan

Kantor Pusat

JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur II,
Palembang Sumatera Selatan, 30113,
Telp: (0711) 365157 / 365158 / 365580
Fax: (0711) 359469
Email: info@ulimanitra.co.id
Website: www.ulimanitra.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 9,56% (sembilan koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") dan pelaksanaan konversi Utang Konversi, yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp35.400.000.000 (tiga puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah).

Perseroan menyelenggarakan program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 9.626.100 (sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham atau sebanyak 3,21% (tiga koma dua puluh satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi ("Utang Konversi") senilai Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) oleh PT Surya Fajar Capital Tbk sebesar 233.050.800 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus) saham dan PT Surya Fajar Corpora sebesar 105.932.200 (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus) saham yang akan dilaksanakan pada Tanggal Penjatahan atau seluruhnya setara dengan 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) dari seluruh total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Utang Konversi.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi Utang Konversi ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



SEKURITAS

PT SURYA FAJAR SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA BATUBARA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



PT Ulima Nitra Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 007/UN-IPO/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 23 Desember 2020 melalui surat No. S-08066/BEI.PPI/12-2020, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
A. UMUM	23
B. ANALISA KEUANGAN	23
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING	32
D. BELANJA MODAL	33
E. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN LABA	33
F. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	34
G. PINJAMAN DAN FASILITAS PERBANKAN & SEWA GUNA	34
H. SEGMENT OPERASI	35
I. MANAJEMEN RISIKO	38
VI. FAKTOR RISIKO	39
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	43
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	45
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	46
C. DOKUMEN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PERSEROAN	47
D. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK BERELASI	48
E. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA	49
F. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	63
G. ASURANSI	64
H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	67
I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	68
J. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	68
K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	70
L. SUMBER DAYA MANUSIA	76
M. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	77
N. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	78
1. Kegiatan Operasional	78
2. Kekayaan Intelektual	80
3. Daerah Pemasaran dan Pelanggan	80
4. Keunggulan Kompetitif	80
5. Persaingan	81
6. Prospek Usaha Perseroan	81
7. Setiap Kecenderungan yang Signifikan	83
8. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)	83
IX. INDUSTRI BATUBARA	85
X. EKUITAS	89
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	91
XII. PERPAJAKAN	93
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	95
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	97
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	99
XVI. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM	107
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	113
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	115
XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	135



Halaman ini sengaja dikosongkan



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- "Afiliasi" : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- "Anggota Kliring" : berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- "Anggota Bursa Efek" : berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- "Bank Kustodian" : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "BAPEPAM" : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- "BAPEPAM dan LK" : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penerus Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- "Biro Administrasi Efek" atau "BAE" : berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
- "Bursa Efek" atau "BEI" : berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
- "Daftar Pemegang Saham" atau "DPS" : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- "Efek" : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- "Efektif" : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu:
- atas dasar lewatnya waktu, yakni:



- a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Harga Penawaran"	: berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebesar Rp118 (seratus delapan belas Rupiah).
"Hari Bursa"	: berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"KAP"	: berarti Kantor Akuntan Publik.
"KSEI"	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Kemenkumham"	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"Manajer Penjatahan"	: berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
"Masa Penawaran"	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
"Masyarakat"	: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham"	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID"	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Sistem”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Pasar Sekunder”	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemesan Ritel”	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
“Penjataan Pasti”	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjataan Terpusat”	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjataan Terpusat Ritel”	: berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.



"Peraturan Nomor VIII.G.12"	: berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	: berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.J.1"	: berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-068/SHM/KSEI/1020 tanggal 20 November 2020.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 24 tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 129 tanggal 29 Januari 2021 <i>juncto</i> Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 208 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 23 tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 128 tanggal 29 Januari 2021 <i>juncto</i> Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 207 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
"Pernyataan Efektif"	: berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
"Perseroan"	: berarti PT Ulima Nitra Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"POJK No. 15 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"POJK No. 16 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
"POJK No. 17 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama



"POJK No. 41 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 7 Tahun 2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1.
"POJK No. 8 Tahun 2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 55 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8 Tahun 2017.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus Ringkas"	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"PSAK"	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN"	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rp"	: berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.



“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 9,56% (sembilan koma lima puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Utang Konversi.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“Surat Kolektif Saham”	: berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
“Tanggal Penjataan”	: berarti tanggal dimana dilakukannya penjataan saham yaitu pada tanggal 4 Maret 2021.
“Tanggal Penyerahan Efek”	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjataan.
“UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha yang seluruhnya tercantum di Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Ulima Nitra sesuai dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 25 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan S.H., Notaris di Palembang ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("Menkeh") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2811.HT.01.01.th.93 tertanggal 5 Mei 1993 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 dibawah agenda No. 37./1993/PT.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tertanggal 2 September 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0066428.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391211 tertanggal 25 September 2020, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391212 tertanggal 25 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161673.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020 ("Akta No.10/2020"). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 10/2020, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah; Konstruksi; Pengangkutan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dapat bertindak sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan. Demi menjaga kualitas dan mutu layanan yang diberikan kepada setiap pelanggan serta tetap memperhatikan keselamatan karyawan, Perseroan telah tersertifikasi ISO 9001:2015, sertifikasi OHSAS 18001:2007 dan sertifikasi SMK3. Saat ini kegiatan usaha Perseroan terpusat pada tambang batubara yang berada di wilayah Sumatera Selatan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah lainnya.

• STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00
6. Ny. Merty Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000	

• KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta No.10/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah; Konstruksi; Pengangkutan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Ketenagakerjaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



Kegiatan Usaha Utama:

1. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
2. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
3. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; dan
4. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Pertambangan Batu Bara;
2. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya;
3. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
4. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
5. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya;
6. Konstruksi Gedung Lainnya;
7. Konstruksi Jalan Raya;
8. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
9. Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas;
10. Penyiapan Lahan;
11. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;
12. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;
13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; dan
14. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.

Namun sampai dengan saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan yaitu sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan.

Prospek Usaha

Sebagai pemilik Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP), saat ini Perseroan berfokus melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan dengan menyediakan jasa penyewaan alat-alat berat di wilayah Sumatera Selatan. Walaupun batubara di wilayah Sumatera Selatan didominasi oleh batubara yang berkalori rendah hingga sedang, namun merupakan wilayah dengan sumber daya dan cadangan batubara terbesar di Indonesia. Per tahun 2020, data dari Kementerian ESDM menunjukkan jumlah sumber daya batubara di wilayah Sumatera Selatan sebesar 50,23 miliar ton, sehingga keberlanjutan tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan masih sangat terjaga.

Hasil tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan ini mayoritas digunakan sebagai sumber energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa merupakan 78,13% dari total populasi penduduk Indonesia. Selain itu, pusat bisnis di Indonesia juga masih berada di Pulau Jawa dan diikuti oleh Pulau Sumatera yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,00% dan 21,49%. Sehingga kebutuhan hasil tambang batubara sebagai bahan baku pembangkit listrik di wilayah Sumatera dan Jawa masih akan cukup besar. Selain itu, batubara juga dimanfaatkan oleh industri semen, pupuk, tekstil, pulp, metalurgi, dan briket.

Kondisi permintaan dan jumlah sumber daya batubara di wilayah Sumatera Selatan yang masih sangat besar tersebut membuat Perseroan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan, yang memiliki pengalaman panjang dan mampu menjaga hubungan baik dengan mitra, memiliki prospek usaha yang sangat terjaga.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

• PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru atau sebanyak 9,56% (sembilan koma lima puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi ("Utang Konversi").
- b. Nilai Nominal : Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham
- c. Harga Penawaran : Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham
- d. Nilai Emisi : Sebesar Rp35.400.000.000 (tiga puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah)



- e. Jumlah saham Konversi : Sebanyak 338.983.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu) Saham
- f. Tanggal Konversi : 4 Maret 2021
- g. Masa Penawaran Umum : 2 - 4 Maret 2021
- h. Tanggal Pencatatan : 8 Maret 2021

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	49,11
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
7. Masyarakat ¹	-	-	-	300.000.000	600.000.000	10,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	2.800.000.000	5.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		7.200.000.000	14.400.000.000	

¹Termasuk Program ESA

Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai Perseroan ("Program ESA")

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program ESA. Program ESA akan ditawarkan dengan jumlah sebanyak 9.626.100 (sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham atau 3,21% (tiga koma dua puluh satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. Pihak yang berhak atas program ESA ini adalah Karyawan dari Perseroan.

Dengan dilaksanakannya Program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	49,11
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
7. Masyarakat	-	-	-	290.373.900	580.747.800	10,37
8. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	9.626.100	19.252.200	0,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	2.800.000.000	5.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		7.200.000.000	14.400.000.000	

Konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi ("Utang Konversi") senilai Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) oleh PT Surya Fajar Capital Tbk sebesar 233.050.800 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus) saham dan PT Surya



Fajar Corpora sebesar 105.932.200 (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus) saham yang akan dilaksanakan pada Tanggal Penjatahan atau seluruhnya setara dengan 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) dari seluruh total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan dilaksanakannya Utang Konversi bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum dan setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA, dan Pelaksanaan Utang Konversi, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Utang Konversi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	43,80
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	11,95
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	11,95
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
7. Masyarakat	-	-	-	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	9.626.100	19.252.200	0,31
9. PT Surya Fajar Capital Tbk - Konversi Utang	-	-	-	233.050.800	466.101.600	7,42
10. PT Surya Fajar Corpora - Konversi Utang	-	-	-	105.932.200	211.864.400	3,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		6.861.017.000	13.722.034.000	

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum, berdasarkan perjanjian pengalihan yang ditandatangani oleh Ibu Jati Simina selaku pihak yang mengalihkan dengan Burhan Tjokro, Ulung Wijaya, Mertje Tjokro, Tuti Nuarni, dan Mertje Tjokro, akan dilakukan pengalihan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham milik ibu Jati Simina kepada Burhan Tjokro sebanyak 325.581.395 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima) saham, Ulung Wijaya sebanyak 325.581.395 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima) saham, Mertje Tjokro sebanyak 209.302.326 (dua ratus sembilan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus dua puluh enam) saham, Mertje Tjokro sebanyak 69.767.442 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua) saham, Tuti Nuarni sebanyak 69.767.442 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua) saham, yang seluruhnya akan dialihkan pada Harga Penawaran.

Proforma permodalan setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA, dan Pelaksanaan Utang Konversi, serta setelah Pengalihan Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Utang Konversi			Setelah Pengalihan Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	375.000.000	750.000.000	11,95
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	700.581.395	1.401.162.790	22,32
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	700.581.395	1.401.162.790	22,32
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	194.767.442	389.534.884	6,20
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	194.767.442	389.534.884	6,20
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	334.302.326	668.604.652	10,65
7. Masyarakat	290.373.900	580.747.800	9,25	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	9.626.100	19.252.200	0,31	9.626.100	19.252.200	0,31
9. PT Surya Fajar Capital Tbk - Konversi Utang	233.050.800	466.101.600	7,42	233.050.800	466.101.600	7,42
10. PT Surya Fajar Corpora - Konversi Utang	105.932.200	211.864.400	3,38	105.932.200	211.864.400	3,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.861.017.000	13.722.034.000		6.861.017.000	13.722.034.000	

Saham yang Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana yaitu sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru atau sebanyak 9,56% (sembilan koma lima puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Konversi Utang.



Saham hasil pelaksanaan Utang Konversi dari (i) PT Surya Fajar Capital Tbk sebanyak 233.050.800 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus) Saham Baru atau sebesar 7,42% (tujuh koma empat puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) PT Surya Fajar Corpora sebanyak 105.932.200 (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus) Saham Baru atau sebesar 3,38% (tiga koma tiga puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 79,64% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

• RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk modal kerja (biaya operasional) Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Idris Jono, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020. Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Laporan keuangan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 dimana dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

DATA KEUANGAN 3 TAHUN BUKU TERAKHIR

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Total Aset	539.673	558.788	580.579	492.983	439.074
Total Liabilitas	267.416	282.552	302.083	226.960	188.279
Total Ekuitas	272.256	276.235	278.496	266.023	250.795

¹tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Penjualan bersih	270.926	155.482	140.088	332.526	345.024
Laba bruto	24.547	18.784	15.998	57.799	58.127
Laba (rugi) sebelum pajak	(5.617)	2.052	(1.758)	19.530	28.443
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(5.617)	(1.413)	(295)	17.433	17.141
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(5.617)	(1.506)	(275)	17.474	17.228
Laba (rugi) periode/tahun berjalan per saham ²	(2,25)	(0,57)	(0,12)	6,97	6,86
Dividen per saham ²	-	-	-	100.000	40.000

¹tidak diaudit

²dalam angka penuh



Rasio Keuangan

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Rasio Profitabilitas (%)					
Marjin Laba Kotor	9,06%	12,08%	17,38%	16,85%	14,50%
Marjin Laba Operasional	1,84%	4,71%	9,78%	9,93%	6,55%
Marjin Laba Bersih	-2,07%	-0,91%	5,24%	4,97%	2,67%
Rasio Laba Kotor terhadap Total Aset	4,55%	3,36%	9,96%	11,79%	9,97%
Rasio Laba Operasi terhadap Total Aset	0,92%	1,31%	5,60%	6,95%	4,51%
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset	-1,04%	-0,25%	3,00%	3,48%	1,84%
Rasio Laba Kotor terhadap Total Ekuitas	9,02%	6,80%	20,75%	21,85%	17,45%
Rasio Laba Operasi terhadap Total Ekuitas	1,83%	2,65%	11,68%	12,88%	7,89%
Rasio Laba Bersih terhadap Total Ekuitas	-2,06%	-0,51%	6,26%	6,44%	3,22%
Rasio Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,50	0,51	0,52	0,46	0,43
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,98	1,02	1,08	0,85	0,75
Rasio Likuiditas (x)					
Current Ratio	0,70	0,73	0,67	0,54	0,47
Quick Ratio	0,48	0,53	0,64	0,51	0,43

• FAKTOR RISIKO

Secara umum, Perseroan akan menghadapi beberapa risiko saat menjalankan usahanya. Risiko-risiko tersebut dapat diurutkan berdasarkan eksposur risiko (yaitu kombinasi dampak dan probabilitas) dari peringkat risiko tertinggi hingga terendah, antara lain yaitu:

A. Risiko yang Berkaitan Dengan Bisnis Perseroan

Risiko Utama

Risiko Penurunan Harga Batubara

Risiko Usaha

1. Risiko Kehandalan Alat Berat dan Perubahan Teknologi
2. Risiko Sumber Daya Manusia
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya dan Pasokan Bahan Baku
6. Risiko Kelalaian Perseroan dalam Menaati Peraturan yang Berlaku dalam Industri

Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Global
2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
4. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
5. Gugatan Hukum
6. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

B. Risiko yang Berkaitan dengan Saham Perseroan

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
2. Risiko fluktuasi harga saham
3. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan
5. Risiko pembagian dividen

Penjelasan lebih lengkap atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

• KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Semua saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan alokasi pembayaran dividen kas tahunan sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang



Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan setiap tahun, atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI dari Prospektus.



Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 9,56% (sembilan koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp35.400.000.000 (tiga puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah).

Perseroan menyelenggarakan program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 9.626.100 (sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham atau sebanyak 3,21% (tiga koma dua puluh satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").



PT ULIMA NITRA.
Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan

Kantor Pusat

JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur II,
Palembang Sumatera Selatan, 30113,
Telp: (0711) 365157 / 365158 / 365580
Fax: (0711) 359469
Email: info@ulimanitra.co.id
Website: www.ulimanitra.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG KEMUNGKINAN AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA BATUBARA. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



Perseroan didirikan dengan nama PT Ulima Nitra sesuai dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 25 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("Menkeh") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2811.HT.01.01.th.93 tertanggal 5 Mei 1993 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 dibawah agenda No. 37./1993/PT. ("Akta Pendirian Perseroan"). Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 10/2020. ("Anggaran Dasar Perseroan").

A. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00
6. Ny. Mertj Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	49,11
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
6. Ny. Mertj Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
7. Masyarakat ¹	-	-	-	300.000.000	600.000.000	10,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	2.800.000.000	5.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		7.200.000.000	14.400.000.000	

¹Termasuk Program ESA

B. Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai Perseroan ("Program ESA")

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tertanggal 2 September 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program ESA dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan ESA, Program ESA akan ditawarkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam Program ESA tersebut:

Tujuan Program ESA

Program ESA merupakan program pemberian alokasi pasti dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana untuk pegawai Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai insentif bagi para pegawai atas kinerja yang telah dicapai;
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk turut memiliki Saham Perseroan;
- Memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
- Mempertahankan pegawai yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;



- Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan pegawai untuk kemajuan Perseroan.

Saham-saham Program ESA akan berasal dari saham yang ditawarkan kepada publik, yang dialokasikan dari porsi Penjatahan Pasti.

Kriteria Peserta Program ESA

Pihak-pihak yang dapat berpartisipasi dalam Program ESA adalah :

1. Pegawai Perseroan yang tercatat pada tanggal ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan ESA.
2. Pegawai Perseroan yang tercatat pada saat Program ESA dilaksanakan;
3. Pegawai Perseroan yang tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

Jumlah karyawan Perseroan penerima saham ESA adalah sebanyak 459 pihak dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Seluruh saham Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Ringkasan Ketentuan Umum Program ESA

1. Sumber dana pembayaran saham dalam Program ESA adalah dibayarkan langsung oleh pegawai dan wajib tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA pada hari terakhir Masa Penawaran.
2. Sehubungan dengan penggunaan sistem Penawaran Umum secara Elektronik, pembayaran pemesanan saham akan ditarik oleh sistem secara otomatis dari RDN masing-masing peserta Program ESA.
3. Batasan alokasi saham dalam Program ESA untuk setiap level pegawai akan ditetapkan berdasarkan masa kerja dan loyalitas pegawai yang bersangkutan.
4. Mekanisme pendistribusian saham dalam Program ESA kepada pegawai diatur sebagai berikut:
 - a. Perseroan akan memberikan penjatahan saham kepada pegawai dalam Program ESA untuk dan atas nama masing-masing pegawai dan akan didistribusikan bersamaan pada Tanggal Distribusi saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.
 - b. Pendistribusian saham kepada pegawai dilakukan apabila pegawai telah melakukan pengisian dokumen baik untuk kepentingan sekuritas, bank maupun Perseroan secara lengkap dan benar serta melakukan pembayaran sesuai dengan alokasinya.
5. Saham milik pegawai yang diberikan dalam Program ESA akan dikenakan *lock-up* atau tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, ditransfer, dihibahkan atau dipindah tangankan dengan cara apapun untuk dan atas nama pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.
6. Para pemegang saham ESA dapat menjual saham-saham yang dimilikinya setiap saat di pasar sekunder setelah berakhirnya periode *lock-up*.
7. Dalam hal Peserta Program ESA pensiun atau berhenti dari Perseroan, Peserta Program ESA dapat menjual saham-saham yang dimilikinya di pasar secara bebas kepada pihak lain.
8. Dalam hal Peserta Program ESA meninggal dunia, maka Saham akan dialihkan kepada pihak yang menjadi ahli warisnya.
9. Direksi Perseroan dengan ini menunjuk pejabat yang membidangi sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola Program ESA kepada pegawai.
10. Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Penjualan Saham oleh Peserta Program ESA berlaku Ketentuan Perpajakan

- Untuk pelaksanaan penjualan saham melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Dengan dilaksanakannya Program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	49,11
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
7. Masyarakat	-	-	-	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	9.626.100	19.252.200	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	2.800.000.000	5.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		7.200.000.000	14.400.000.000	

C. Konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi ("Utang Konversi") dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pihak :

Pihak	Pinjaman	Saham Konversi ¹	% ²
PT Surya Fajar Capital Tbk	Rp27.500.000.000	233.050.800	7,42%
PT Surya Fajar Corpora	Rp12.500.000.000	105.932.200	3,38%
Total	Rp40.000.000.000	338.983.000	10,80%

¹jumlah saham konversi berdasarkan konfirmasi dari Para Pihak.

²persentase setelah penawaran umum

b. Total Pinjaman : Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

c. Jatuh Tempo : 12 bulan (dua belas bulan).

d. Jaminan : tanpa jaminan (*uncollateralized loan*).

e. Biaya Kompensasi : tanpa bunga (*zero coupon*) – apabila pemegang surat utang memilih untuk melakukan konversi, atau 10%/ tahun apabila pembayaran dilakukan secara tunai

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi antara Perseroan dengan PT Surya Fajar Capital Tbk ("SFC") dan PT Surya Fajar Corpora ("SFCO"), tanggal 26 Juni 2020, pemegang surat utang dapat melakukan konversi pada:

a. Dalam hal Perseroan melaksanakan IPO, maka konversi dilakukan pada tanggal penjabatan;

b. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan IPO, konversi dapat dilaksanakan setiap saat, terhitung sejak bulan ke-6 setelah diterimanya pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Atas pinjaman tersebut, disepakati bahwa pemegang utang memiliki hak untuk mengkonversikan utang yang dimilikinya menjadi kepemilikan saham setara dengan 5%-15% dari total saham setelah konversi (atau IPO jika terjadi IPO). Dalam hal tidak terdapat permintaan konversi sampai berakhirnya jangka waktu pinjaman (jatuh tempo), maka Perseroan wajib melunasi pinjaman secara tunai dan hak konversi menjadi tidak berlaku. Berdasarkan surat SFCO No. SFCO-DIR/001-R/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dan surat SFC No. 019/SFC-DIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh pemegang surat utang dan Perseroan, disepakati bahwa atas seluruh utang sebesar Rp40 miliar akan dikonversikan menjadi 338.983.000 saham setara dengan 10,80% kepemilikan (atau masih berada dalam kisaran yang disepakati dalam perjanjian), atau sebesar Rp118 per saham.

Utang Konversi ini dilakukan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan sama dengan harga Penawaran Umum Perdana yaitu pada harga Rp118 per saham, maka SFC dan SFCO tidak terkena pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Dengan dilaksanakannya Utang Konversi bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum dan setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA, dan Pelaksanaan Utang Konversi ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Utang Konversi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	43,80
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	11,95
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	11,95
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
7. Masyarakat	-	-	-	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	9.626.100	19.252.200	0,31
9. PT Surya Fajar Capital Tbk - Konversi Utang	-	-	-	233.050.800	466.101.600	7,42
10. PT Surya Fajar Corpora - Konversi Utang	-	-	-	105.932.200	211.864.400	3,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		6.861.017.000	13.722.034.000	

D. Pengalihan Saham

Berdasarkan perjanjian pengalihan yang ditandatangani antara Jati Simina (selanjutnya disebut Pihak Yang Mengalihkan) dengan Burhan Tjokro, Ulung Wijaya, Mertje Tjokro, Tuti Nuarni & Mertje Tjokro (selanjutnya disebut Pihak Penerima Pengalihan) yang masing-masing dibuat pada tanggal 28 September 2020, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Yang Mengalihkan akan mengalihkan saham-saham dengan jumlah sebagaimana tercantum di bawah, yang dapat dilakukan paling cepat setelah tanggal pencatatan saham Perseroan sampai dengan akhir tahun 2022 (kecuali ditentukan lain), yang akan dialihkan pada harga sesuai dengan Harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sepanjang pengalihan saham belum terjadi, seluruh hak-hak pemegang saham yang melekat pada saham-saham yang akan dialihkan masih menjadi hak sepenuhnya dari Jati Simina.

Informasi mengenai para pihak adalah sebagai berikut:

Pihak Yang Mengalihkan:

Nama : Jati Simina
 Alamat : Jl. Betet No. 28 A, RT 022, RW 005, Kelurahan/Desa 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Pihak Penerima Pengalihan:

Nama : Burhan Tjokro,
 Alamat : Jl. Kutilang No.3, RT.024, RW.004, Kelurahan/Desa 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 325.581.395 saham
 Hubungan : Anak Kandung

Nama : Ulung Wijaya,
 Alamat : Jl. Cendrawasih No.10, RT.022, RW.005, Kelurahan/Desa 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 325.581.395 saham
 Hubungan : Anak Kandung

Nama : Mertje Tjokro,
 Alamat : Jl. Dempo Dalam No. 942-C-754, RT 015, RW 004, Kelurahan/Desa 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 209.302.326 saham
 Hubungan : Anak Kandung

Nama : Tuti Nuarni,
 Alamat : Jl. Lingkaran I No. 393-E-F, RT 013, Rw 003, Kelurahan/Desa 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 69.767.442 saham
 Hubungan : Anak Kandung



Nama : Mertje Tjokro
 Alamat : Jl. Bay Salim No. 2661, RT 039, RW 010, Kelurahan/Desa 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 69.767.442 saham
 Hubungan : Anak Kandung

Tidak terdapat *lock-up* saham milik Pihak Yang Mengalihkan ataupun Pihak Penerima Pengalihan, dikarenakan pengalihan dilakukan setelah IPO dan pada harga yang tidak kurang dari Harga Penawaran Umum.

Pihak Yang Mengalihkan menyatakan bahwa saham-saham yang dialihkan, dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Pengendalian Perusahaan setelah Pengalihan tidak akan mengalami perubahan, karena pihak penerima seluruhnya adalah anak kandung dan pemegang saham saat ini, sehingga pemegang saham pengendali Perseroan masih tetap di tangan keluarga Tjokro Riduan.

Proforma permodalan setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA, dan Pelaksanaan Utang Konversi, serta Pengalihan Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Utang Konversi			Setelah Pengalihan Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	375.000.000	750.000.000	11,95
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	700.581.395	1.401.162.790	22,32
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	700.581.395	1.401.162.790	22,32
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	194.767.442	389.534.884	6,20
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	194.767.442	389.534.884	6,20
6. Ny. Merty Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	334.302.326	668.604.652	10,65
7. Masyarakat	290.373.900	580.747.800	9,25	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	9.626.100	19.252.200	0,31	9.626.100	19.252.200	0,31
9. PT Surya Fajar Capital Tbk - Konversi Utang	233.050.800	466.101.600	7,42	233.050.800	466.101.600	7,42
10. PT Surya Fajar Corpora - Konversi Utang	105.932.200	211.864.400	3,38	105.932.200	211.864.400	3,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.861.017.000	13.722.034.000		6.861.017.000	13.722.034.000	

E. Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa yang merupakan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan saham baru yang merupakan saham hasil pelaksanaan konversi utang sebanyak 338.983.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu) saham atau sebanyak 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Utang Konversi. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi utang, jumlah Saham Baru yang akan dicatatkan adalah sebanyak 638.983.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu) saham biasa atau sebanyak 20,36% (dua puluh koma tiga puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Utang Konversi.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 79,64% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik Burhan Tjokro sejumlah 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham, saham milik Ulung Wijaya sejumlah 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham, saham milik Mertje Tjokro sejumlah 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham, saham milik Tuti Nuarni sejumlah 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham, saham milik Merty Tjokro sejumlah 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham, dan saham milik Jati Simina sejumlah 1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.138.983.000 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.



F. Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Tidak terdapat peningkatan modal atau pengalihan saham yang diterima oleh pemegang saham yang diperoleh di bawah Harga Penawaran dalam periode 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK. Oleh karenanya tidak terdapat pembatasan pengalihan saham (*lock-up*) atas saham-saham milik pemegang saham saat ini.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN, KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN PADA PROSPEKTUS INI.
--



Halaman ini sengaja dikosongkan



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja (biaya operasional) Perseroan.

Modal kerja yang dimaksud sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan antara lain: biaya bahan bakar (*oil and fuel*), biaya perawatan (*service ringan*) & *spare parts*, dan lain-lain guna mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti biaya mess, makan karyawan dan perjalanan dinas, dan kebutuhan operasional lainnya, mengingat bisnis Perseroan yang terbilang *human capital intensive* dengan karyawan mencapai 856 orang (per 30 Juni 2020).

Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di atas, Perseroan akan membiayai rencana penggunaan dana tersebut dengan menggunakan kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi serta pinjaman Bank.

Sehubungan dengan penggunaan dana sebagai modal kerja (biaya operasional) Perseroan, maka berdasarkan Pasal 8 POJK No. 42 Tahun 2020 dan Pasal 13 POJK 17 Tahun 2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Pasal 4 ayat (1) POJK 42 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17 Tahun 2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 13,40% (tiga belas koma empat puluh persen) dari jumlah dana yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 1,41%.
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,12%.
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,28%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 4,11% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 2,76%, biaya jasa konsultan hukum 1,07%, dan biaya jasa notaris sebesar 0,28%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,18% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
6. Biaya jasa konsultasi keuangan sebesar 2,54%.
7. Biaya lain-lain sebesar 2,76% yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK, biaya pendaftaran BEI dan KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan Prospektus Ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



Halaman ini sengaja dikosongkan



III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, berdasarkan laporan No. 00008/3.0341/AU.1/05/0323-2/1/II/2021 tanggal 8 Februari 2021. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp282.552 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	57.273
Utang usaha	
- Pihak berelasi	1.666
- Pihak ketiga	27.490
Utang lain-lain	
- Pihak ketiga	126
Utang pajak	4.823
Beban akrual	6.455
Uang muka pelanggan	125
Pinjaman opsi konversi pihak ketiga	40.000
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
- Utang bank	52.111
- Utang pembiayaan konsumen	31.785
Jumlah liabilitas jangka pendek	221.853
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
- Utang bank	27.345
- Utang pembiayaan konsumen	29.395
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3.923
Liabilitas pajak tangguhan	36
Jumlah liabilitas jangka panjang	60.699
Total Liabilitas	282.552

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

a. Utang Bank Jangka Pendek

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Jangka pendek	
Rupiah:	
PT Bank Central Asia Tbk	31.173
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.600
PT Bank DBS Indonesia	9.500
Jumlah	57.273

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

Berdasarkan Surat No. 063/021/KRD/ PLG/2001 tanggal 23 Maret 2001, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank BCA dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 41.000.000.000 dan USD 500.000.

Pada tanggal 16 Maret 2016, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 23 Maret 2017 melalui surat persetujuan kredit No. 017/SPPK/SLA/PLG/2016.



Berdasarkan Akta Notaris No. 91 tanggal 28 November 2016 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan kredit No. 028/SPPK/SLA/PLG/2017 tanggal 29 Maret 2017, maksimum pinjaman diubah menjadi Rp46.000.000.000 dan USD 500.000 dan jatuh tempo pada 23 Maret 2018.

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 18 Desember 2017 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Pada tanggal 6 November 2018, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 3 Maret 2019 melalui surat persetujuan kredit No. 127/SPPK/SLA/PLG/2018.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Desember 2018 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan kredit No. 920/SPPK/SLA/2019 tanggal 21 Agustus 2019, maksimum pinjaman diubah menjadi Rp 76.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,50% per tahun dan jatuh tempo dalam 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 21 Oktober 2019 dari Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Pada tanggal 17 Februari 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 12 September 2020 melalui surat persetujuan kredit No. 013/SPPK/SLA/2020.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Maret 2020 dari Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan adalah sebesar Rp31.173.030.604, Rp42.894.292.251, Rp Nihil dan Rp15.802.653.870 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan utang bank jangka panjang (Catatan 18 Laporan Keuangan).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 dan 14 tanggal 8 November 2019 dari Juhaidi, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *Receivable Financing* 1 dan 2 dari Bank Mandiri dengan maksimum pinjaman masing-masing sebesar Rp 31.000.000.000 dan Rp 28.000.000.000 dengan suku bunga mengikuti suku bunga *trade finance* mingguan dari Bank Mandiri dan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan sebagian piutang usaha milik Perusahaan yang dibiayai melalui fasilitas ini (Catatan 5).

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan adalah sebesar Rp16.600.000.000 dan Rp14.400.000.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 25 September 2014 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank DBS dengan maksimum pinjaman sebesar Rp10.000.000.000 yang dapat diperpanjang setiap satu tahun.

Pada tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 26 Juni 2016 melalui Akta Notaris No. 54 tanggal 10 Juni 2015 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang.

Berdasarkan surat perubahan No. 311/PFPA-DBSI/VII/3-4/2016 tanggal 14 Juli 2016, maksimum fasilitas kredit diubah menjadi Rp 6.000.000.000 dan tanggal jatuh tempo sampai dengan 25 Juni 2017.

Berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 28 November 2016 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, maksimum fasilitas kredit diubah menjadi Rp 9.500.000.000 dan tanggal jatuh tempo sampai dengan 25 Juni 2017.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2018 melalui surat perubahan No. 307/PFPA-DBSI/VII/3-4/2017.

Pada tanggal 18 Juli 2018, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2019 melalui surat perubahan No. 302/PFPA-DBSI/VII/3-4/2018.

Pada tanggal 29 Juli 2019, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2020 melalui surat perubahan No. 347/PFPA-DBSI/VII/3-4/2019.



Pinjaman ini dijamin dengan jaminan pribadi dari pemegang saham.

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan adalah sebesar Rp9.500.000.000 dan Rp5.000.000.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp11.721.261.647, Rp7.500.000.000, Rp27.802.653.870 dan Rp23.000.000.000 pada tahun 2020, 2019, 2018 dan 2017.

Beban bunga atas utang bank jangka pendek adalah sebesar Rp2.806.942.703, Rp377.305.568, Rp2.300.537.592, Rp1.321.651.755 dan Rp2.240.444.215 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 24).

b. Utang Usaha

Total Utang Usaha untuk Laporan Keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp29.156 juta Dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga:	
PT Haniven Mulia Sarana	17.976
PT Diandra Kharisma Abadi	1.747
PT Tata Kurnia Pratama	1.630
PT Virgo Makmur Perkasa	753
PT Chitra Paratama	705
PT Asuransi Astra Buana	629
PT United Tractor Tbk	550
PT Atlantic Multi Mandiri	414
PT Bukit Mayana	338
PT Indotruck Utama	313
Monica Catering (Hasby Basyar)	311
Arfa Catering	305
PT Trakindo Utama Tbk	206
Lainnya (masing-masing dibawah Rp200.000.000)	1.614
Jumlah	27.490
Pihak berelasi	1.666
Jumlah	1.666
TOTAL UTANG USAHA	29.156

Utang usaha terdiri atas pembelian suku cadang, perlengkapan dan peralatan operasi.

Analisis umur utang usaha tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	13.173
Jatuh tempo:	
1-30 hari	7.595
31 – 60 hari	5.681
61 – 90 hari	1.471
Lebih dari 90 hari	1.235
Jumlah	29.156

c. Utang Lain-Lain

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp126 juta, yang merupakan utang pembelian aset tetap merupakan liabilitas atas perolehan alat berat dari PT United Tractor Tbk yang terdiri dari

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Uang jaminan	77
Lain-lain	49
TOTAL UTANG LAIN-LAIN	126



d. **Utang Pajak**

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp4.822 juta. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak kini	-
Pajak Penghasilan	-
Pasal 4(2)	-
Pasal 21	88
Pasal 23	34
Pasal 25	0
Pasal 29	34
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	4.666
TOTAL UTANG PAJAK	4.822

e. **Beban Akruai**

Beban akrual Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp6.455 juta. Berikut adalah rincian dari akun beban akrual:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Gaji dan tunjangan	5.923
Lain-lain	532
TOTAL BEBAN AKRUAL	6.455

f. **Pinjaman Opsi Konversi Pihak Ketiga**

Pinjaman opsi konversi pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp40.000 juta. Berikut adalah rincian dari akun pinjaman opsi konversi pihak ketiga:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Surya Fajar Capital Tbk	27.500
PT Surya Fajar Corpora	12.500
TOTAL PINJAMAN OPSI KONVERSI PIHAK KETIGA	40.000

Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 25 Juni 2021, dengan mekanisme pelunasan secara tunai ataupun konversi saham Perseroan. Jika Perseroan memilih metode pelunasan secara tunai maka Perseroan diwajibkan membayar biaya komisi sebesar 10% dari pinjaman. Jika Perseroan menggunakan metode pelunasan berupa konversi saham, maka saham yang dikonversi tidak akan melebihi dari 15% saham beredar Perseroan.

Terkait pinjaman tersebut, Perseroan tidak memberikan jaminan tertentu dan tidak diwajibkan untuk memenuhi pembatasan tertentu.

2. **Liabilitas Jangka Panjang**

a. **Utang Bank Jangka Panjang**

Utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp79.456 juta. Berikut adalah rincian dari akun utang bank jangka panjang.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jangka panjang	
Rupiah:	
PT Bank Central Asia Tbk	71.713
PT Bank Permata Tbk	7.743
Jumlah	79.456
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	52.111
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	27.345



PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

Berdasarkan Surat No. 063/021/KRD/ PLG/2001 tanggal 23 Maret 2001, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank BCA dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 160.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian kendaraan dan alat berat dan dibayar dengan cicilan bulanan selama periode 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 017/SPPK/SLA/PLG/2016 tanggal 16 Maret 2016, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 190.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 91 tanggal 28 November 2016 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 028/SPPK/SLA/PLG/2017 tanggal 29 Maret 2017, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 240.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 18 Desember 2017 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 127/SPPK/SLA/ PLG/2018 tanggal 6 November 2018, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp260.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Desember 2018 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 0920/SPPK/SLA/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Bank BCA mengubah fasilitas kredit terkait dengan penambahan fasilitas kredit investasi jangka panjang XVIII dan XIX dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp25.000.000.000 dan Rp 20.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 21 Oktober 2019 dari Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahandan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 013/SPPK/SLA/2020 tanggal 17 Februari 2020, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp205.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Maret 2020 dari Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, fasilitas pinjaman yang telah digunakan masing-masing sebesar Rp71.712.809.022, Rp100.449.588.194, Rp116.326.756.261 dan Rp62.857.581.397.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap Perusahaan (Catatan 5 dan 11) serta jaminan pribadi dari pemegang saham.

PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)

Berdasarkan Akta Notaris No. 114 tanggal 30 Juli 2018 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit pembiayaan dari Bank Permata dengan maksimum kredit sebesar Rp20.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian kendaraan dan alat berat dan dibayar dengan cicilan bulanan selama periode 3 (tiga) tahun.

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan sebesar Rp7.742.946.227, Rp11.018.767.559 dan Rp17.570.410.223 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibeli dan jaminan pribadi dari pemegang saham.

b. Utang Pembiayaan Konsumen

Utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp61.179 juta, Utang pembiayaan konsumen merupakan liabilitas perolehan kendaraan dan alat berat antara Perusahaan dengan PT Dipo Star Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, PT Surya Artha Nusantara Finance, PT SMFL Finance Indonesia, PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Buana Finance Tbk yang terdiri dari:



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembayaran yang akan jatuh tempo pada tahun:	
2021	31.785
2022	21.505
2023	7.890
Jumlah	61.179
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(31.785)
Jumlah Jangka Panjang	29.395

c. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Asumsi-asumsi aktuarial yang signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya terdiri atas:

Keterangan	30 Juni 2020
Tingkat diskonto	7,90%
Kenaikan upah	5,00%
Usia pensiun	58
Tabel mortalitas	TMI-III(2011)

Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sejumlah Rp3.923 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini kewajiban	3.923
Total Liabilitas Imbalan Paska Kerja	3.923

Komitmen dan Kontijensi

Seluruh perjanjian dan ikatan yang signifikan per tanggal laporan posisi keuangan telah dibukukan dan dilaporkan dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Truk dan Alat Berat dan Jasa Pertambangan

- Pada tanggal 1 Maret 2010, Perusahaan menandatangani kontrak No. OPR-10-1527 dengan PT menambang Muara Enim (MME) tentang jasa pembuangan *overburden* untuk tambangan batubara milik MME dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun. Pada tanggal 1 Maret 2013, jangka waktu kontrak diperpanjang untuk 6 (enam) bulan sampai dengan 1 Maret 2014. Kontrak terakhir diubah pada tanggal 24 Februari 2014, mengenai perpanjangan jangka waktu kontrak untuk 3 (tiga) tahun sampai dengan 1 Maret 2017.
- Berdasarkan kontrak No. OPR-17-0461 dan No.OPR-17-0462 tanggal 12 Mei 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan MME tentang penyewaan truk dan alat berat serta jasa pertambangan batubara milik MME selama 5 (lima) tahun.
- Pada tanggal 2 September 2013, Perusahaan menandatangani kontrak No. 010/MAS-UN/LEG/IX/13 dengan PT Muara Alam Sejahtera (MAS) tentang penyewaan alat berat serta jasa pertambangan batubara milik MAS. Kontrak tersebut kemudian diubah pada tanggal 7 Juli 2014, sehubungan dengan ketentuan pembayaran dan perhitungan kurs mata uang. Pada tanggal 25 Agustus 2014, kontrak diubah kembali terkait jangka waktu kontrak untuk jasa penambangan dan pengangkutan batubara. Pada tanggal 3 Juli 2015, kontrak diubah terkait harga satuan dan penggunaan bahan bakar minyak. Pada tanggal 31 Desember 2015, kontrak diubah terkait rasio bahan bakar minyak. Pada tanggal 5 Oktober 2018, Perusahaan dan MAS sepakat untuk melakukan perubahan ke lima atas kontrak No. 010C/ MASUN/LEG/IX/13 sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu kontrak.
- Pada tanggal 3 November 2014, Perusahaan menandatangani kontrak No. 078A/MAS-UN/LEG/XI/2014 dengan MAS tentang penyewaan alat berat dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun.
- Pada tanggal 12 Februari 2014, Perusahaan menandatangani kontrak No.012/PJJ/P66366/EKS0100/ HK.03/2014 dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tentang penyewaan truk dan alat berat untuk pertambangan batubara milik PTBA dengan jangka waktu kontrak selama 4 (empat) tahun. Pada tanggal 29 November 2016, berdasarkan surat perubahan No. 109/ADD/P66366/EKS-0400/HK.03/2016, kontrak diperbaharui mengenai daftar tarif sewa. Pada tanggal 28 November, 2017, berdasarkan surat perubahan No. 121/ADD/P66366/EKS- 0600/HK.03/2017, kontrak diperbaharui mengenai



penambahan unit truk dan alat berat yang disewakan. Kontrak diperbaharui kembali pada tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan surat perubahan No. 044/ADD/P66366/ EKS0600/HK.03/2018, mengenai perpanjangan jangka waktu sewa beberapa unit truk dan alat berat yang disewakan. Kontrak kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 17 Desember 2019, berdasarkan surat perubahan No. 056/T/ADD/P66366/0600/ HK.03/2019 mengenai perpanjangan kembali masa sewa beberapa unit truk dan alat berat serta perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.

- f. Pada tanggal 30 Mei 2018, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PTBA No. 010/PJJ/A00918/EKS-0600/HK.03/2018 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk pertambangan batubara milik PTBA selama 4 (empat) tahun sebagaimana diubah berdasarkan Addendum-1 No. 052/T/ADD/A00918/0600/HK.03/2020 tanggal 31 Desember 2020.
- g. Pada tanggal 7 Mei 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PTBA No. 013/T/PJJ/B07164/0600/HK.03/2019 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk pertambangan batubara milik PTBA selama 4 (empat) tahun.
- h. Pada tanggal 1 Mei 2014, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-16569315 dengan ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (COPI) tentang penyewaan alat berat dengan jangka waktu kontrak selama 4 (empat) tahun. Pada tanggal 11 April 2015, kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit alat berat yang disewakan. Kontrak kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 30 April 2018, mengenai perpanjangan masa kontrak selama 1 (satu) tahun dan kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 30 April 2019, mengenai perpanjangan kembali masa kontrak selama 6 (enam) bulan.
- i. Pada tanggal 15 Oktober 2016, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-17220739 dengan COPI tentang penyewaan alat berat dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun. Pada tanggal 25 Januari 2018, kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit yang disewakan dan kontrak diubah kembali pada tanggal 1 Januari 2019, mengenai nilai kontrak.
- j. Pada tanggal 8 Agustus 2017, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-17193924R dengan COPI tentang penyewaan alat berat selama 5 (lima) tahun.
- k. Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menandatangani kontrak dengan COPI No. CS-17801618 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk kegiatan pengeboran milik COPI selama 1 (satu) tahun.
- l. Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menandatangani kontrak dengan COPI No. CS-17801618 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk kegiatan pengeboran milik COPI selama 1 (satu) tahun.
- m. Pada tanggal 20 Februari 2020, Perusahaan menandatangani kontrak dengan COPI No. CS-17915769 tentang penyewaan alat berat untuk kegiatan pengeboran milik COPI selama 2 (dua) tahun.
- n. Pada tanggal 1 Mei 2018, Perusahaan menandatangani kontrak No. OPR-18-0211 dengan PT Pacific Global Utama tentang penyewaan truk dan alat berat selama 2 (dua) tahun.
- o. Pada tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Banyan Koalindo Lestari (BKL) No. 010/PJ-BKL-UN/2019 tentang jasa penambangan tambang batubara milik BKL selama 3 (tiga) tahun.
- p. Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Satria Bahana Sarana (SBS) No. 906A/SBS-HO/DIR/X/2019 tentang penyewaan alat berat milik Perusahaan selama 3 (tiga) tahun.
- q. Pada tahun 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Duta Bara Utama (DBU) No. 001/LEG-DIR-DBU-PTUN/II/2019 tentang jasa pertambangan milik DBU selama 2 (dua) tahun.

Perjanjian Jasa Konstruksi

Pada tanggal 1 Desember 2015, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-17019337 dengan ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (COPI) tentang jasa konstruksi jalan dan sumur gas milik COPI dengan jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 November 2017 kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit alat berat yang disewakan dan pada tanggal 15 Desember 2017, kontrak diperbaharui kembali mengenai perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.

Perjanjian penanggulangan Keadaan Darurat dan Rehabilitasi Lingkungan

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Pertamina Gas No. 3900471013 tentang jasa penanggulangan keadaan darurat dan rehabilitasi lingkungan selama 3 (tiga) tahun.

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman bank, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan administratif, seperti pemenuhan jaminan, pemberitahuan/notifikasi dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan batasan-batasan tertentu seperti rasio keuangan dan lain-lain yang tercantum dalam perjanjian.



Perseroan senantiasa berusaha memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian fasilitas pinjaman tersebut. Kecuali belum terpenuhinya sebagian batasan-batasan rasio keuangan yang tercantum dalam perjanjian kredit, tidak terdapat adanya pelanggaran lain atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Selain itu, hingga saat ini, Perseroan selalu tepat waktu dan tepat jumlah dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada kreditur dan tidak pernah mendapat teguran atau dinyatakan melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 JUNI 2020 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana terlampir pada Bab XIX Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Idris Jono, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020. Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Laporan keuangan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 dimana dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	1.037	7.016	11.917	20.702	4.745
Piutang usaha					
- Pihak ketiga	126.198	110.451	118.929	46.549	51.295
Piutang lain-lain					
- Pihak ketiga	318	780	5.546	151	292
Persediaan	3.083	3.152	1.653	-	-
Pajak dibayar dimuka	5.587	-	-	783	-
Biaya dibayar dimuka	6.966	3.556	2.965	3.504	3.089
Uang muka pembelian	40.033	36.082	211	148	1.848
Jumlah aset lancar	183.222	161.037	141.222	71.836	61.269
Aset tidak lancar					
Klaim pengembalian pajak	-	2.120	-	5.270	5.270
Aset pajak tangguhan	-	-	2.955	-	4.146
Aset tetap-bersih	356.451	395.631	436.402	415.877	368.390
Jumlah aset tidak lancar	356.451	397.751	439.357	421.147	377.806
JUMLAH ASET	539.673	558.788	580.579	492.983	439.074

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas jangka pendek					
Utang bank jangka pendek	53.080	57.273	62.294	-	15.803
Utang usaha					
- Pihak berelasi	996	1.666	883	705	669
- Pihak ketiga	39.577	27.490	33.202	22.939	24.874
Utang lain-lain pihak ketiga	1.613	126	13.944	10.572	17.457
Utang pajak	2.074	4.823	3.327	231	783
Beban akrual	7.844	6.455	5.816	11.139	5.485
Uang muka pelanggan	125	125	175	28	-
Pinjaman opsi konversi pihak ketiga	40.000	40.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Utang bank	64.144	52.111	60.187	59.981	33.087
- Utang pembiayaan konsumen	54.040	31.785	32.372	26.597	32.076
Jumlah liabilitas jangka pendek	263.493	221.853	212.200	132.191	130.233



Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Liabilitas jangka panjang					
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Utang bank	-	27.345	51.282	73.916	29.771
- Utang pembiayaan konsumen	-	29.395	34.852	16.556	25.088
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3.923	3.923	3.749	3.508	3.187
Liabilitas pajak tangguhan	-	36	-	789	-
Jumlah liabilitas jangka panjang	3.923	60.699	89.883	94.769	58.046
JUMLAH LIABILITAS	267.416	282.552	302.083	226.960	188.279
Ekuitas					
Modal ditempatkan dan disetor	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Cadangan umum	1.000	1.000	1.000	-	-
Saldo laba	259.206	263.511	265.679	254.245	239.105
Penghasilan komprehensif lain	7.050	6.725	6.818	6.777	6.690
JUMLAH EKUITAS	272.256	276.236	278.496	266.023	250.795
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	539.673	558.788	580.579	492.983	439.074

¹tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni		31 Desember		
	2020	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan bersih	270.926	155.482	140.088	332.526	345.024	301.947
Beban pokok penjualan	(246.379)	(136.698)	(124.090)	(274.727)	(286.897)	(258.179)
Laba kotor	24.547	18.784	15.998	57.799	58.127	43.768
Beban Usaha						
Umum dan administrasi	(19.567)	(11.462)	(10.753)	(25.268)	(23.215)	(22.582)
Pajak final	-	-	-	-	(661)	(1.400)
Jumlah beban usaha	(19.567)	(11.462)	(10.753)	(25.268)	(23.876)	(23.981)
Laba usaha	4.980	7.322	5.245	32.531	34.251	19.786
Penghasilan (beban) lain-lain						
Keuntungan atas penjualan aset tetap	8.108	4.289	2.478	1.739	8.387	2.274
Pendapatan klaim asuransi	-	544	-	5.054	2.750	848
Pendapatan bunga	33	15	98	113	90	72
Beban bunga dan keuangan lainnya	(19.061)	(11.225)	(9.453)	(19.911)	(16.122)	(15.430)
Lain-lain – bersih	323	1.108	(127)	5	(913)	(572)
Beban lain-lain – bersih	(10.597)	(5.270)	(7.003)	(13.001)	(5.808)	(12.807)
Laba (rugi) sebelum pajak	(5.617)	2.053	(1.758)	19.530	28.443	6.979
Penghasilan (beban) pajak - bersih	-	(3.466)	1.463	(2.097)	(11.302)	1.090
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(5.617)	(1.413)	(295)	17.433	17.141	8.069
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
-Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	(119)	27	54	116	(435)
-Pajak terkait	-	26	(7)	(13)	(29)	109
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	-	(93)	20	40	87	(326)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(5.617)	(1.506)	(275)	17.474	17.228	7.743



Keterangan	30 November ¹	30 Juni		31 Desember		
	2020	2020	2019	2019	2018	2017
Laba (rugi) periode/tahun berjalan per saham ²	(2,25)	(0,57)	(0,12)	6,97	6,86	3,23
Dividen per saham ²	-	-	-	100.000	40.000	20.000

¹tidak diaudit

²dalam angka penuh

Rasio Keuangan

Keterangan	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (% YoY)					
Penjualan bersih	n/a	10,99%	-3,62%	14,27%	N/A
Beban pokok penjualan	n/a	10,16%	-4,24%	11,12%	N/A
Laba kotor	n/a	17,41%	-0,56%	32,81%	N/A
Laba usaha	n/a	39,60%	-5,02%	73,10%	N/A
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	n/a	-379,17%	1,71%	112,42%	N/A
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	n/a	-448,27%	1,43%	122,49%	N/A
Jumlah aset	n/a	-3,75% ¹	17,77%	12,28%	N/A
Jumlah liabilitas	n/a	-6,47% ¹	33,10%	20,54%	N/A
Jumlah ekuitas	n/a	-0,81% ¹	4,69%	6,07%	N/A
Rasio Profitabilitas (% YoY)					
Marjin Laba Kotor	9,06%	12,08%	17,38%	16,85%	14,50%
Marjin Laba Operasional	1,84%	4,71%	9,78%	9,93%	6,55%
Marjin Laba Bersih	-2,07%	-0,91%	5,24%	4,97%	2,67%
Rasio Laba Kotor terhadap Total Aset	4,55%	3,36%	9,96%	11,79%	9,97%
Rasio Laba Operasi terhadap Total Aset	0,92%	1,31%	5,60%	6,95%	4,51%
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset	-1,04%	-0,25%	3,00%	3,48%	1,84%
Rasio Laba Kotor terhadap Total Ekuitas	9,02%	6,80%	20,75%	21,85%	17,45%
Rasio Laba Operasi terhadap Total Ekuitas	1,83%	2,65%	11,68%	12,88%	7,89%
Rasio Laba Bersih terhadap Total Ekuitas	-2,06%	-0,51%	6,26%	6,44%	3,22%
Rasio Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,52	0,51	0,52	0,46	0,43
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,98	1,02	1,08	0,85	0,75
Rasio Likuiditas (x)					
Current Ratio	0,70	0,73	0,67	0,54	0,47
Quick Ratio	0,48	0,53	0,64	0,51	0,43

¹rasio ini merupakan perbandingan posisi 30 Juni 2020 dengan 31 Desember 2019

LAPORAN KEUANGAN INTERIM MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PERSEROAN



Halaman ini sengaja dikosongkan



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XIX Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Ulima Nitra sesuai dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 25 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2811.HT.01.01.th.93 tertanggal 5 Mei 1993 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 dibawah agenda No. 37./1993/PT. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No.10/2020.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah; Konstruksi; Pengangkutan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dapat bertindak baik sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan. Demi menjaga kualitas dan mutu layanan yang diberikan kepada setiap pelanggan serta tetap memperhatikan keselamatan karyawan, Perseroan telah tersertifikasi ISO 9001:2015, sertifikasi OHSAS 18001:2007 dan sertifikasi SMK3. Saat ini kegiatan usaha Perseroan terpusat pada tambang batubara yang berada di wilayah Sumatera Selatan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah lainnya.

B. ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan dan laba komprehensif Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019*	2019	2018	2017
Penjualan bersih	155.482	140.088	332.526	345.024	301.947
Laba kotor	18.784	15.998	57.799	58.127	43.768
Laba usaha	7.322	5.245	32.531	34.251	19.786
Laba (rugi) sebelum pajak	2.053	(1.758)	19.530	28.443	6.979
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(1.413)	(295)	17.433	17.141	8.069
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(1.506)	(275)	17.474	17.228	7.743

*tidak diaudit

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a) Penjualan Bersih

Perbandingan penjualan bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Penjualan bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp155.482 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp15.394 juta atau sebesar 10,99% dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp140.088 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan pendapatan jasa pertambangan dari Rp66.405 juta menjadi Rp95.168 juta atau meningkat sebesar 43,32%. Sedangkan untuk penyewaan truk dan alat berat mengalami penurunan dari Rp72.717 juta menjadi Rp52.565 juta atau turun sebesar 27,71%.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Penjualan bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp332.526 juta, mengalami penurunan sebesar Rp12.497 juta atau sebesar -3,62% dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp345.024 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pendapatan penyewaan truk dan alat berat dari Rp142.464 juta menjadi Rp113.025 juta atau turun sebesar 20,66%. Selain itu, pada periode tahun 2019 Perseroan tidak memiliki pendapatan jasa konstruksi, dimana pada periode tahun 2018 terdapat pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp22.047 juta.



Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp345.024 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.076 juta atau sebesar 14,27% dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp301.947 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan pendapatan penyewaan truk dan alat berat dari Rp77.369 juta menjadi Rp142.464 juta atau meningkat sebesar 84,14%. Sedangkan untuk pendapatan jasa konstruksi mengalami penurunan dari Rp46.651 juta menjadi Rp22.047 juta atau turun sebesar 52,74%.

Komponen-komponen dari penjualan bersih Perseroan antara lain disajikan dalam tabel berikut dibawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019*	2019	2018	2017
Jasa pertambangan	95.168	66.405	217.369	178.920	177.025
Sewa truk dan alat berat	52.565	72.717	113.025	142.464	77.369
Jasa konstruksi	-	-	-	22.047	46.651
Lainnya	7.749	966	2.132	1.592	902
Total	155.482	140.088	332.526	345.024	301.947

*tidak diaudit

b) Laba Kotor

Perbandingan laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Laba kotor Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp18.784 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.786 juta atau sebesar 17,42% dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp15.998 juta yang terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan usaha.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp57.799 juta, mengalami penurunan sebesar Rp328 juta atau sebesar -0,56% dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp58.127 juta. Penyebab utama penurunan antara lain karena di satu sisi terjadi penurunan pendapatan sedangkan beban tetap (*fixed cost*) tidak mengalami banyak penurunan seperti beban penyusutan yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi peningkatan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebesar 22,98% yang disebabkan oleh adanya kontrak baru dengan pihak ketiga dimana biaya BBM ditanggung oleh Perseroan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp58.127 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp14.359 juta atau sebesar 32,81% dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp43.768 juta. Penyebab utama kenaikan antara lain karena Perseroan dapat melakukan efisiensi beban pokok seperti biaya lapangan dan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Selain itu, Perseroan juga mampu menjaga efisiensi terkait beban gaji dan tunjangan.

c) Laba Usaha

Perbandingan laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Laba usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp7.322 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.077 juta atau sebesar 39,60% dibandingkan dengan laba usaha pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp5.245 juta. Kenaikan laba usaha terutama disebabkan oleh efisiensi yang terjadi di tingkat beban pokok usaha, dimana saat penjualan naik sebesar 10,99%, laba kotor mampu tumbuh lebih tinggi yakni 17,41%.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.531 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.720 juta atau sebesar -5,02% dibandingkan dengan laba usaha pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp34.251 juta. Penyebab utama penurunan antara lain dikarenakan biaya operasional (biaya umum dan administrasi) yang relatif stabil sedangkan pendapatan dan laba kotor saat itu sedang mengalami penurunan.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp34.251 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp14.465 juta atau sebesar 73,10% dibandingkan dengan laba usaha pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar



Rp19.786 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena perseroan mampu menjaga efisiensi beban umum dan administrasi pada saat penjualan dan laba kotor meningkat signifikan.

d) Penghasilan (Beban) Lain-lain

Perbandingan penghasilan (beban) lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Beban lain-lain bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp-5.270 juta, mengalami penurunan sebesar Rp-1.738 juta atau sebesar 24,76% dibandingkan dengan beban lain-lain bersih pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp-7.004 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari peningkatan keuntungan penjualan aset tetap dari Rp2.478 juta menjadi 4.289 juta atau meningkat sebesar 73,08%.

Perbandingan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Beban lain-lain bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-13.001 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.192 juta atau sebesar 123,81% dibandingkan dengan beban lain-lain bersih pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp-5.809 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan penjualan aset tetap dari Rp8.387 juta menjadi Rp1.739 juta atau turun sebesar 79,27%

Perbandingan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Beban lain-lain bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-5.809 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.998 juta atau sebesar 54,64% dibandingkan dengan beban lain-lain bersih pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp-12.807 juta. penurunan tersebut terutama berasal dari peningkatan penjualan aset tetap dari Rp2.274 juta menjadi Rp8.387 juta atau meningkat sebesar 268,82%.

e) Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.053 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.811 juta atau sebesar 216,76% dibandingkan dengan laba (rugi) sebelum pajak pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar -Rp1.758 juta. Penyebab utama kenaikan karena adanya peningkatan laba usaha sebesar Rp2.077 juta dan peningkatan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap sebesar Rp1.810 juta dan pendapatan klaim asuransi serta lain-lain Rp544 juta. Di sisi lain Perseroan mencatatkan beban bunga Rp11.225 juta atau meningkat sebesar Rp1.772 juta dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp9.453 juta.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.530 juta, mengalami penurunan sebesar Rp8.913 juta atau sebesar -31,34% dibandingkan dengan laba (rugi) sebelum pajak pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp28.443 juta. Penyebab utama penurunan karena selain penurunan laba usaha juga disebabkan peningkatan beban bunga dan keuangan dari awalnya Rp16.122 juta menjadi Rp19.911 juta.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.443 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp21.464 juta atau sebesar 307,55% dibandingkan dengan laba (rugi) sebelum pajak pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp6.979 juta. Penyebab utama kenaikan karena adanya peningkatan laba usaha sebesar Rp14.465 juta dan peningkatan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap sebesar Rp6.113 juta dan peningkatan pendapatan klaim asuransi sebesar Rp1.901 juta.

f) Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan laba (rugi) periode/tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar -Rp1.413 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.118 juta atau sebesar -379,17% dibandingkan dengan laba (rugi) periode/tahun berjalan pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar -Rp295 juta. Penyebab utama penurunan karena adanya peningkatan beban pajak terutama pajak tangguhan.



Perbandingan laba (rugi) periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.433 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp293 juta atau sebesar 1,71% dibandingkan dengan laba (rugi) periode/tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.141 juta. Penyebab utama kenaikan karena adanya penurunan beban pajak akibat dari pencatatan pajak tangguhan.

Perbandingan laba (rugi) periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.141 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp9.071 juta atau sebesar 112,42% dibandingkan dengan laba (rugi) periode/tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp8.069 juta. Penyebab utama kenaikan karena adanya kenaikan beban pajak, baik pajak kini maupun pajak tangguhan.

g) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak

Perbandingan penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar -Rp93 juta, mengalami kenaikan rugi sebesar -Rp113 juta atau sebesar -561,24% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp20 juta. Peningkatan rugi komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan karena adanya peningkatan kerugian terhadap pos pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar -Rp146 juta atau sebesar -543,50%.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp40 juta, mengalami penurunan laba sebesar -Rp47 juta atau sebesar 53,61% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp87 juta. Penurunan laba komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan karena adanya penurunan pos pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar -Rp62 juta atau sebesar -53,61%.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp87 juta, mengalami kenaikan laba sebesar Rp413 juta atau sebesar 126,67% dibandingkan dengan penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar -Rp326 juta. Peningkatan penghasilan komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan karena adanya peningkatan pos pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar Rp551 juta atau sebesar 126,67%.

h) Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif

Perbandingan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar -Rp1.506 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.231 juta atau sebesar -448,27% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar -Rp275 juta. Peningkatan rugi komprehensif terutama disebabkan karena peningkatan rugi tahun berjalan. Pos penghasilan (rugi) komprehensif tidak berpengaruh material bagi kinerja keuangan Perseroan.

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.474 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp246 juta atau sebesar 1,43% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.228 juta. Peningkatan penghasilan komprehensif terutama disebabkan karena peningkatan laba tahun berjalan. Pos penghasilan (rugi) komprehensif tidak berpengaruh material bagi kinerja keuangan Perseroan.



Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.228 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp9.484 juta atau sebesar 122,49% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.743 juta. Peningkatan penghasilan komprehensif terutama disebabkan karena peningkatan laba tahun berjalan. Pos penghasilan (rugi) komprehensif tidak berpengaruh material bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Aset Lancar	161.037	141.222	71.836	61.269
Aset Tidak Lancar	397.752	439.357	421.147	377.806
Total Aset	558.788	580.579	492.983	439.074
Liabilitas Jangka Pendek	221.853	212.200	132.191	130.233
Liabilitas Jangka Panjang	60.699	89.883	94.769	58.046
Total Liabilitas	282.552	302.083	226.960	188.279
Ekuitas	276.236	278.496	266.023	250.795

a) Aset Lancar

Perbandingan aset lancar pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp161.037 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp19.814 juta atau sebesar 14,03% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp141.222 juta. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh adanya pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 27.295 m² yang seluruhnya terletak di kota Palembang yang direncanakan akan digunakan fasilitas pendukung operasional Perseroan (*workshop* atau gudang) dengan nilai sebesar Rp35.404 juta.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp141.222 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp69.386 juta atau sebesar 96,59% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp71.836 juta. Kenaikan aset lancar disebabkan karena adanya peningkatan piutang usaha sebesar Rp72.381 juta dari awalnya sebesar Rp46.549 juta menjadi Rp118.929 juta.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp71.836 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp10.567 juta atau sebesar 17,25% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp61.269 juta. Kenaikan aset lancar karena adanya peningkatan kas dan setara kas dari Rp4.745 juta menjadi Rp20.702 juta.

b) Aset Tidak Lancar

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp397.752 juta, mengalami penurunan sebesar Rp41.605 juta atau sebesar -9,47% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp439.357 juta. Penurunan aset tidak lancar ini selain disebabkan oleh faktor penyusutan, juga disebabkan oleh besarnya nilai penjualan mesin, kendaraan dan alat berat yang mencapai Rp43.489 juta. Sedangkan penambahan hanya tercatat sebesar Rp7.807 juta.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp439.357 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp18.210 juta atau sebesar 4,32% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp421.147 juta. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh adanya penambahan mesin, peralatan, kendaraan, alat berat, dan peralatan kantor sebesar Rp120.244 juta, sedangkan penjualan yang terjadi tercatat hanya Rp73.403 juta.



Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp421.147 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.341 juta atau sebesar 11,47% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp377.806 juta. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh adanya penambahan mesin, peralatan, kendaraan, alat berat, dan peralatan kantor sebesar Rp139.362 juta, sedangkan penjualan yang terjadi tercatat hanya Rp64.332 juta.

c) Total Aset

Perbandingan total aset pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp558.788 juta, mengalami penurunan sebesar Rp21.791 juta atau sebesar -3,75% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp580.579 juta. Penurunan total aset disebabkan karena adanya penurunan aset tidak lancar sebesar -Rp41.605 juta atau sebesar -9,47% penuruna ini selain disebabkan karena adanya penyusutan juga dikarenakan adanya penjualan aset tidak lancar perseroan sebesar Rp43.489 juta.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp580.579 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp87.598 juta atau sebesar 17,77% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp492.982 juta. Kenaikan total aset disebabkan karena adanya kenaikan aset lancar sebesar Rp69 juta atau sebesar 96,59% dan juga kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp18.210 juta atau sebesar 4,32% kenaikan aset tersebut disebabkan karena adanya pembelian aset baru.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp492.983 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp53.909 juta atau sebesar 12,28% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp439.074 juta. Kenaikan total aset disebabkan karena adanya peningkatan aset lancar sebesar Rp10.567 juta atau sebesar 17,25% dan juga kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp43.341 juta atau sebesar 11,47% kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan aset mesin, peralatan, kendaraan, alat berat, dan peralatan kantor.

d) Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp221.853 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp9.654 juta atau sebesar 4,55% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp212.200 juta. Kenaikan liabilitas jangka pendek disebabkan karena adanya penarikan pinjaman dengan opsi konversi sebesar Rp40.000 juta yang sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap berupa tanah yang diperuntukan sebagai gudang atau *workshop* mesin-mesin dan alat berat Perseroan.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp212.200 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp80.009 juta atau sebesar 60,53% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp132.191 juta. Kenaikan liabilitas jangka pendek disebabkan karena adanya kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp62.294 juta yang terutama digunakan untuk modal Perseroan.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp132.191 juta, mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp1.958 juta atau sebesar 1,50% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp130.233 juta. Kenaikan terutama diakibatkan adanya beban akrual sebesar Rp11.139 juta sedangkan saldo kewajiban lain umumnya mengalami penurunan.

e) Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp60.699 juta, mengalami penurunan sebesar Rp29.184 juta atau sebesar -32,47% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89.883 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang selain karena disebabkan sebagian porsi utang jangka panjang telah berpindah ke posisi lancar (jatuh tempo dalam satu tahun), juga disebabkan adanya pembayaran utang bank dan pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp50.386 juta.



Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp89.883 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.886 juta atau sebesar -5,16% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp94.769 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang selain karena disebabkan sebagian porsi utang jangka panjang telah berpindah ke posisi lancar (jatuh tempo dalam satu tahun), juga disebabkan adanya pembayaran utang bank dan pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp94.310 juta.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp94.769 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp36.723 juta atau sebesar 63,26% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp58.046 juta. Kenaikan liabilitas jangka panjang disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka panjang.

f) Total Liabilitas

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp282.552 juta, mengalami penurunan sebesar Rp19.530 juta atau sebesar -6,47% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp302.802 juta. Penurunan total liabilitas disebabkan adanya penurunan hutang jangka panjang sebesar -29.183 juta atau sebesar -32,47% yang disebabkan karena adanya pembayaran utang bank dan pembiayaan konsumen jangka Panjang.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp302.083 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp75.122 juta atau sebesar 33,10% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp226.960 juta. Kenaikan liabilitas disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp80.008 juta atau sebesar 60,53% yang disebabkan karena adanya kenaikan utang bank jangka pendek yang digunakan untuk modal perseroan.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp226.960 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp38.681 juta atau sebesar 20,54% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp188.279 juta. Kenaikan liabilitas disebabkan karena adanya peningkatan hutang jangka pendek sebesar Rp1.958 juta atau sebesar 1,50% dan juga adanya kenaikan hutang jangka panjang sebesar Rp36.722 juta atau sebesar 63,26% yang terutama disebabkan karena adanya kenaikan utang bank jangka panjang.

g) Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp276.236 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.260 juta atau sebesar -0,82% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp278.496 juta. Penurunan ekuitas disebabkan karena Perseroan mengalami kerugian komprehensif sebesar Rp1.506 juta.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp278.496 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp12.474 juta atau sebesar 4,69% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp266.023 juta. Kenaikan ekuitas disebabkan karena Perseroan memperoleh pendapatan komprehensif sebesar Rp17.474 juta.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp266.023 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp15.228 juta atau sebesar 6,07% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp250.795 juta. Kenaikan ekuitas disebabkan karena Perseroan memperoleh pendapatan komprehensif sebesar Rp17.228 juta.



3. Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	21.446	15.586	57.609	116.565	131.685
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	284	(1.696)	(9.467)	14.984	(37.174)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(26.632)	(30.093)	(56.927)	(115.592)	(97.913)

a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	163.910	112.187	260.293	349.798	311.033
Pembayaran kas pada pemasok dan lainnya	(99.381)	(58.973)	(122.445)	(149.606)	(102.111)
Pembayaran kepada karyawan	(40.484)	(35.357)	(74.346)	(77.299)	(71.960)
Kas dihasilkan dari operasi	24.045	17.857	63.502	122.893	136.961
Pembayaran pajak penghasilan	(2.599)	(2.271)	(5.892)	(6.328)	(5.276)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	21.446	15.586	57.609	116.565	131.685

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.860 juta atau 37,59% dari sebelumnya Rp15.586 juta pada 30 Juni 2019 menjadi Rp21.446 juta pada 30 Juni 2020 yang terutama disebabkan oleh tingginya peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp58.956 juta atau 50,58% dari sebelumnya Rp116.565 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp57.609 juta pada 31 Desember 2019 yang terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp116.565 juta, menurundibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp131.685 juta. Penyebab utama perubahan arus kas dari aktivitas operasi ini adalah karena adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok dari Rp102.111 juta menjadi Rp149.606 juta.

b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan bunga	15	98	113	90	72
Penerimaan dari penjualan aset tetap	7.166	3.832	14.712	15.560	4.067
Perolehan aset tetap	(6.897)	(5.626)	(24.292)	(666)	(41.314)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	284	(1.696)	(9.467)	14.984	(37.174)

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp284 juta atau meningkat sebesar Rp1.981 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2019 yang tercatat negatif Rp1.696 juta. Penyebab utama perubahan arus kas dari aktivitas investasi ini antara lain dipengaruhi oleh penerimaan dari penjualan aset tetap yang lebih besar dibandingkan perolehan aset tetap yang terjadi.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah negatif Rp9.467 juta atau turun sebesar Rp24.451 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2018 yang



tercatat Rp14.984 juta, yang disebabkan oleh adanya investasi berupa pembelian aset tetap yang cukup material yakni sebesar Rp24.292 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah positif Rp14.984 juta atau meningkat sebesar Rp52.158 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2017 yang tercatat sebesar negatif Rp37.174 juta, besarnya arus kas yang keluar untuk investasi pada tahun 2017 disebabkan karena adanya pembelian aset tetap yang material yakni sebesar Rp41.314 juta yang menyebabkan arus kas investasi pada tahun 2017 mengalami defisit. Pada tahun 2018 Perseroan banyak melakukan penjualan aset tetap yakni sebesar Rp15.560 juta, di sisi lain pembelian aset tetap hanya tercatat Rp666 juta.

Pola arus kas dari aktivitas investasi yang negatif dalam beberapa tahun terakhir secara umum terjadi sehubungan dengan pembelian aset tetap terutama yang terkait dengan kegiatan pendukung produksi. Kondisi ini dinilai masih wajar untuk perusahaan-perusahaan yang terus bertumbuh.

c) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran utang bank jangka pendek	(11.721)	-	(7.500)	(27.803)	(23.000)
Penerimaan utang bank jangka pendek	6.700	31.028	69.794	12.000	19.856
Penerimaan pinjaman opsi konversi pihak ketiga	40.000	-	-	-	-
Pembayaran utang bank jangka panjang	(32.013)	(31.200)	(62.520)	(44.510)	(39.880)
Penurunan utang pembiayaan konsumen jangka panjang	(18.373)	(15.468)	(31.790)	(37.158)	(38.460)
Pembayaran dividen	-	(5.000)	(5.000)	(2.000)	(1.000)
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya	(11.225)	(9.453)	(19.911)	(16.122)	(15.430)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(26.632)	(30.093)	(56.927)	(115.592)	(97.913)

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah negatif Rp26.632 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah negatif Rp30.093 juta. Penyebab utama arus kas pendanaan negatif adalah adanya pembayaran utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang serta utang pembiayaan konsumen yang cukup besar.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah negatif Rp56.927 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah negatif Rp115.592 juta. Penyebab utama arus kas pendanaan negatif adalah adanya pembayaran utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang serta utang pembiayaan konsumen yang cukup besar, dimana pembiayaan yang diperoleh nilainya lebih kecil dibandingkan pembayaran yang terjadi.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah negatif Rp115.592 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah negatif Rp97.913 juta. Penyebab utama arus kas pendanaan negatif adalah adanya pembayaran utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang serta utang pembiayaan konsumen yang cukup besar, dimana pembiayaan yang diperoleh nilainya lebih kecil dibandingkan pembayaran yang terjadi.

Secara umum kondisi arus kas dari aktivitas pendanaan yang negatif menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dari operasional Perseroan (*internal cash flow*).

4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar/total liabilitas jangka pendek) Perseroan yang selalu berada di atas 0,50x, pada periode berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,73x, 0,67x, 0,54x dan 0,47x.



Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Per 30 Juni 2020, Perseroan memiliki utang bank jangka pendek senilai Rp57.273 juta dan utang usaha senilai Rp29.156 juta.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Perseroan yang telah berdiri lebih dari 28 tahun sejak tahun 1992, telah mengalami berbagai siklus perekonomian baik yang disebabkan oleh kondisi global maupun domestik, seperti masa krisis politik Asia pada tahun 1998, krisis keuangan global pada tahun 2008, turunnya harga batubara pada tahun 2012. Sampai dengan saat ini, Perseroan terbukti dapat melalui semua siklus dengan baik.

Sejauh ini Perseroan selalu dapat memenuhi kebutuhan modal kerjanya, baik berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja di masa mendatang, Perseroan dapat menggunakan beberapa alternatif pendanaan, seperti perbankan maupun pasar modal (dana hasil Penawaran Umum, maupun penerbitan instrument surat utang seperti obligasi maupun surat utang jangka menengah).

5. Dampak Kondisi Pandemi COVID-19

Kondisi Pandemi COVID-19 serta pembatasannya yang berlangsung di berbagai daerah berdampak pada Perseroan yang bergerak di jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan secara moderat. Hal ini dikarenakan protokol Kesehatan yang harus dilakukan oleh Perseroan, dimana para pekerja harus bekerja secara *shift* namun demikian para pekerja yang akan masuk ke area site diharuskan melakukan karantina terlebih dahulu. Hal ini tentunya berdampak pada biaya operasional yang dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun dengan turunnya konsumsi batubara, berdampak pada turunnya target produksi dari pemilik tambang, hal ini tentunya juga berdampak terhadap pendapatan Perseroan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Berikut ini merupakan kebijakan akuntansi yang penting dalam Perseroan:

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan dari Badan Pengatur Pasar Modal. Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK No. 73, Sewa

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

Perseroan memperkirakan bahwa penerapan amandemen PSAK di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.



c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

D. BELANJA MODAL

Secara historis, belanja modal Perseroan terutama terdiri dari pembelian tanah, bangunan, mesin dan instalasi, kendaraan serta inventaris. Sebagian besar untuk pembelian kendaraan, alat berat, dan mesin & peralatan sebagai penunjang kegiatan operasional Perseroan.

Tabel berikut ini menggambarkan informasi mengenai belanja modal Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	182	-
Mesin dan peralatan	530	6.702	4.633	6.368
Kendaraan	2.202	54.699	74.164	47.568
Alat berat	910	57.829	60.271	53.386
Peralatan kantor	136	1.015	113	4.365
Aset tetap dalam pembangunan	4.028	-	-	-
Jumlah belanja modal	7.807	120.244	139.362	111.957

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini berasal dari pinjaman dan laba Perseroan. Berikut adalah list jumlah alat berat, truk, dan kendaraan Perseroan:

Jumlah Alat Berat, Truk, dan Kendaraan Perseroan 2017 – Juni 2020

Keterangan	Juni 2020	2019	2018	2017
Alat Berat	193	205	204	218
Truk	217	237	226	220
Kendaraan	50	49	63	90
Total	460	491	493	528

Komitmen investasi barang modal per 30 Juni 2020

Saat ini, tidak terdapat komitmen investasi yang terutang dari Perseroan.

Investasi barang modal sehubungan dengan pemenuhan persyaratan regulasi

Tidak terdapat kewajiban investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Kewajiban reklamasi dan lain-lain menjadi tanggung jawab pemilik tambang atau pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

E. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN LABA

Berikut ini merupakan tabel harga dan persentase perubahan harga komoditi batubara per tahun 2019, 2018, dan 2017:

Komoditi	2019	2018	2017
Harga rata-rata bulanan batubara (USD/ton)	77,9	99,0	85,9
Persentase perubahan harga	-21,3%	15,2%	

Sumber: Harga Batubara Acuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Berikut ini merupakan tabel penjualan bersih, laba periode/tahun berjalan, dan persentase perubahan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Penjualan Bersih	332.326	345.023	301.947
Laba periode/tahun berjalan	17.433	17.141	8.069
Persentase perubahan nilai			
Penjualan Bersih	-3,7%	14,3%	
Laba periode/tahun berjalan	1,7%	112,4%	



Dampak perubahan harga rata-rata batubara selama tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 berbanding lurus terhadap penurunan penjualan bersih sedangkan untuk laba periode/tahun berjalan berbanding terbalik disebabkan adanya penurunan beban pajak bersih Perseroan pada tahun 2019.

Dampak perubahan harga rata-rata batubara selama tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 berbanding lurus terhadap peningkatan penjualan bersih dan laba periode/tahun berjalan Perseroan.

Perseroan bukan merupakan produsen tambang (batubara atau mineral lain), sehingga perubahan harga komoditas akan lebih memberikan dampak terhadap penjualan dan profitabilitas klien-klien Perseroan, dibanding kepada Perseroan. Hal ini disebabkan: 1) adanya minimum kontrak khususnya pada bisnis penyewaan alat berat dan kendaraan, dan 2) dalam hal harga komoditas jatuh, terkadang pekerjaan pertambangan masih tetap dilakukan, baik dalam bentuk *overburden removal*, *top soil removal*, *stockpiling* maupun pekerjaan tambang lainnya, sehingga penurunan ataupun kenaikan pendapatan akibat perubahan harga tetap akan terjadi, namun korelasinya tidak sekuat pengaruh antara harga batubara dan pendapatan perusahaan-perusahaan tambang batubara tersebut.

F. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berikut merupakan Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan:

- Kebijakan moneter seperti fluktuasi nilai kurs mata uang asing dan kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu dapat berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
- Kebijakan harga BBM akan mempengaruhi biaya operasional Perseroan yang diakibatkan oleh naik atau turunnya harga.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan perizinan untuk jasa-jasa yang diberikan Perseroan sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan.

G. PINJAMAN DAN FASILITAS PERBANKAN & SEWA GUNA

Berikut ini tabel utang bank dan utang pembiayaan konsumen Perseroan yang masih terutang per 30 Juni 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Bank dan Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	57.273
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
-Utang bank	52.111
-Utang pembiayaan konsumen	31.785
Jumlah	141.169
Utang Bank dan Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Panjang	
setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
-Utang bank	27.345
-Utang pembiayaan konsumen	29.395
Jumlah	56.740
Total Utang Bank dan Utang Pembiayaan Konsumen	197.909

Berikut ini tabel jadwal pembayaran kembali utang bank dan pembiayaan konsumen Perseroan yang masih terutang per 30 Juni 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Bank Jangka Pendek:	
2020	57.273
2021	52.111
Utang Bank Jangka Panjang:	
2022	22.807
2023	4.537
Jumlah	136.728



Keterangan	Jumlah
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Pendek	
2021	31.785
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Panjang	
2022	21.505
2023	7.890
Jumlah	61.180
JUMLAH	197.909

Manajemen menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam prospektus ini.

H. SEGMENT OPERASI

Perseroan memiliki 4 (empat) segmen operasi, yaitu jasa pertambangan, sewa truk dan alat berat, jasa konstruksi, dan lainnya. Berikut ini adalah informasi mengenai segmen operasi Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020 (Enam Bulan)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan usaha					
Pendapatan usaha segmen	95.168	52.565	-	7.749	155.482
Hasil segmen					
Laba kotor segmen	11.567	6.065	-	1.153	18.783
Laba (rugi) usaha	4.080	2.460	-	782	7.322
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(3.157)	(2.201)	-	89	(5.270)
Laba (rugi) sebelum pajak	923	259	-	871	2.053
Beban pajak-bersih	(2.121)	(1.172)	-	(173)	(3.466)
Beban komprehensif lain setelah pajak	(57)	(31)	-	(5)	(93)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(1.256)	(944)	-	694	(1.506)
Laporan Posisi Keuangan					
Aset					
Aset Segmen					558.788
Liabilitas					
Liabilitas Segmen					282.552

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan usaha					
Pendapatan usaha segmen	217.369	113.025	-	2.132	332.526
Hasil segmen					
Laba kotor segmen	37.766	19.603	-	430	57.799
Laba (rugi) usaha	21.957	10.343	-	231	32.531
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(5.553)	(7.606)	-	158	(13.001)



Keterangan	31 Desember 2019 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan
Laba (rugi) sebelum pajak	16.404	2.737	-	389	19.530
Beban pajak-bersih	(1.371)	(713)	-	(13)	(2.097)
Beban komprehensif lain setelah pajak	26	14	-	0	40
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	15.060	2.038	-	376	14.474

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Aset Segmen 580.579

Liabilitas

Liabilitas Segmen 302.083

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan usaha

Pendapatan usaha segmen 178.920 142.464 22.047 1.592 345.024

Hasil segmen

Laba kotor segmen 30.124 23.963 3.756 284 58.127

Laba (rugi) usaha

18.962 12.987 2.169 133 34.251

Pendapatan (beban) lain-lain bersih

(3.777) (2.165) - 135 (5.808)

laba (rugi) sebelum pajak

15.185 10.822 2.169 267 28.443

Beban pajak-bersih

(6.262) (4.986) - (56) (11.302)

Beban komprehensif lain setelah pajak

45 36 6 0 87

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif

8.969 5.872 2.174 212 17.228

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Aset Segmen 492.983

Liabilitas

Liabilitas Segmen 226.960

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan usaha

Pendapatan usaha segmen 177.025 77.369 46.651 902 301.947

Hasil segmen

Laba kotor segmen 25.692 11.034 6.890 152 43.768

Laba (rugi) usaha

13.794 4.591 1.249 152 19.786

Pendapatan (beban) lain-lain bersih

(10.282) (1.125) (1.400) - (12.807)

laba (rugi) sebelum pajak

3.512 3.466 (150) 152 6.979

Beban pajak-bersih

756 330 - 4 1.090

Beban komprehensif lain setelah pajak

(191) (84) (50) 0 (326)



Keterangan	31 Desember 2017 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	4.076	3.712	(201)	155	7.743

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Aset Segmen	439.074
-------------	---------

Liabilitas

Liabilitas Segmen	188.279
-------------------	---------

Berikut ini merupakan bahasan mengenai segmen operasi Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pendapatan Usaha				
Jasa Pertambangan	95.168	217.369	178.920	177.025
% terhadap total pendapatan usaha	61,21%	65,37%	51,86%	58,63%
Sewa Truk dan Alat Berat	52.565	113.025	142.464	77.369
% terhadap total pendapatan usaha	33,81%	33,99%	41,29%	25,62%
Jasa Kontruksi	-	-	22.047	46.651
% terhadap total pendapatan usaha	-	-	6,39%	15,45%
Lainnya	7.749	2.132	1.592	902
% terhadap total pendapatan usaha	4,98%	0,64%	0,46%	0,30%
Total Pendapatan Usaha	155.482	332.526	345.023	301.947
Laba Kotor				
Jasa Pertambangan	11.567	37.766	30.124	25.692
Sewa Truk dan Alat Berat	6.065	19.603	23.963	11.034
Jasa Kontruksi	-	-	3.756	6.890
Lainnya	1.153	430	284	152
Total Laba Kotor	18.785	57.799	58.127	43.768
Marjin Laba Kotor				
Jasa Pertambangan	12,15%	17,37%	16,84%	14,51%
Sewa Truk dan Alat Berat	11,54%	17,34%	16,82%	14,26%
Jasa Kontruksi	-	-	17,04%	14,77%
Lainnya	14,88%	20,17%	17,84%	16,85%

Pendapatan Usaha

Per 30 Juni 2020, pendapatan usaha Perseroan berasal dari 3 (tiga) segmen operasi, yang sebagian besar disumbang oleh pendapatan dari jasa pertambangan sebesar 61,21% atau Rp95.168 juta, diikuti oleh pendapatan dari sewa truk alat berat sebesar 33,81% atau Rp52.565 juta, dan pendapatan lainnya sebesar 4,98% atau Rp7.749 juta. Pada tahun 2019, pendapatan dari jasa pertambangan masih mengungguli kontribusi terhadap penjualan yaitu sebesar 65,37% atau Rp217.369 juta, diikuti oleh pendapatan dari sewa truk alat berat sebesar 33,99% atau Rp113.025 dan pendapatan lainnya sebesar 0,64% atau Rp2.132 juta. Sedangkan di tahun 2018 dan 2017 pendapatan usaha Perseroan berasal dari 4 (empat) segmen operasi, dimana pada tahun 2018 pendapatan dari jasa pertambangan memberikan kontribusi sebesar 51,86% atau Rp178.920 juta, diikuti oleh pendapatan dari sewa truk alat berat sebesar 41,29% atau sebesar Rp142.464 juta, pendapatan dari jasa kontruksi sebesar 6,39% atau Rp22.047 juta, dan pendapatan lainnya sebesar 0,46% atau Rp1.592 juta. Pada tahun 2017, pendapatan dari jasa pertambangan memberikan kontribusi 58,63% atau Rp177.025 juta, pendapatan dari sewa truk dan alat berat sebesar 25,62% atau sebesar Rp77.369 juta, pendapatan dari jasa kontruksi sebesar 15,45% atau Rp46.651 juta, dan pendapatan lainnya sebesar 0,30% atau sebesar Rp902 juta.

Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, jasa pertambangan membukukan marjin laba kotor yaitu sebesar 12,15% atau Rp11.567 juta per 30 Juni 2020, diikuti oleh unit bisnis sewa truk alat berat sebesar 11,54% atau Rp6.065 juta dan lainnya sebesar 14,88% atau 1.153



juta. Sementara marjin laba kotor tahun 2019 untuk jasa pertambangan sebesar 17,37% atau Rp37.766 juta dan diikuti oleh marjin unit bisnis sewa truk alat berat sebesar 17,34% atau Rp19.603 juta dan lainnya sebesar 20,17% atau Rp57.799 juta. Pada tahun 2018 marjin laba kotor dari jasa pertambangan sebesar 16,84% atau Rp30.124 juta, diikuti oleh marjin laba kotor sewa truk dan alat berat sebesar 16,82% atau Rp23.963 juta, marjin laba kotor jasa kontruksi sebesar 17,04% atau Rp3.756 juta dan marjin laba kotor lainnya sebesar 17,84% atau Rp284 juta. Pada tahun 2017 jasa pertambangan memiliki marjin laba kotor sebesar 14,51% atau Rp25.692 juta, marjin laba kotor sewa truk dan alat berat sebesar 14,26% atau Rp11.034 juta, marjin laba kotor jasa kontruksi sebesar 14,77% atau Rp6.890 juta dan marjin laba kotor lainnya sebesar 16,85% atau sebesar Rp152 juta.

I. MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas Perseroan terpengaruh berbagai risiko keuangan, diantaranya ialah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perseroan berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perseroan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas

Risiko Pasar

a. Risiko Mata Uang Asing

Perseroan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui

Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan atau aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga Perseroan timbul dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang seperti utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tetap.

Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Perseroan bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas dan setara kas termasuk piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat. Jika tidak terdapat peringkat independen, bagian pengendalian risiko menilai kualitas kredit pelanggan dengan mempertimbangkan posisi keuangan, pengalaman masa lampau dan faktor lainnya. Limit risiko individu ditentukan berdasarkan peringkat internal dan eksternal sesuai dengan batasan yang ditentukan Direksi. Penggunaan limit kredit diamati secara berkala.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam Pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan jangka pendek dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas.



VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Penurunan Harga Batubara

Risiko penurunan harga batubara timbul dari volatilitas harga di pasar internasional yang disebabkan penurunan permintaan. Penurunan harga batubara ini akan mengakibatkan turunnya profitabilitas pemilik tambang batubara, yang kemudian akan diikuti penurunan target produksi. Sebagai sebuah perusahaan yang melayani jasa penyewaan alat berat dan sejenisnya, penurunan target produksi tentunya akan berdampak signifikan pada penurunan permintaan atas penyewaan alat berat.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko Kehandalan Alat Berat dan Perubahan Teknologi

Perseroan bergerak dalam industri penyewaan alat berat dimana sangat membutuhkan kualitas dan kehandalan alat berat yang dapat mendukung segala aktivitas. Kinerja alat berat masa kini juga sangat ditentukan oleh teknologi yang dimilikinya, semakin tingginya teknologi yang ada dalam suatu alat maka juga dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk mengendarai dan melakukan perawatan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengendalikan risiko kehandalan dan teknologi alat akan berakibat pada turunnya produktivitas yang akan berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan. Hal ini juga dapat berakibat pada turunnya kemampuan Perseroan dalam menghadapi persaingan.

2. Risiko Sumber Daya Manusia ("SDM")

Industri pertambangan biasanya terletak di area geografis yang cukup sulit dan memiliki aturan yang ketat, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang memiliki disiplin tinggi untuk melakukan koordinasi dan pengaturan yang baik. Kurang terampilnya SDM dapat berakibat pada kecelakaan kerja dan kematian yang berisiko terhadap reputasi dari Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan pasar dalam penyewaan alat berat di area pertambangan batubara merupakan hal yang cukup kompetitif. Dengan berbagai pesaing dari perusahaan besar yang juga beroperasi di daerah yang sama, hal ini tentunya akan membuat persaingan semakin kompetitif.

4. Risiko Investasi Atau Aksi Korporasi

Investasi atau aksi korporasi Perseroan dapat mendukung keperluan Perseroan untuk memperluas lingkup bisnis namun risiko dapat timbul apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya. Dengan sendirinya risiko ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan apabila tidak dikaji dengan cermat.



5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Dan Pasokan Bahan Baku

Kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku operasional berupa peralatan, bahan bakar, dan logistik dapat diakibatkan oleh hambatan akses menuju lokasi operasional perseroan. Tertundanya penyediaan sumber daya dan pasokan bahan baku dapat menghambat operasional Perseroan yang berpotensi menghasilkan kerugian material terhadap kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek Perseroan.

6. Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Yang Berlaku Dalam Industri

Perseroan diwajibkan untuk mengikuti peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal sebagai jasa pertambangan. Perseroan harus memiliki izin tertentu dan mematuhi regulasi terkait kegiatan usaha tersebut. Apabila Perseroan tidak mampu memiliki izin dan mematuhi semua regulasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah terkait jasa pertambangan, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Sehingga, apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha, hal tersebut akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan, reputasi, kegiatan operasional, beserta sanksi perdata, termasuk denda, serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia maupun negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari adanya fluktuasi nilai tukar. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan oleh para pemilik tambang batubara dan komoditas lainnya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi permintaan atas penyewaan alat berat yang ditawarkan oleh Perseroan.

3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal.

4. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- a) Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- b) Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- c) Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

5. Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi penyewaan alat berat. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.



6. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.



Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTOR RISIKO BISNIS MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TERSEBUT TERHADAP OPERASIONAL KUNCI DARI USAHA PERSEROAN DAN KONDISI KEUANGAN.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali tanggal 8 Februari 2021 atas laporan keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat dari OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 November 2020 pada Bab IV Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim

Berikut ini merupakan informasi terkait laporan keuangan interim Perseroan per tanggal 30 November 2020 jika dibandingkan dengan jumlah yang dicantumkan dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2020, kecuali:

- Saldo aset pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit) mengalami penurunan bersih sebesar Rp19.115.665.219 dibandingkan dengan saldo aset pada tanggal 30 Juni 2020 yang sebesar Rp558.788.259.008. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga dan uang muka serta penurunan aset tetap masing-masing sebesar Rp15.746.771.877, Rp3.951.339.901 dan (Rp39.180.319.601).
- Saldo liabilitas pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit) mengalami penurunan bersih sebesar Rp15.136.143.721 dibandingkan dengan saldo liabilitas pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp282.552.492.859, yang terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha serta penurunan utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka Panjang masing-masing sebesar Rp11.417.120.474, (Rp4.192.976.881), (Rp15.312.160.133) dan (Rp7.139.814.431).
- Saldo ekuitas pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit) mengalami penurunan sebesar Rp3.979.521.498 dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 yang sebesar Rp276.235.766.149, yang terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih, beban pokok penjualan dan beban usaha serta penurunan pendapatan lain-lain masing-masing sebesar Rp115.444.149.816, Rp109.681.451.313, Rp8.105.489.181, dan (Rp1.951.339.890).



Halaman ini sengaja dikosongkan



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Ulima Nitra sesuai dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 25 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("Menkeh") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2811.HT.01.01.th.93 tertanggal 5 Mei 1993 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 dibawah agenda No. 37./1993/PT. Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No. 10/2020.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham pada saat Pendirian

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	11.000	1.100.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	3.000	300.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	3.000	300.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	1.000	100.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	1.000	100.000.000	5,00
6. Ny. Merty Tjokro	1.000	100.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.000	500.000.000	

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar yang berlaku adalah sebagaimana yang tertuang dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 213 tanggal 24 Juni 2008 ("**Akta 213/2008**"), dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang, telah dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta 213/2008 telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat No. AHU-44469.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063019.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008.
2. Akta Risalah Rapat PT Ulima Nitra No. 43 tanggal 18 Februari 2019 ("**Akta 43/2019**") yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0012585.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 08 Maret 2019 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038456.AH.01.11 Tahun 2019 tertanggal 08 Maret 2019.
3. Akta Risalah Rapat PT Ulima Nitra No. 49 tanggal 14 Agustus 2019 ("**Akta 49/2019**") yang dibuat di hadapan Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0057182.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 24 Agustus 2019 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147768.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2019.
4. Akta Risalah Rapat No. 10 tertanggal 2 September 2020 ("**Akta 10/2020**") yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0066428.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391211 tertanggal 25 September 2020, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391212 tertanggal 25 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161673.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020.

Perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta 10/2020 telah memperoleh persetujuan dan diratifikasi oleh (i) Bank DBS berdasarkan Surat Bank DBS No. 131/IBG-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan (ii) Bank BCA berdasarkan surat Bank BCA No. 133/SBK/VI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 (iii) Bank Mandiri berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM1.PLB/SPPK/387/2020 tanggal 30 September 2020 dan (ii) Bank Permata berdasarkan surat Bank Permata No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembatasan terkait perubahan anggaran dasar terkait susunan pemegang saham sebagaimana diatur berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit, telah dicabut oleh (i) Bank DBS berdasarkan Surat Bank DBS dan (ii) Bank BCA berdasarkan surat Bank BCA No. No. 133/SBK/VI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 (iii) Bank Mandiri



berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM1.PLB/SPPK/387/2020 tanggal 30 September 2020 dan (ii) Bank Permata berdasarkan surat Bank Permata No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah; Konstruksi; Pengangkutan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dapat bertindak baik sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan. Demi menjaga kualitas dan mutu layanan yang diberikan kepada setiap pelanggan serta tetap memperhatikan keselamatan karyawan, Perseroan telah tersertifikasi ISO 9001:2015, sertifikasi OHSAS 18001:2007 dan sertifikasi SMK3. Saat ini kegiatan usaha Perseroan terpusat pada tambang batubara yang berada di wilayah Sumatera Selatan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
2. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
3. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; dan
4. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Pertambangan Batu Bara;
2. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya;
3. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
4. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
5. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya;
6. Konstruksi Gedung Lainnya;
7. Konstruksi Jalan Raya;
8. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
9. Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas;
10. Penyiapan Lahan;
11. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;
12. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;
13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; dan
14. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.

Namun sampai dengan saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan yaitu sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dilakukannya perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta 10/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 213/2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	27.500	2.750.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	7.500	750.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	7.500	750.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	2.500	250.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	2.500	250.000.000	5,00
6. Ny. Merty Tjokro	2.500	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	



2. Dalam tiga tahun terakhir Perseroan melakukan perubahan pemegang saham dan/atau struktur permodalan adalah berdasarkan Akta 10/2020, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas beberapa hal sebagai berikut:
- Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula nilai nominal saham sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp2,- (dua Rupiah);
 - Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.10/2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00
6. Ny. Merty Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000	

Dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

C. DOKUMEN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Perizinan dan Persetujuan Operasional

a) Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP")

Perseroan telah memperoleh IUJP No. 51/1/IUJP/2017 pada tanggal 1 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang.

- Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib mengutamakan produk dalam negeri.
- Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya.
- Mengutamakan tenaga kerja lokal.
- Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya.
- Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- Melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya.
- Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
- Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan triwulan dan tahunan kepada pemberi Izin Usaha Jasa Pertambangan.
- Memiliki penanggung jawab operasional di lapangan.
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan

b) Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")

Perseroan telah memperoleh SIUP Besar No. 511.3/SIUP/0706/DPMPSTP-PPK/2018 pada tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah Kota Palembang berlaku sampai dengan 3 Juli 2023.



Berdasarkan SIUP Besar ini, Perseroan berhak melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya adalah Jasa Penyewaan Alat serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap enam bulan.

Selama SIUP ini masih berlaku maka Perseroan wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP. Perseroan juga dilarang untuk melakukan:

- (a) Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP;
- (b) Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- (c) Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir i dan ii) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan sendiri.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan SIUP Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP. Peringatan tertulis diberikan paling banyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu dua minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

2. Perizinan dan Persetujuan Umum

a) Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perseroan telah memperoleh NIB No. 9120205352289 pada tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b) Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

Perseroan telah memperoleh NPWP dengan No. 01.574.771.0-308.000 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00005/WPJ.03/KP.0803/2009 pada tanggal 14 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Palembang dan Surat Keterangan Terdaftar No. S-201SKT/WPJ.03/KP.0803/2018 pada tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Palembang.

c) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")

Perseroan telah memperoleh SPKP No. PEM-00225/WPJ.03/KP.0803/2007 Tanggal 14 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Palembang dan SPKP No. S-166PKP/WPJ.03/KP.0803/2018 tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Palembang.

D. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK BERELASI

1. Transaksi Pihak Berelasi

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>					
Utang Usaha					
RM Sederhana Muara Enim	530	482	318	393	183
Toko Unit Diesel Utama	1.136	952	565	312	485
Jumlah Utang Usaha dengan Pihak Berelasi	1.666	1.434	883	705	669
Pembelian					
Toko Unit Diesel Utama	1.155	1.342	2.704	1.518	988
RM Sederhana Muara Enim	1.076	1.093	2.111	2.491	2.354
Jumlah Pembelian dengan Pihak Berelasi	2.231	2.435	4.815	4.009	3.342
Beban Umum dan Administrasi					
Mertje Tjokro	112	100	200	200	200
Burhan Tjokro	100	-	-	-	-
Jumlah Beban Umum dan Administrasi dengan Pihak Berelasi	212	100	200	200	200

Pada tahun 2020, Perseroan membeli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Karya Baru, Palembang, dengan luas keseluruhan sebesar 14.281 m² dan 2 (dua) bidang yang terletak di Jl. HBR Motik, Karya Baru, Palembang, dengan luas keseluruhan sebesar 13.014 m² dari Burhan Tjokro dan Ulung Wijaya. Transaksi tersebut telah diselesaikan pada tahun 2020.



2. Perjanjian Penting dengan Pihak Berelasi

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku
1.	Perjanjian Sewa tanggal 21 Desember 2020 ("Perjanjian"), yang dibuat oleh dan antara Merte Tjokro ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua").	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021	Pihak pertama menyewakan bangunan bertingkat empat lantai yang terletak di Jl. Betet No. 28 RT22, Kelurahan 9 Illir, Palembang kepada Pihak Kedua	Hukum Negara Republik Indonesia

3. Hubungan Afiliasi Perseroan dengan Pihak Berelasi

- Merte Tjokro adalah komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.
- Burhan Tjokro dan Ulung Wijaya adalah direksi dan pemegang saham Perseroan.
- RM Sederhana Muara Enim dan Toko Unit Diesel Utama adalah perusahaan dengan kesamaan manajemen dengan Perseroan.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (atau tidak merugikan Perseroan) dan akan berlanjut setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak Afiliasi akan tunduk pada ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan pihak Afiliasi akan dilakukan secara wajar.

E. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
1.	Persetujuan Membuka Kredit No. 063/021/KRD/PLG/2001 tanggal 23 Maret 2001 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 3 November 2020, yang dibuat di hadapan Isnie Agustina Mahardika, Notaris di Palembang jo. Surat BCA No. 1221/SPPK/PLG/2020 tanggal 7 Oktober 2020.	(a) PT Bank Central Asia Tbk ("Bank"); dan (b) PT Ulima Nitra ("Debitur")	lihat pada deskripsi masing-masing fasilitas kredit	Objek Perjanjian dan Jangka Waktu Debitur telah memperoleh fasilitas dari Bank yang terdiri dari: - fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp13.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 12 Desember 2021; - fasilitas Time Loan Revolving II, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp13.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 12 Desember 2021; - fasilitas Bank Garansi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.000.000.000 dengan ketentuan Debitur dapat menggunakan fasilitas tersebut dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sampai jumlah USD600,000 yang akan berlaku sampai dengan 12 Desember 2021; - fasilitas Kredit Investasi XV, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp50.000.000.000 (telah berakhir); - fasilitas Kredit Investasi XVI, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp50.000.000.000 (telah berakhir); - fasilitas Kredit Investasi XVII, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp60.000.000.000 (telah berakhir); - fasilitas Kredit Investasi XVIII, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp25.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 31 Maret 2021; - fasilitas Kredit Investasi XIX, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 31 Maret 2021; - fasilitas Time Loan by Project, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp30.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				Agunan Kredit: (a) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10/Karya Jaya, seluas 10.265 m2, sertifikat tanggal 2 September 1994 tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (b) Sebidang tanah Hak Milik No. 555/Paya Kabung, seluas 16.380 m2, sertifikat tanggal 26 Februari 1994, tertulis atas nama Tuan BURHAN; (c) Sebidang tanah Hak Milik No. 400/Cambai, seluas 6.225 m2, sertifikat tanggal 17 September 1992, tertulis atas nama Tuan TJOKRO RIDUAN; (d) Sebidang tanah Hak Milik No. 580/T/15 Ilir, seluas 107 m2, sertifikat tertanggal 17 Oktober 1980), tertulis atas nama Nyonya YATI SUMINAH; (e) Sebidang tanah Hak Milik No. 566/17 Ilir, seluas 96 m2, sertifikat tertanggal 27 Februari 1976), tertulis atas nama Nyonya YATI SIMINA; (f) Sebidang tanah Hak Milik No. 624/17 Ilir, seluas 148 m2, sertifikat tertanggal 13 Desember 1976, tertulis atas nama Ny. JATI SIMINA; (g) Sebidang tanah Hak Milik No. 132/Karya Jaya, seluas 74 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002 No. 54/Karya Jaya/2002; (h) Sebidang tanah Hak Milik No. 133/Karya Jaya, seluas 74 m2, (tujuh puluh empat meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002) No. 54/Karya Jaya/2002; (i) Sebidang tanah Hak Milik No. 134/Karya Jaya, seluas 74 m2 (tujuh puluh empat meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002) No. 55/Karya Jaya/2002; (j) Sebidang tanah Hak Milik No. 135/Karya Jaya, seluas 74 m2 (tujuh puluh empat meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002) No. 56/Karya Jaya/2002; (k) Sebidang tanah Hak Milik No. 136/Karya Jaya, seluas 74 m2 (tujuh puluh empat meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002) No. 57/Karya Jaya/2002; Agunan pada nomor 6 sampai dengan nomor 11 kelimanya tertulis atas nama ULUNG WIJAYA, sertifikat-sertifikat tanggal 17 September 2002 letaknya di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Kertapati, Kelurahan Karya Jaya, demikian berikut bangunan yang berdiri dan segala sesuatu yang sekarang atau kelak didirikan, ditempatkan atau ditanamkan karena sifat maupun peruntukannya atau karena menurut undang-undang dinyatakan sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Jalan Sriwijaya Raya; (l) a) Piutang dari PT Tambang Batubara Bukit Asam, b) Piutang dari Medco E&P, PT., dan c) Piutang dari Conoco Philips Ltd. Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Outstanding Invoices per tanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh PT Ulima Nitra;



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				(m) Sebidang tanah Hak Milik No. 562/R/9 Ilir, seluas 431 m2, sertifikat tanggal 4 Desember 1980, tertulis atas nama penghadap Nyonya YATI SUMINA; (n) Sebidang tanah Hak Milik No. 563/R/9 Ilir, seluas 572 m2, sertifikat tanggal 4 Desember 1980 tertulis atas nama penghadap Nyonya YATI SUMINAH; (o) Sebidang tanah Hak Milik No. 680/9 Ilir, seluas 426 m2, sertifikat tanggal 10 Mei 1982 tertulis atas nama penghadap JATI SIMINA; (p) Sebidang tanah Hak Milik No. 36/9 Ilir, seluas 398 m2, sertifikat tanggal 5 Mei 1973 tertulis atas nama penghadap JATI SIMINA; Agunan pada nomor 13, 14, 15 dan 16 di atas digunakan juga untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang oleh PT Ulima Basilio No. rekening 021-287728-8 kepada BCA; (q) Satu unit Volvo Crawler Excavator Model EC480DL, Serial Number 273336, Engine Number 484768, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (r) Satu unit Volvo Crawler Excavator Model EC480DL, Serial Number 273617, Engine Number 522749, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (s) Satu unit Volvo Hydraulic Excavator Model EC480DL, Serial Number 273734, Engine Number 537837, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (t) Satu unit Volvo Crawler Excavator 48T Standar, Model EC480DL, Serial Number 273735, Engine Number 524054, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (u) Dua unit Komatsu Bulldozer D85E-SS-2, Serial Number J17611 dan J17609, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (v) Satu unit Caterpillar Track Type Tractors D8R-RY/CAB/SU-SG TILT/SSR/560 TRAP/PL121, Serial Number T5X00549 (Brand New), tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (w) Satu unit Dump Truck Iveco Trakker AD380T38H (6x4) Scow End, Serial Number WJME3TRS4FC321005, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (x) Satu unit Dump Truck Iveco Trakker AD380T38H (6x4) Scow End, Serial Number WJME3TRS4FC320697, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (y) Satu unit Dump Truck Iveco Trakker AD380T38H (6x4) Scow End, Serial Number WJME3TRS4FC321270, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (z) Satu unit Dump Truck Iveco Trakker AD380T38H (6x4) Scow End, Serial WJME3TRS4FC318001, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (aa) Satu unit Volvo Hydraulic Excavator Model EC210B Prime, Serial Number 00084226, Engine Number 11758322, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (bb) Satu unit Volvo Hydraulic Excavator Model EC 480DL, Serial Number 274441, Engine Number 651208, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (cc) Dua unit Caterpillar Off-Highway Truck 773E/DS-BODY w/EXT/TPM/BSS TIRE dan Accessories /Auto Fire



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				Suppression dan Accessories /Autolube/773D, Serial Number ASK01493 dan ASK01498, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(dd) Empat unit Scania Dump Truck 6x4 360 HI Cap 17M3, Model P360CB-6x4, Serial Number YS2P6X400H5454288, YS2P6X400H5454292, YS2P6X400H5454296, YS2P6X400H5454397, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ee) Satu unit UD Truck C&C 6x4 Quester 4300, Model CWE28064R, Serial Number MHHCWZ30GHK801211, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ff) Dua unit kendaraan bermotor merek Hino FM-260 JD, tahun pembuatan 2017, warna Hijau, No. Rangka MJEFM8JN1HJE 17318, MJEFM8JN1HJE 17319, No. Mesin J08EUFJ 86208, J08EUFJ 86209, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				Berikut tambahan satu unit Water Tank, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				dan satu unit Vacuum Tank, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(gg) Satu unit kendaraan bermotor merek Hino FM 260 JW, tahun pembuatan 2017, warna Hijau, No. Rangka MJEFM8JW1HJE 11251, No. Mesin J08EUFJ 83579, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(hh) Satu unit Volvo Excavator EC480DL, Serial Number 274617, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ii) Delapan unit UD Truck Dump Vessel CWE28064R/S24, Serial Number MHHCWZ30GHK801252, MHHCWZ30GHK801253, MHHCWZ30GHK801261, MHHCWZ30GHK801276, MHHCWZ30GHK801277, MHHCWZ30GHK801254, MHHCWZ30GHK801255, MHHCWZ30GHK801256, tertulis atas nam PT Ulima Nitra;
				(jj) Satu unit Volvo Excavator EC480DL, Serial Number 274670, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(kk) Satu unit Volvo Excavator EC480DL, Serial Number 274717, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ll) Delapan unit UD Truck Dump Vessel CWE28064R, Serial Number MHHCWZ30GHK801918, MHHCWZ30GHK802233, MHHCWZ30GHK802234, MHHCWZ30GHK802235, MHHCWZ30GHK802236, MHHCWZ30GHK802237, MHHCWZ30GHK802697, MHHCWZ30GHK802698, tertulis atas nam PT Ulima Nitra;
				(mm) Dua unit Volvo Excavator EC750DL, Serial Number 280160 dan 280163, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(nn) Satu unit Komatsu Hydraulic Excavator PC850-8RR1, Serial Number 70199, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(oo) Satu unit Komatsu Motor Grader Model GD705-5, Serial Number 26358, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(pp) Dua unit Komatsu Dump Truck Model HD4657, Serial Number J20669 dan J20670, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				(qq) Empat unit Komatsu Dump Truck Model HD465-7, Serial Number 16551, 16564, 16563 dan 16561, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(rr) Satu Unit Komatsu Bulldozer Model D65P-12, Serial Number 65978, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ss) Satu unit Komatsu Bulldozer Model D155A-6, Serial Number 87633, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(tt) Satu unit Komatsu Bulldozer Model D65P 12, Serial Number 65981, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(uu) Tiga unit Komatsu Bulldozer D85E-SS-2, Serial Number J18435, J18436, J18601, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(vv) Satu unit Komatsu Bulldozer D85E-SS-2, Serial Number J18434, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ww) Satu unit Komatsu Hydraulic Excavator PC300SE-8M0, Serial Number C90890, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(xx) Dua unit Komatsu Hydraulic Excavator PC400LCSE-8, Serial Number J31316 dan J31317, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(yy) Dua unit Komatsu Hydraulic Excavator PC400LCSE-8, Serial Number J31309 dan J31310, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(zz) Satu unit Komatsu Hydraulic Excavator PC300SE-8M0, Serial Number C90889, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; dan Satu unit Komatsu Buldozer D85E-SS-2, Serial Number J18739, tertulis atas nama PT Ulima Nitra.

Persyaratan atau pembatasan

Perseroan wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari BCA (kecuali ditentukan lain) apabila akan:

- memperoleh pinjaman uang/kredit dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau menggunakan harta kekayaan debitor kepada pihak lain;
- meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- apabila debitor berbentuk badan (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, (ii) mengubah status kelembagaan;
- setiap penambahan utang baik dari bank maupun lembaga keuangan non bank (i) jika jumlah plafonnya tidak melebihi Rp5.000.000.000 maka cukup memberitahukan secara tertulis kepada BCA 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani, (ii) jika plafonnya melebihi Rp5.000.000.000 maka penambahan hutang harus dengan persetujuan tertulis dari BCA;
- selama terdapat fasilitas dari BCA, maka debitor harus memperoleh persetujuan dari BCA sebelumnya jika terdapat (i) perubahan susunan pengurus/pemegang saham (ii) pembagian dividen lebih besar dari 30% dari laba tahun berjalan;

Berdasarkan surat Bank BCA No. 133/SBK/VI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf (e)



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				diubah menjadi debitur harus memberitahukan kepada Bank BCA, maksimal 5 hari kerja jika terdapat (i) perubahan susunan pengurus (ii) pembagian dividen lebih besar dari 30% dari laba tahun berjalan.
2.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivables Financing – 1 No. 13 tanggal 8 November 2019, yang dibuat di hadapan Juhaidi, SH, Notaris di Palembang sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Addendum ke-2 Perjanjian <i>receivables Financing-1</i> Akta No. 13 tanggal 8 November 2019 tertanggal 11 Desember 2020	(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“ Bank ”); dan (b) PT Ulima Nitra (“ Debitur ”)	14 Desember 2020 sampai dengan 13 April 2021	Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur dengan limit sebesar Rp31.000.000.000. Nilai pengambilalihan sebesar 100% dari nilai invoice per transaksi dan tidak melebihi kelonggaran tarik. Maksimal penarikan Fasilitas Account Receivable Financing 1 dan Bank Garansi yaitu sebesar Rp31.000.000.000 (<i>switchable limit</i>). Fasilitas Kredit tersebut dalam Perjanjian bersifat <i>Uncommitted</i> dan <i>Revolving</i>, sehingga dalam hal Debitur telah membayar Baki Debet Pokok atau sebagian dari padanya, maka jumlah yang sudah dibayar tersebut dapat digunakan/ dipinjam lagi oleh Debitur. Perjanjian dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank kepada Debitur yang digunakan untuk tujuan percepatan penerimaan dana hasil pekerjaan jasa penambangan kepada PT Banyan Koalindo Lestari. Agunan: (a) Agunan Non Fixed Asset: Piutang Usaha kepada pihak ketiga sebagaimana ternyata dari Daftar Piutang PT Ulima Nitra tanggal 09 Desember 2013 yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 tanggal 9 Desember 2013 dan telah didaftarkan pada Menkumham dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00084179.AH.05.02 tahun 2014 tanggal 21 April 2014 sebesar Rp35.000.000.000 dan akan ditingkatkan menjadi sebesar Rp84.000.000.000 berdasarkan vide Surat Order CRO.PLG/5342/2019 tanggal 29 Oktober 2019. Sehingga pengikatan Non Fixed Asset sebesar Rp84.000.000.000 dengan Akta Jaminan Fidusia No. 15 tertanggal hari ini yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga diperolehnya Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai ketentuan undang-undang tentang Jaminan Fidusia. (b) Agunan Fixed Asset: i. Tanah dan Bangunan dengan Bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Milik No. 339/Desa- Lembak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 18 Juni 2006 Nomor 61/LEMBAK/2006, seluas 12.166 m2, tercatat atas nama Burhan 35%, Ulung Wijaya 35%, Mertje Tjokro 10%, Tuti Nuarni 10%, dan Mertje Tjokro 10%, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.06.08.63.00121. Yang terletak di: - Provinsi : Sumatera Selatan. - Kabupaten : Muara Enim. - Kecamatan : Lembak. - Desa : Lembak. - Jalan : Raya Prabumulih Palembang Km. 14.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				Yang telah diikat Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut: 1. Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 192/2007 tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000.000; 2. Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) Nomor 100/2012 tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp1.000.000.000; 3. Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) Nomor 606/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000.000. Sehingga total pengikatan Sertifikat tersebut di atas sebesar Rp11.000.000.000. ii. Tanah dan bangunan dengan Bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 235/Kel. Karang Raja, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 02 September 2016, Nomor 478/Karang Raja/2016, seluas 4.297 m2 tercatat atas nama PT Ulima Nitra, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.06.06.03.00859 yang tanggal berakhirnya hak sampai dengan tanggal 01 Mei 2042. Yang terletak di : - Provinsi : Sumatera Selatan. - Kabupaten : Muara Enim. - Kecamatan : Muara Enim. - Kelurahan : Karang Raja. - Jalan : Lintas Tengah Sumatera Nomor 101-103 Dusun I. Yang akan diikat dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp2.567.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Berdasarkan vide Surat Order CRO.PLG/5342/2019 tanggal 29 Oktober 2019. Sehingga total pengikatan Agunan Fixed Asset sebesar Rp13.567.000.000. Agunan ini menjamin pula secara joint cross collateral dan cross default atas fasilitas kredit lain yang telah diberikan oleh Bank kepada Debitur, yaitu: (a) Perjanjian Non Cash Loan No. CRO.PLG/0004/NCL/2011, tertanggal 14 Desember 2011, yang dibuat oleh dan ditandatangani secara bawah tangan yang terakhir diperbarui dengan Adendum ke-8 tanggal 08 November 2019 dengan limit kredit sebesar Rp25.000.000.000 berikut dengan adendum-adendumnya, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran lampirannya. (b) Perjanjian Fasilitas Receivables Financing 2 No. CRO.PLG/002/PK-RF/2019 dan Akta No. 14 tanggal 8 November 2019 dengan limit sebesar Rp28.000.000.000, dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2021 berikut dengan adendum-adendumnya, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran-lampirannya.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				Perjanjian Kredit yang dibuat atas nama Debitur dengan Bank yang akan ada dikemudian hari, berikut dengan semua perubahan, penambahan, perpanjangan, dan pembaharuan, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran-lampirannya sehingga dengan demikian objek Agunan tersebut saling terkait satu sama lain (<i>joint collateral</i>). Persyaratan atau pembatasan Hal-hal memerlukan persetujuan tertulis bank: (b) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas. (c) Memindah-tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk keperluan operasional. (d) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk proyek/kontrak/SPK yang telah mendapat pembiayaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (e) Menginginkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. (f) Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha. (g) Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran praktik bisnis. Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal: (a) Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, modal dasar, susunan pengurus, nama dan status perusahaan. (b) Melakukan pembagian deviden. Selambat-lambatnya diterima Bank 30 hari setelah tanggal persetujuan RUPS untuk pelaksanaan hal tersebut, serta 30 hari setelah pelaksanaan pembagian deviden. Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib menyerahkan copy Akta Risalah RUPS dan pelaporan/persetujuan Menkumham terkait perubahan Anggaran Dasar paling lambat 30 hari sejak tanggal RUPS.
3.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivables Financing – 2 No. 14 tanggal 8 November 2019, yang dibuat di hadapan Juhaidi, SH, Notaris di Palembang sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Addendum ke-2 Perjanjian <i>Receivables Financing-2</i> tertanggal 11 Desember 2020	(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank "); dan (b) PT Ulima Nitra (" Debitur ")	14 Desember 2020 sampai dengan 13 April 2021	Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur dengan limit sebesar Rp28.000.000.000. Nilai pengambilalihan sebesar 100% dari nilai invoice per transaksi dan tidak melebihi kelonggaran tarik. Fasilitas A/R Financing ditujukan untuk percepatan penerimaan dana hasil pekerjaan jasa penambangan kepada PT Banyan Koalindo Lestari. Agunan: (a) Agunan Non Fixed Asset: - Piutang Usaha kepada pihak ketiga sebagaimana ternyata dari Daftar Piutang PT Ulima Nitra tanggal 09 Desember 2013 yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 tanggal 9 Desember 2013 dan telah didaftarkan pada Menkumham dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00084179.AH.05.02 tahun 2014 tanggal 21 April 2014 sebesar Rp35.000.000.000 dan akan



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				ditingkatkan menjadi sebesar Rp84.000.000.000 berdasarkan vide Surat Order CRO.PLG/5342/2019 tanggal 29 Oktober 2019. Sehingga pengikatan Non Fixed Asset sebesar Rp84.000.000.000 dengan Akta Jaminan Fidusia No. 15 tertanggal hari ini yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga diperolehnya Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai ketentuan undang-undang tentang Jaminan Fidusia. (b) Agunan Fixed Asset: i. Tanah dan Bangunan dengan Bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Milik No. 339/Desa- Lembak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 18 Juni 2006 Nomor 61/LEMBAK/2006, seluas 12.166 m2, tercatat atas nama Burhan 35%, Ulung Wijaya 35%, Mertje Tjokro 10%, Tuti Nuarni 10%, dan Mertj Tjokro 10%, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.06.08.63.00121. Yang terletak di: - Provinsi : Sumatera Selatan. - Kabupaten : Muara Enim. - Kecamatan : Lembak. - Desa : Lembak. - Jalan : Raya Prabumulih Palembang Km. 14. Yang telah diikat Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut: 1. Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 192/2007 tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000.000; 2. Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) Nomor 100/2012 tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp1.000.000.000; 3. Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) Nomor 606/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000.000. Sehingga total pengikatan Sertifikat tersebut di atas sebesar Rp11.000.000.000. ii. Tanah dan bangunan dengan Bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 235/Kel. Karang Raja, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 02 September 2016, Nomor 478/Karang Raja/2016, seluas 4.297 m2 tercatat atas nama PT Ulima Nitra, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.06.06.03.00859 yang tanggal berakhirnya hak sampai dengan tanggal 01 Mei 2042. Yang terletak di : - Provinsi : Sumatera Selatan. - Kabupaten : Muara Enim. - Kecamatan : Muara Enim. - Kelurahan : Karang Raja.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				- Jalan : Lintas Tengah Sumatera Nomor 101-103 Dusun I. Yang akan diikat dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp2.567.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Berdasarkan vide Surat Order CRO.PLG/5342/2019 tanggal 29 Oktober 2019. Sehingga total pengikatan Agunan Fixed Asset sebesar Rp13.567.000.000. Agunan ini menjamin pula secara joint cross collateral dan cross default atas fasilitas kredit lain yang telah diberikan oleh Bank kepada Debitur, yaitu: (a) Perjanjian Non Cash Loan No. CRO.PLG/0004/NCL/2011, tertanggal 14 Desember 2011, yang dibuat oleh dan ditandatangani secara bawah tangan yang terakhir diperbarui dengan Adendum ke-8 tanggal 08 November 2019 dengan limit kredit sebesar Rp25.000.000.000 berikut dengan adendum-adendurnya, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran lampirannya. (b) Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivables Financing-1 Nomor CRO.PLG/001/PK-RF/2019, dan Akta No. 13 tertanggal 8 November 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum ke-2 tanggal 11 Desember 2020, dengan limit sebesar Rp31.000.000.000 dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2021. Perjanjian Kredit yang dibuat atas nama Debitur dengan Bank yang akan ada dikemudian hari, berikut dengan semua perubahan, penambahan, perpanjangan, dan pembaharuan, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran-lampirannya sehingga dengan demikian objek Agunan tersebut saling terkait satu sama lain (<i>joint collateral</i>). Persyaratan atau pembatasan Hal-hal memerlukan persetujuan tertulis bank: (a) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas. (b) Memindah-tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk keperluan operasional. (c) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk proyek/kontrak/SPK yang telah mendapat pembiayaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (d) Menginginkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. (e) Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha. (f) Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajiban praktik bisnis. Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal:



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				(a) Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, modal dasar, susunan pengurus, nama dan status perusahaan. (b) Melakukan pembagian deviden. Selambat-lambatnya diterima Bank 30 hari setelah tanggal persetujuan RUPS untuk pelaksanaan hal tersebut, serta 30 hari setelah pelaksanaan pembagian deviden. Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib menyerahkan copy Akta Risalah RUPS dan pelaporan/persetujuan Menkumham terkait perubahan Anggaran Dasar paling lambat 30 hari sejak tanggal RUPS.
4.	Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 97 tanggal 25 September 2014, yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, SH, Notaris di Palembang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ketujuh atas Fasilitas Perbankan No. 347/PFPA-DBSI/III/3-4/2019	(a) PT Bank DBS Indonesia ("Bank"); dan (b) PT Ulima Nitra ("Nasabah")	Sampai dengan 25 Juni 2021.	Bank dengan ini setuju untuk memberikan kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima dari Bank fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted Revolving Credit Facility (RCF) ("Fasilitas Perbankan") dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp9.500.000.000. Jaminan: Agunan yang diberikan adalah tanah yang berada di Jalan Soekarno Hatta, RT005/RW024, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami Palembang, SHM No. 5338 dan SHM No. 1939 terdaftar atas nama Burhan yang telah dipasang Hak Tanggungan ("HT") sebagai berikut: HT 1 : Rp5.046.000.000 HT 2 : Rp1.261.500.000 HT 3 : Rp1.200.000.000 Persyaratan atau pembatasan Nasabah memerlukan persetujuan Bank dalam hal: (a) perubahan material yang merugikan kondisi keuangan, kekayaan atau kegiatan usaha Nasabah sampai dengan ditandatangani dokumen fasilitas perbankan oleh Nasabah; (b) Perubahan anggaran dasar Nasabah dan segala perubahannya; (c) Perubahan susunan pemegang saham; (d) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; (e) Pengikatan hutang/kewajiban kepada pihak lain; (f) pembebanan atau penjaminan atas seluruh atau sebagian kekayaan Perseroan. Berdasarkan Surat Bank DBS No. 131/IBG-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 merubah butir (c) di atas menjadi Nasabah dilarang melakukan perubahan pemegang saham nasabah apabila perubahan tersebut terhadap lebih dari 30% jumlah saham dengan hak suara sah atau persentase lainnya yang berakibat kepada berubahnya pengendalian atas Nasabah. Selanjutnya, telah dilakukan perubahan lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kredit antara Bank DBS dengan Perseroan berdasarkan Surat Bank DBS No. 011/IBG-PLG/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang mana mengubah ketentuan perubahan anggaran dasar menjadi "Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank DBS selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender atau



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, apabila Nasabah mengetahui terjadinya atau potensi terjadinya hal-hal sebagai berikut: perubahan terhadap anggaran dasar nasabah termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan, dan/atau pengurus nasabah dan nasabah wajib menjaga dan mempertahankan pada setiap saat kontrol pengendali atas nasabah pada keluarga Jati Simina.
5.	Akta Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik (IMBT) No. 114 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, Notaris di Palembang jo. Surat PT Bank Permata Tbk No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020.	(a) PT Bank Permata ("Bank"); dan (b) PT Ulima Nitra ("Nasabah")	36 bulan, terhitung sejak tanggal pembukaan Fasilitas	Bank dan Nasabah telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran, Al-Sunnah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia. Bank menyediakan dana untuk Fasilitas dengan Plafon Fasilitas maksimal sebesar Rp20.000.000.000. Persyaratan atau pembatasan Nasabah wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, yaitu: (a) Bertindak sebagai Penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. (b) Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari. (c) Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas Jaminan. (d) Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada/dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari. (e) Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank. (f) Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terutang kepada Bank. (g) Khusus untuk Nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut: i. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha (merger dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya. ii. Mengubah, susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN). iii. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apa pun juga yang sekarang telah dan atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah kepada Nasabah baik berupa jumlah pokok dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				Berdasarkan Surat Bank Permata No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020, syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (<i>negative covenants</i>) yang sebelumnya terdapat pada Akta Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik (IMBT) No. 114 tanggal 30 Juli 2018 telah dicabut, antara lain: - Nasabah wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, yaitu membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah. - Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa di bawah ini, Nasabah akan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai hal-hal berikut: melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Nasabah, baik yang wajib dimintakan pemberitahuan dan atau diberitahukan dan atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang namun termasuk dan tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan pemegang saham, harus mendapat persetujuan tertulis dari Bank.
6.	Kontrak Pengerjaan Jasa Overburden Removal No. OPR-17-0461 tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Jasa Overburden Removal No. OPR-20-0514 tanggal 9 September 2020	PT Manambang Muara Enim ("Pihak Pertama") dan PT Ulima Nitra ("Pihak Kedua").	1 Maret 2017 sampai dengan 1 Maret 2022.	Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pekerjaan Overburden removal dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan Pihak Pertama untuk melakukan pekerjaan Overburden ("OB") Removal. Nilai Pengerjaan: - OB Removal, termasuk Hauling OB Removal (jarak 0 meter sampai 1.700 meter): Rp20.100/BCM - OB Removal, termasuk Hauling OB Removal (jarak 0 meter sampai 2.200 meter): Rp21.100/BCM - Untuk setiap penambahan jarak 10 meter di luar jarak maksimum: Rp20/BCM
7.	Perjanjian Jasa Penambangan Batubara No. 010/PJ/BKL-UN/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang telah diubah terakhir kali dengan Addendum II Jasa Penambangan (OB removal) tanggal 7 Oktober 2020	PT Banyan Koalindo Lestari ("Perusahaan") dan PT Ulima Nitra ("Kontraktor").	27 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2025 atau tercapainya volume OB sebesar 36.575.000 BCM mana yang lebih dahulu	Perusahaan membutuhkan pekerjaan penambangan batubara yang disediakan oleh pemilik Izin Jasa Pertambangan dengan melakukan Pelelangan Terbatas yang dimenangkan oleh Kontraktor sebagai pelaksana Jasa Pertambangan. Harga Jasa Penambangan: - Pembersihan lahan (Land Clearing), Penggalan, pemuatan, pengangkutan dan pembuangan tanah penutup batubara (topsoil dan lapisan penutup) ke tempat pembuangan akhir, dozing, hauling OB ke disposal max 1000 m, management dan perpindahan disposal, dewatering (air dan lumpur), perawatan settling pond, mine road, lighting, benching: Rp29.400/BCM - Sewa alat penggalian batubara: Rp10.900/ton - Biaya coal hauling dari PIT ke CCP: Rp1.325/ton/km
8.	Pokok-Pokok Perjanjian No. 3900471013 tanggal 21 Januari 2020.	PT Pertamina Gas ("Perusahaan") dan PT Ulima Nitra ("Kontraktor").	15 Desember 2019 sampai dengan 14 Maret 2023.	Pekerjaan yang harus dilaksanakan Kontraktor adalah Jasa Penanggulungan Keadaan Darurat dan Rehabilitasi di wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area. Nilai Pekerjaan: Rp35.880.182.000 belum termasuk PPN 10%



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
9.	Perjanjian Pengadaan Jasa-Jasa Umum No. CS-17193924R tanggal 8 Agustus 2017	Conocophillips (Grissik) Ltd dan Cococophillips (South Jambi) ("Perusahaan") dan PT Ulima Nitra ("Kontraktor").	8 Agustus 2017 sampai dengan 8 Agustus 2022.	Perusahaan menginginkan agar Kontraktor melaksanakan Pekerjaan tertentu yang menunjang kegiatan operasional atau proyek-proyek Perusahaan. Kontraktor menyatakan dan memberikan jaminan kepada Perusahaan bahwa Kontraktor memiliki management, pengawasan dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. Nilai Kontrak: Rp49.420.635.000.
10.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL1900460 tanggal 30 Oktober 2019.	PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor") dan PT Ulima Nitra ("Lessee").	36 bulan	Lessor dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan atas Barang Modal kepada Lessee dan Lessee dengan ini setuju pula atas fasilitas sewa pembiayaan barang modal berupa satu Unit Kobelco Excavator SK210LC-10 Long Arm Year 2018/2019 Harga Perolehan: Rp1.650.000.000. Nilai Pembiayaan: Rp1.320.000.000.
11.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0013021/1/12/06/2019 tanggal 27 Juni 2019	PT Dipo Star Finance ("Lessor") dan PT Ulima Nitra ("Lessee").	27 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2022.	Lessor dengan ini menyatakan akan menyewakan barang kepada Lessee yang dengan ini menyatakan akan mengadakan sewa pembiayaan Barang tersebut kepada Lessor. Barang tersebut adalah Mitsubishi Fuso Truck E2 FM517HS 2019 sejumlah empat unit. Harga Barang: Rp2.800.000.000. Deposito Jaminan: 20% (Rp560.007.000). Uang Sewa Pembiayaan keseluruhan: Rp2.659.320.000
12.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0013020/1/12/06/2019 tanggal 27 Juni 2019	PT Dipo Star Finance ("Lessor"); dan PT Ulima Nitra ("Lessee").	27 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2022.	Lessor dengan ini menyatakan akan menyewakan Barang kepada Lessee yang dengan ini menyatakan akan mengadakan sewa pembiayaan barang tersebut kepada Lessor. Barang tersebut adalah Mitsubishi Fuso Truck E2 FM517HS 2019 sejumlah tiga unit. Harga Barang: Rp1.800.000.000. Deposito Jaminan: 20% (Rp360.000.000). Uang Sewa Pembiayaan keseluruhan: Rp1.709.568.000
13.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0013019/1/12/06/2019 tanggal 27 Juni 2019.	PT Dipo Star Finance ("Lessor"); dan PT Ulima Nitra ("Lessee").	27 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2022.	Lessor dengan ini menyatakan akan menyewakan Barang kepada Lessee yang dengan ini menyatakan akan mengadakan sewa pembiayaan barang tersebut kepada Lessor. Barang tersebut adalah Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI Gear 2019 sejumlah satu unit. Harga Barang: Rp364.000.000. Deposito Jaminan: 20% (Rp72.805.000). Uang Sewa Pembiayaan keseluruhan: Rp345.708.000.



F. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Aset Tetap

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berdasarkan kepemilikan sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Keterangan	Status
1.	SHGB No. 235, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kelurahan Karang Raja	Surat Ukur No. 478/KarangRaja/2016 tanggal 2 September 2016 dengan luas 4.297 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 1 Mei 2042.	Aset ini sedang dijaminkan di Bank Mandiri
2.	SHGB No. 10, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu I, Kelurahan Karya Jaya	Surat Ukur No. 2377/1992 tanggal 31 Oktober 1992 dengan luas 10.265 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 1 September 2024.	Aset ini sedang dijaminkan di Bank BCA
3.	SHGB No. 390, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Karya Baru.	Surat Ukur No. 322/Karya Baru/2007 tanggal 9 Oktober 2007 dengan luas 3.475 m2 dengan tanggal berakhir hak 4 Desember 2050.	
4.	SHGB No. 7793, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Karya Baru.	Surat Ukur No. 778/Karya Baru/2000 tanggal 27 Juni 2000 dengan luas 2.079 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 4 Desember 2050.	Aset ini sedang dijaminkan di Bank DBS
5.	SHGB No. 388, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa.	Gambar situasi No. 75/1982 tanggal 3 Februari 1982 dengan luas 8.540 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 4 Desember 2050.	
6.	SHGB No. 389, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa.	Gambar situasi No. 80/1982 tanggal 3 Februari 1982 dengan luas 4.474 m2 dengan luas 8.540 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 4 Desember 2050.	
7.	SHGB No. 390, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Karya Baru.	Surat Ukur No. 322/Karya Baru/2007 tanggal 9 Oktober 2007 dengan luas 3.475 m2 dengan tanggal berakhir hak 4 Desember 2050.	Aset ini sedang dijaminkan di Bank DBS

Alat Berat dan Kendaraan

Perseroan memiliki aset bergerak berupa alat berat dan kendaraan bermotor sebagai berikut:

Keterangan	Juni 2020	2019	2018	2017
Alat Berat	193	205	204	218
Truk	217	237	226	220
Kendaraan	50	49	63	90
Total	460	491	493	528



G. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan asuransi dengan perincian sebagai berikut:

Perseroan

No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan
1.	PT Asuransi Central Asia	11001032007000 0011	Property All Risk	Gedung Kantor di Jl. Betet No. 28, Palembang	23 Juni 2020 – 23 Juni 2021	Rp4.479.618.000
2.	PT Asuransi Astra Buana	012000077690	Property All Risk	Private Warehouses di Jl. Lintas Tengah Sumatera No. 101- 103 Dusun I, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan	20 November 2020 – 20 November 2021	Rp1.150.000.000
3.	PT Asuransi Astra Buana	042009919607	Asuransi Kendaraan Bermotor	15 unit Toyota Hilux New Double Cabin 2.4 E 4x4 M/T Diesel, Tahun 2019	1 Agustus 2020 – 1 Agustus 2021	Casco: Rp390.100.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
4.	PT Asuransi Astra Buana	042009844051	Asuransi Kendaraan Bermotor	1 Unit Toyota All New Innova No. Polisi B13700T	9 Juli 2020 – 9 Juli 2021	Casco: Rp344.200.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
5.	PT Asuransi Astra Buana	042009924919	Asuransi Kendaraan Bermotor	Delapan unit Truck Mitsubishi	1 Agustus 2020 – 1 Agustus 2021	Casco: Rp661.600.000, Rp411.300.000 dan Rp700.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
6.	PT Asuransi Astra Buana	042009924920	Asuransi Kendaraan Bermotor	Daihatsu Grand Max 1.3D, No. Mesin K3MH01551, Tahun 2017	29 Agustus 2020 – 29 Agustus 2021	Casco: Rp119.400.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
7.	PT Asuransi Astra Buana	042010002594	Asuransi Kendaraan Bermotor	Lima unit Pick Up Double Cabin Mitsubishi Triton New 2.5 TDCI DC GLS 2015	21 September 2020 – 21 September 2021	Casco: Rp205.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
8.	PT Asuransi Astra Buana	042010157424	Asuransi Kendaraan Bermotor	Dua unit Multy Purpose Vehicle Avanza Grand New G 1.3 M/T 2016	10 November 2020 – 10 November 2021	Casco: Rp141.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
9.	PT Asuransi Astra Buana	042010162599	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Triton New 2.8 HD X 4WD, No. Polisi BG9336NT, Tahun 2014	25 November 2020 – 25 November 2021	Casco: Rp215.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
10.	PT Asuransi Astra Buana	042010237092	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Grand New Kijang Innova V Diesel M/T, No. Polisi BG1648RF, Tahun 2011	22 Desember 2020 – 22 Desember 2021	Casco: Rp205.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
11.	PT Asuransi Astra Buana	042009654770	Asuransi Kendaraan Bermotor	Lima unit Pick Up Mitsubishi Triton New 2.5SC GLX 2013	17 April 2020 – 17 April 2021	Casco: Rp175.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
12.	PT Asuransi Astra Buana	092000039991	Asuransi Alat Berat	Motor Grader CAT 120K, Serial No. ASZN01761, Tahun 2016	10 Maret 2020 – 10 Maret 2021	Rp1.636.250.000



No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan
13.	PT Asuransi Astra Buana	092000039970	Asuransi Alat Berat	Volvo EC280DL, Tipe Excavator, Serial No. 274441, Tahun 2017	14 Maret 2020 – 14 Maret 2021	Rp3.543.200.000
14.	PT Asuransi Astra Buana	092000039993	Asuransi Alat Berat	Komatsu Excavator PC850-8R12016, Serial No. 70059	17 Maret 2020 – 17 Maret 2021	Rp5.385.600.000
15.	PT Asuransi Astra Buana	092000040249	Asuransi Alat Berat	Komatsu – PC850 – 8R1, Tipe Excavator, No. Mesin 70199, Tahun 2018	13 April 2020 – 13 April 2021	Rp9.196.000.000
16.	PT Asuransi Astra Buana	092000040250	Asuransi Alat Berat	Empat unit Scania Dumpruck P310CB- 6x4/S1 – 2015	14 April 2020 – 14 April 2021	Rp1.155.000.000
17.	PT Asuransi Astra Buana	092000040251	Asuransi Alat Berat	Empat unit Scania Dumpruck P360CB- 6x4/S1 2017	26 April 2020 – 26 April 2021	Rp1.450.000.000
18.	PT Asuransi Astra Buana	092000040253	Asuransi Alat Berat	Delapan unit Scania Dumpruck P360CB- 6x4/S1 2017	27 April 2020 – 27 April 2021	Rp1.668.500.000
19.	PT Asuransi Astra Buana	092000040725	Asuransi Alat Berat	Excavator Volvo EC480 2016 dan Bulldozer CAT D8R 2016	10 Mei 2020 – 10 Mei 2021	Rp3.412.750.000 dan Rp4.908.750.000
20.	PT Asuransi Astra Buana	092000040922	Asuransi Alat Berat	Empat unit Volvo Dumpruck FMX400 2016	3 Juni 2020 – 3 Juni 2021	Rp1.223.600.000
21.	PT Asuransi Astra Buana	092000040920	Asuransi Alat Berat	Dumtruk Volvo FMX 400 tahun 2016	16 Juni 2020 – 16 Juni 2021	Rp1.223.600.000
22.	PT Asuransi Astra Buana	092000042217	Asuransi Alat Berat	15 unit Scania Dumpruck P360CB 2019	25 Oktober 2020 – 25 Oktober 2021	Rp1.921.830.000
23.	PT Asuransi Astra Buana	092000041290	Asuransi Alat Berat	Excavator Volvo EC480D, Tahun 2016	13 Juli 2020 – 13 Juli 2021	Rp3.450.000.000
24.	PT Asuransi Astra Buana	092000041203	Asuransi Alat Berat	Lima unit Hino Dumpruck FM260JD 2019	16 Juli 2020 – 16 Juli 2021	Rp920.000.000
25.	PT Asuransi Astra Buana	092000041293	Asuransi Alat Berat	Komatsu PC850-8RI, Tipe Excavator, Tahun 2018	24 Juli 2020 – 24 Juli 2021	Rp9.680.000.000
26.	PT Asuransi Astra Buana	092000041207	Asuransi Alat Berat	Lima unit Hino Dumpruck FM260JD 2019	24 Juli 2020 – 24 Juli 2021	Rp920.000.000
27.	PT Asuransi Astra Buana	092000041210	Asuransi Alat Berat	Dua unit Komatsu Excavator PC400 LCSE-8 2019, tiga unit Komatsu Bulldozer D85ESS 2019 dan satu unit Komatsu Excavator PC300 SE 8 MO 2019	26 Juli 2020 – 26 Juli 2021	Komatsu Excavator PC400 LCSE-8 2019 senilai Rp4.840.000.000, Komatsu Bulldozer D85ESS 2019 senilai Rp3.685.000.000, Komatsu Excavator PC300 SE 8 MO 2019 senilai Rp3.520.000.000
28.	PT Asuransi Astra Buana	09200041208	Asuransi Alat Berat	Tractor Head Scania - P460CA – 6x6 / S21, Tahun 2018	26 Juli 2020 – 26 Juli 2021	Rp2.223.500.000
29.	PT Asuransi Astra Buana	092000041484	Asuransi Alat Berat	Tiga unit Komatsu Dumpruck HD465 7R 2018	1 Agustus 2020 – 1 Agustus 2021	Dua unit senilai Rp9.130.000.000 dan satu unit senilai Rp9.240.000.000
30.	PT Asuransi Astra Buana	092000041485	Asuransi Alat Berat	Excavator Volvo EC480DL Tahun 2017	4 Agustus 2020 – 4 Agustus 2021	Rp4.048.000.000



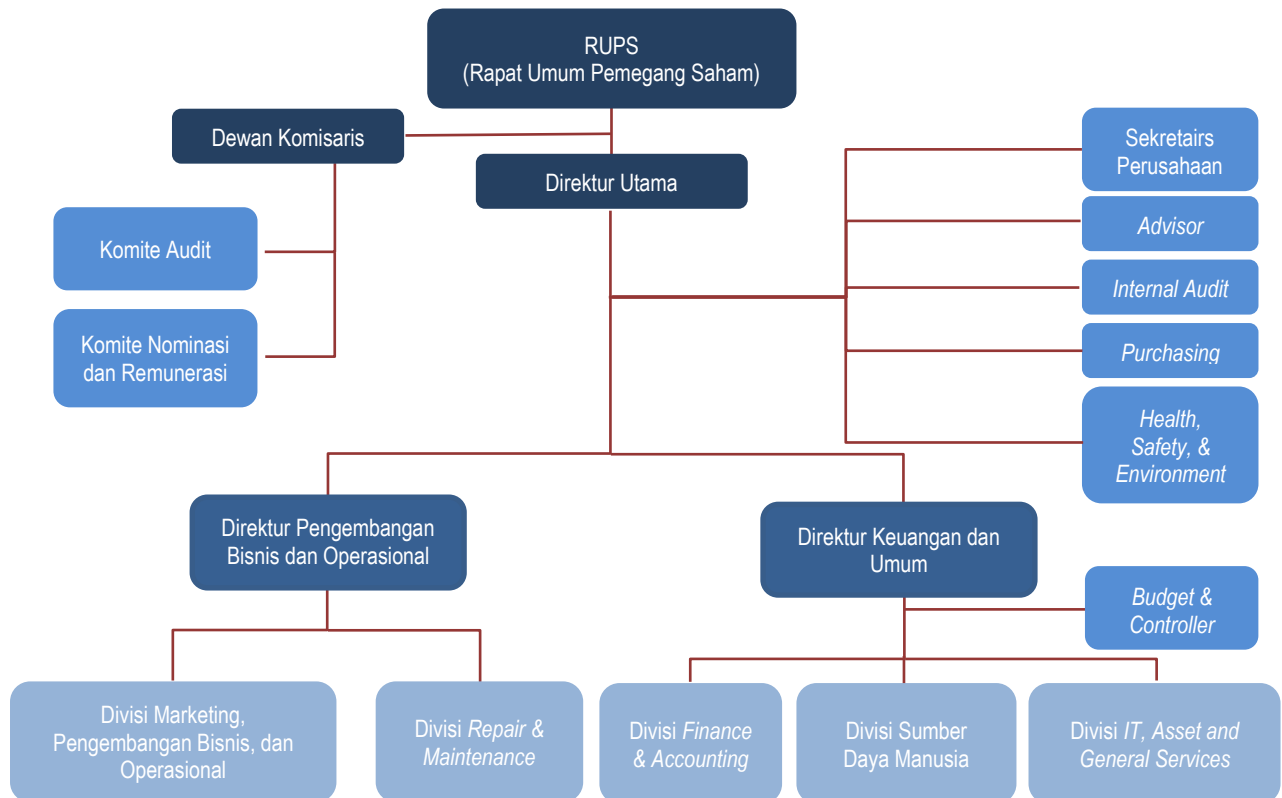
No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan
31.	PT Asuransi Astra Buana	092000041404	Asuransi Alat Berat	Komatsu Excavator PC400 LCSE-8 2019, Komatsu Bulldozer D85ESS 2019, Komatsu Excavator PC300 SE-9M0 2019	5 Agustus 2020 – 5 Agustus 2021	Rp4.840.000.000, Rp3.685.000.000, Rp3.520.000.000
32.	PT Asuransi Astra Buana	092000041400	Asuransi Alat Berat	Komatsu Bulldozer D85ESS-2A Tahun 2016	8 Agustus 2020 – 8 Agustus 2021	Rp2.758.250.000
33.	PT Asuransi Astra Buana	092000041487	Asuransi Alat Berat	Empat unit Komatsu Dumptruck HD 465- 7R 2018	10 Agustus 2020 – 10 Agustus 2021	Rp9.240.000.000
34.	PT Asuransi Astra Buana	092000041489	Asuransi Alat Berat	Delapan unit Dumptruck UD Truck CWE28064RS4 2017	18 Agustus 2020 – 18 Agustus 2021	Rp865.000.000
35.	PT Asuransi Astra Buana	092000041565	Asuransi Alat Berat	Komatsu Excavator PC400 LCSE-8 2019 dan Komatsu Bulldozer D85ESS 2017	22 Agustus 2020 – 22 Agustus 2021	Rp4.840.000.000 dan Rp3.685.000.000
36.	PT Asuransi Astra Buana	092000041491	Asuransi Alat Berat	Centrifugal Pump DnD 200-5HX Pumpset tahun 2017	22 Agustus 2020 – 22 Agustus 2021	Rp3.239.500.000
37.	PT Asuransi Astra Buana	092000041494	Asuransi Alat Berat	Volvo Excavator EC480D 2016	31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2021	Rp4.015.000.000
38.	PT Asuransi Astra Buana	092000041498	Asuransi Alat Berat	Volvo Excavator EX210B Prime 2016	31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2021	Rp1.265.000.000
39.	PT Asuransi Astra Buana	092000042174	Asuransi Alat Berat	Delapan unit UD Trucks Dump – CWE28064RS4 2017	11 Oktober 2020 – 11 Oktober 2021	Rp778.500.000
40.	PT Asuransi Astra Buana	092000042175	Asuransi Alat Berat	Tiga Unit Volvo EC480DL, Tipe Hydraulic Excavator, Tahun 2017	11 Oktober 2020 – 11 Oktober 2021	Rp3.845.600.000
41.	PT Asuransi Astra Buana	092000042536	Asuransi Alat Berat	(a) Water Tank UD Truck (b) Flatbed Truck HINO (c) Vacuum Tank Truck (d) Water Tank Truck Hino	3 November 2020– 3 November 2021	(a) Rp956.700.000 (b) Rp753.300.000 (c) Rp1.039.050.000 (d) Rp916.200.000
42.	PT Asuransi Astra Buana	092000042448	Asuransi Alat Berat	Lima unit Scania Dump Truck P360CB- 6x4/S1 2017	30 November 2020 – 30 November 2021	Rp1.853.500.000
43.	PT Asuransi Astra Buana	092000040254	Asuransi Alat Berat	Dua Unit Off Highway Truck Caterpillar 773E, Tipe Truck, No. ASK01493, Tahun 2017	28 April 2020 – 28 April 2021	Rp7.920.000.000
44.	PT Asuransi Astra Buana	092000042447	Asuransi Alat Berat	Bulldozer Komatsu D64P-12 No. 65981 tahun 2018	6 November 2020 – 6 November 2021	Rp3.344.000.000
45.	PT Asuransi Astra Buana	092000042448	Asuransi Alat Berat	Tujuh unit Scania Dump Truck – P360CB -6X4/51 – 2017	30 November 2020 – 30 Desember 2021	Rp1.853.500.000
46.	PT Asuransi Astra Buana	092100043112	Asuransi Alat Berat	enam unit UD Trucks Dumo	19 Januari 2021 – 19 Januari 2022	Rp865.000.000



No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan
47.	PT Asuransi Astra Buana	0092100043164	Asuransi Alat Berat	dua unit Hitachi Excavator	1 Januari 2021 – 1 Januari 2022	Rp1.485.000.000
48.	PT Asuransi Astra Buana	092100043238	Asuransi Alat Berat	Caterpillar Backhoe Loader CAT 416F2, Serial No. LYA00171, Tahun 2015	23 Januari 2021 – 23 Januari 2022	Rp940.500.000
49.	PT Asuransi Astra Buana	0912100043252	Asuransi Alat Berat	dua unit Scania Tractor Head – P460CA – 6X6/S21	31 Januari 2021 – 31 Januari 2022	Rp2.232.500.000
50.	PT Asuransi Astra Buana	042010262758	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Triton All New Exceed DC M/T, No. Polisi BG9395 NI, Tahun 2017	5 Desember 2020 – 5 Desember 2021	Casco: Rp250.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000

H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

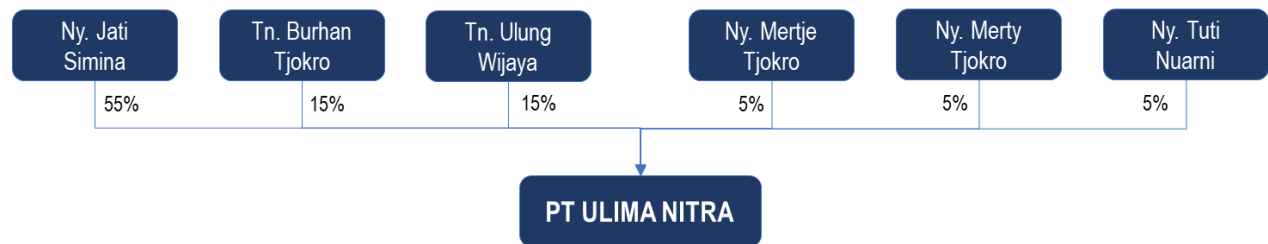


Posisi Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Umum merupakan posisi yang berbeda namun saat ini dirangkap oleh Sdr Burhan Tjokro yang menduduki posisi sebagai Direktur Keuangan dan Umum merangkap sebagai Direktur Utama. Di masa mendatang, sehubungan dengan perkembangan usaha, tidak tertutup kemungkinan Perseroan akan mengangkat direksi baru untuk mengurangi beban kerja direksi yang ada saat ini.



I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Penerima manfaat dan pengendali Perseroan adalah Ny. Jati Simina dan Tn. Burhan Tjokro, Tn. Ulung Wijaya, Ny. Mertje Tjokro, Ny. Merty Tjokro, serta Ny. Tuti Nuarni yang seluruhnya merupakan anak kandung dari Ny. Jati Simina. Oleh karenanya, Perseroan dikendalikan secara bersama-sama oleh keluarga Tjokro Riduan melalui istri dan anak-anaknya.

Setelah terjadinya pengalihan saham, pengendali Perseroan tidak akan mengalami perubahan karena pihak penerima seluruhnya adalah anak kandung dan pemegang saham saat ini, sehingga pemegang saham pengendali Perseroan masih tetap di tangan keluarga Tjokro Riduan.

J. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ny. Mertje Tjokro
Komisaris Independen	: Tn. Supandi Widi Siswanto

Direksi

Direktur Utama	: Tn. Burhan Tjokro
Direktur	: Tn. Ulung Wijaya

Berdasarkan Pasal 20 POJK No. 33 Tahun 2014, (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen, (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, dan (4) 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 10/2020.



Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Ny. Mertje Tjokro, Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak September 2020.

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Kanti Kari Marjoram sejak tahun 2015, sebagai Komisaris Utama di PT Kanti Kari Karawai sejak tahun 2014, sebagai Komisaris di PT Ulima Baselio sejak tahun 2012, sebagai Komisaris Utama di PT Kanti Kari sejak tahun 2012, dan pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 1992 sampai Agustus 2020 dan Direktur di CV Bumi Sriwijaya pada tahun 1990 sampai Mei 2020.

Tn. Supandi Widi Siswanto, Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020.

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan, beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Tourindo Guide Indonesia Tbk sejak tahun 2020, sebagai Komisaris Independen di PT Terregra Asia Energy Tbk sejak tahun 2016, sebagai Komisaris Independen di PT SMR Utama Tbk sejak tahun 2013, sebagai Komisaris Utama di PT Pan Brothers Tbk sejak tahun 2013, sebagai Komisaris Utama di PT Garuda Investindo sejak tahun 2013. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk pada tahun 2018 sampai Agustus 2020, sebagai Komisaris Independen di PT Forza Land Indonesia Tbk pada tahun 2016 sampai Februari 2020, sebagai Komisaris Utama di PT Sitara Propertindo Tbk pada tahun 2013 sampai Juni 2016, sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai Juni 2012, sebagai Manajer Divisi Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia, Kepala Divisi Evaluasi Emiten PT Bursa Efek Indonesia, Kepala Divisi Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, dan Kepala Divisi Pengawas Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia selama tahun 1992 sampai Juni 2009, sebagai Biro Penilaian Perusahaan Bappepam-LK pada tahun 1983 sampai tahun 1992.

DIREKSI

Tn. Burhan Tjokro, Direktur Utama



Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas Jakarta pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1992 sampai 2004 untuk periode pertama, dan sejak tahun 2004 sampai saat ini untuk periode kedua.

Selain menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan, beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Sumatera Synergy Indonesia sejak tahun 2004 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Kanti Kari Marjoram sejak tahun 2015 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Kanti Kari Karawai sejak tahun 2014 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Kanti Kari sejak tahun 2012 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Ulima Baselio sejak tahun 2012 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Ulima Supplindo sejak tahun 2008 sampai saat ini.



Tn. Ulung Wijaya, Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar *Master of Arts in Marketing* pada tahun 1995, kemudian menyelesaikan pendidikan gelar profesional di *The Chartered Institute of Marketing* pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1998 sampai saat ini.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau saat ini juga menjabat sebagai Konsultan di PT Utpadaka Wita Reswara sejak tahun 2019 sampai saat ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di PT Sriwijaya Bara Priharum pada tahun 2018 sampai tahun 2019 dan sebagai Akuntan di Bank Danamon pada tahun 1996 sampai tahun 1998.

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Ny. Mertje Tjokro selaku Komisaris Utama adalah saudara kandung dari Tn. Burhan Tjokro dan Tn. Ulung Wijaya masing-masing selaku Direksi Perseroan, serta ketiganya juga merupakan pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.

K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG) secara konsisten. Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya agar setiap aspek dan aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.

Komitmen dan penerapan GCG tersebut oleh Perusahaan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan para pemegang sahamnya, namun terutama ditujukan guna meningkatkan nilai jangka panjang dari Perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat umum.

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan kegiatan dan kinerja Perusahaan secara akurat, jelas, konsisten, bisa dibandingkan dan tepat waktu.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggung-jawab.

d. Independensi

Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan Kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Independen yang diangkat oleh pemegang saham berdasarkan Akta No.10/2020.

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:



- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.



6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
9. Direksi berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam dan di luar pengadilan.
10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.

Untuk kedepannya, Direksi termasuk Direktur Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 30/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah gaji dan remunerasi dewan komisaris Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp1.523.500.000, Rp2.895.260.000, Rp3.389.100.000, dan Rp3.029.100.000 untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, Direksi dan Komisaris masing-masing telah melaksanakan Rapat sebanyak 1 kali dan 1 kali dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ny. Jati Simina	KU	1	1	100
Ny. Mertje Tjokro	K	1	1	100
Tn. Burhan Tjokro	DU	1	1	100
Tn. Ulung Wijaya	D	1	1	100
Ny. Tuti Nuarni	D	1	1	100
Ny. Merty Tjokro	D	1	1	100
Tn. Supandi Widi Siswanto*	KI	-	-	-

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, D = Direktur

*Tn Supandi Widi Siswanto diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 2 September 2020

Selama tahun 2019, Direksi dan Komisaris masing-masing telah melaksanakan Rapat sebanyak 2 kali dan 2 kali dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ny. Jati Simina	KU	2	2	100



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ny. Mertje Tjokro	K	2	2	100
Tn. Burhan Tjokro	DU	2	2	100
Tn. Ulung Wijaya	D	2	2	100
Ny. Tuti Nuarni	D	2	2	100
Ny. Mertje Tjokro	D	2	2	100

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, D = Direktur

Selama tahun 2018, Direksi dan Komisaris masing-masing telah melaksanakan Rapat sebanyak 2 kali dan 2 kali dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ny. Jati Simina	KU	2	2	100
Ny. Mertje Tjokro	K	2	2	100
Tn. Burhan Tjokro	DU	2	2	100
Tn. Ulung Wijaya	D	2	1	50
Ny. Tuti Nuarni	D	2	2	100
Ny. Mertje Tjokro	D	2	2	100

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, D = Direktur

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Untuk memenuhi POJK No. 35 Tahun 2014, Perseroan telah menunjuk Bapak Ulung Wijaya sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/UN-DIR-Kep/X/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) tanggal 1 Oktober 2020.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Ulung Wijaya
 Alamat : JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan.
 No. telepon : (0711) 365157, 365158, 365580
 Email : corsec@ulimanitra.co.id

Informasi lebih lengkap mengenai Bapak Ulung Wijaya dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada POJK No. 35. yaitu:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat. termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris dibantu oleh komite-komite yaitu:

Komite Audit

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 55 Tahun 2015, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu komite audit serta menyetujui penetapan Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/UN-DK-Kep/IX/2020 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Ulima Nitra tanggal 28 September 2020.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Supandi Widi Siswanto
 Anggota : Tania Effendi
 Anggota : Merry Maretha



Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit:

1. Supandi Widi Siswanto
Ketua Komite Audit

Informasi lebih lengkap mengenai Bapak Supandi Widi Siswanto dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha.

2. Tania Effendi
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 31 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- 2012 – Sekarang : Staf Keuangan di PT Ulima Baselio
- 2009 – 2012 : Staf Audit di PT Jaya Masawan Putera Sejahtera
- 2008 – 2009 : Staf Akuntansi di PT Wamatama Cemerlang

3. Merry Maretha
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 32 tahun.

Meraih gelar Sarjana Komputer

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- Mei 2014 – Sekarang : Staf Keuangan di PT Kanti Kari
- Desember 2005 – Januari 2014 : Staf Pajak di PT Idola Insani

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan laporan keuangan Perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
9. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
10. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, fee dan ruang lingkup penugasan;
12. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan;
14. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat rapat Komite Audit Perseroan.



Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Unit Audit Internal PT Ulima Nitra No. 004/UN-DIR-Kep/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan telah mengangkat Viin Gunawan sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 1 Oktober 2020.

Tugas dan tanggung jawab unit Audit Internal:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.004/UN-DK-Kep/XI/2020 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 27 November 2020, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Supandi Widi Siswanto
Anggota : Noni
Anggota : Faisal Martadinata

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengacu pada ketentuan POJK No. 34 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit:

1. Supandi Widi Siswanto
Ketua Komite Audit

Informasi lebih lengkap mengenai Bapak Supandi Widi Siswanto dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha.

2. Noni
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- 1996 – 1997 : *Staff Finance* di Bank Danamon
- 1993 – 1996 : *Staff Finance* di CV Surya Mas
- 1991 – 1993 : *Staff Finance* di CV Maju Mapan

3. Faisal Martadinata
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 43 tahun.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- Juni 2020 – Sekarang : *Human Resources Division Head* di PT Ulima Nitra
- Maret 2017 – 17 Mei 2019 : *Human Resources Operation Head* di PT Matahari Kahuripan Indonesia Group
- Desember 2016 – Maret 2017 : *Human Resources & General Affair of Property* PT Aryaventura Realty
- Juli 2015 – November 2016 : *General Manager Property Operational Management Set-up & Control* di KSO Merdeka Ronov Indonesia
- Februari 2014 – Juni 2015 : *Human Resources & General Affair Manager* di KSO Merdeka Ronov Indonesia
- Februari 2013 – 2014 : *Human Resources & General Affair Manager* di PT Prima Kelola Sukses



- Januari 2012 – Januari 2013: *Project Manager of Sub Contractor* di PT Bina Trengginas Mandiri
- Mei 2006 – Desember 2011 : *Human Resources Manager* di PT Atri Distribusindo
- Maret 2006 – Mei 2006 : *Area Sales Manager* di PT Atri Distribusindo
- Juli 2005 – Maret 2006 : *Industrial Relation and General Affair Manager* di PT Alfa Retailindo Tbk
- Juni 2003 – Juli 2005 : *Assistant Manager of Industrial Relation and General Affair* di PT Alfa Retailindo Tbk
- Maret 2002 – Juni 2003 : *Industrial Relation Officer* di PT Alfa Retailindo Tbk
- Juni 2000 – Maret 2002 : *Head of Personnel – Store* di PT Alfa Retailindo Tbk

L. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2020	2019	2018	2017	
Karyawan Tetap	108	113	127	140	
Karyawan Kontrak	748	758	633	801	
Total	856	871	760	941	

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2020	2019	2018	2017	
Manajer Kepala	3	6	6	5	
Manajer Proyek	5	8	6	8	
Staff	100	99	115	127	
Total	108	113	127	140	

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2020	2019	2018	2017	
Pasca Sarjana	-	-	1	1	
Sarjana	1	2	2	8	
Diploma	-	1	1	1	
SMK/STM	4	4	6	5	
SMA	-	-	3	-	
SMP	103	106	114	125	
Total	108	113	127	140	

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2020	2019	2018	2017	
> 55 Tahun	6	9	7	7	
41 - 55 Tahun	39	53	54	53	
26 - 40 Tahun	49	51	66	77	
17 - 25 Tahun	14	-	-	3	
Total	108	113	127	140	

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2020	2019	2018	2017	
Administrasi & Umum	3	3	6	3	
Keuangan	4	5	5	5	
Operasional	101	105	116	132	
Total	108	113	127	140	

**Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Kantor Pusat Palembang	15	17	28	21
Workshop Musi Dua Palembang	4	4	3	5
Site Darmo Muaraenim	78	82	88	96
Site Grissik Musi Banyuasin	1	2	6	9
Site Tanjung Lalang Tanjung Enim	3	3	4	4
Site Pulau Panggung Tanjung Enim	1	2	1	-
Site Musiwaras Utara	6	3	-	-
Site Merapi Lahat	-	-	4	4
Site Soka Pendopo	-	-	-	1
Total	108	113	134	140

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan memberikan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan memberikan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum untuk Petugas *Safety*, pelatihan Pengawas Operasional Pertama untuk Pengawas/Supervisor, pelatihan Pengawas Operasional Madya untuk Manajer Proyek, Sertifikasi Kompetensi Kerja Operator Pesawat Angkat, pelatihan penggunaan unit kendaraan truk, dan Sertifikasi *Driver Light Vehicle*.

M. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat dan tidak ada somasi/klaim dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.



N. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Operasional

Proses Perolehan Kontrak



Keterangan :

1. Proyek → Dokumen Bidding
Staf Operasional mencari pengumuman tender melalui papan pengumuman *customer*, koran atau internet, untuk kemudian membuat dokumen pendaftaran untuk mengikuti Tender.
2. Membuat Dokumen Bidding → Submit Dokumen Bidding
Staf Operasional mengirimkan dokumen sesuai persyaratan pendaftaran. Apabila dokumen pendaftaran diterima, maka akan menerima undangan Tender, dan menghadiri PreBid apabila ada. Didalam prosesnya terdapat pengajuan surat permohonan kepada Dealer, Asuransi atau Bank sesuai dengan permintaan (PKS), dan Customer dalam menyiapkan dokumen Tender.
3. Submit Dokumen Bidding
Submit dokumen persyaratan Tender, *customer* melakukan evaluasi kelengkapan data peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak sesuai, maka peserta Tender dinyatakan gugur.
4. Dokumen Bidding diterima – Submit Dokumen Tender
Kelengkapan data peserta telah terpenuhi, maka *operational officer* akan menerima undangan untuk OpenBid Tender Ke-2.
5. Dokumen Bidding tidak diterima – Proses Selesai
Kelengkapan data tidak terpenuhi, maka dokumen ditolak dan dinyatakan gugur.
6. Dokumen Bidding Diterima → OpenBid Tender Kedua
Menghadiri OpenBid untuk Tender ke-2, Pada tahap ini peserta memberikan *bidbond* dan penawaran harga. *Customer* melakukan evaluasi pemenang Tender, apabila tidak sesuai kriteria maka dinyatakan gugur.
7. OpenBid Tender Kedua → Review Kontrak Kerjasama dan Pemesanan Unit
Setelah menghadiri OpenBid Tender Kedua, apabila *customer* menerima penawaran harga yang telah diberikan peserta, maka akan dilakukan review terhadap kontrak Kerjasama yang ditawarkan dan pemesanan unit sesuai kebutuhan.
8. Hasil Review Kontrak Kerjasama diterima → Penandatanganan Kontrak
Hasil review dinyatakan sesuai dan diterima, maka dilakukan penandatanganan kontrak Kerjasama.
9. Hasil Review Kontrak Kerjasama ditolak → Akan dilakukan revisi sesuai kesepakatan
Hasil review dinyatakan belum ditolak, maka akan dilakukan revisi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

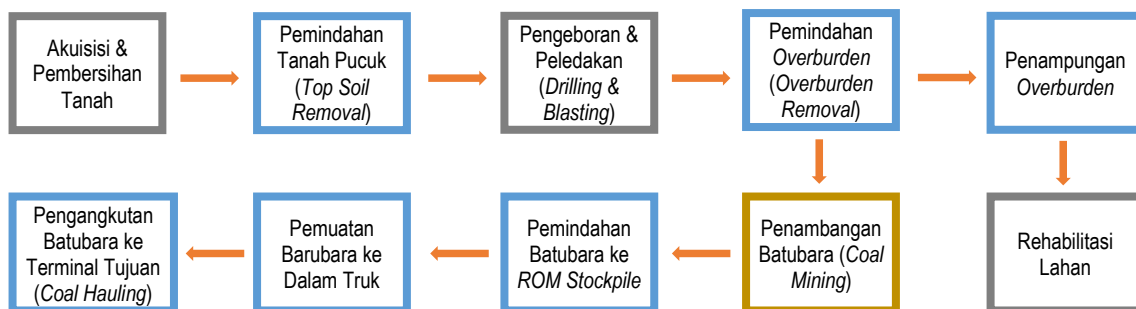


10. Memberikan Jaminan Pelaksanaan ke Pihak Kedua
Setelah dilakukan review dan hasil kesepakatan, maka akan ada jaminan pelaksanaan kepada pihak kedua untuk kemudian digunakan untuk jaminan ke *customer*.
11. Melakukan Pemesanan Kendaraan dan Leasing dengan spesifikasi sesuai dokumen tender.
12. Pengiriman Alat ke Lokasi
Alat berat siap dikirimkan ke lokasi kerja *customer*.
13. Pengerjaan Proyek Sesuai Kontrak

Keterangan :

SPK : Surat Perintah Kerja
Prebid : Rapat Penjelasan Tender
OpenBid : Rapat Pembukaan Tender

Proses Pertambangan



 : Lingkup Pekerjaan Perseroan
 : Lingkup Pekerjaan Pemilik IUP
 : Lingkup Pekerjaan Pemilik IUP, Perseroan hanya berperan menyewakan alat

Keterangan:

1. Akuisisi Lahan & Pembersihan Perizinan
Proses ini merupakan lingkup pekerjaan pemilik Izin Usaha Pertambangan ("IUP").
2. Pemindahan Tanah Pucuk (*Top Soil Removal*)
Perseroan melakukan pengerjaan pemindahan tanah pucuk (*top soil removal*) sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemilik IUP yang nantinya akan digunakan untuk keperluan rehabilitasi pada saat penutupan area tambang.
3. Pengeboran & Peledakan (*Drilling & Blasting*)
Proses pengeboran dan peledakan merupakan lingkup pekerjaan pemilik IUP dengan perhitungan yang matang dan tingkat ketelitian tinggi guna mendukung kegiatan penambangan yang efektif dan efisien.
4. Pemindahan *Overburden* (*Overburden Removal*)
Sebagai pihak penyedia jasa pertambangan, pemindahan *overburden* dilakukan oleh Perseroan menuju area atau daerah penampungan *overburden*.
 - Penampungan *Overburden*
Area atau daerah yang disediakan oleh pemilik IUP untuk menampung sementara *overburden* sebelum digunakan untuk pengurukan daerah bekas tambang yang akan direhabilitasi.
 - Rehabilitasi Lahan
Rehabilitasi lahan merupakan lingkup pekerjaan dari pemilik IUP guna menjaga kelestarian lingkungan di setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan.
5. Penambangan Batubara (*Coal Mining*)
Proses penambangan batubara merupakan lingkup pekerjaan pemilik IUP. Dalam proses pengerjaannya, pemilik IUP melakukan kontrak sewa truk dan alat berat dengan Perseroan.
6. Pemindahan Batubara ke *ROM Stockpile*
Batubara yang telah ditambang akan dipindahkan ke *ROM Stockpile* yang dekat dengan kawasan tambang.



7. Pemuatan Batubara ke dalam Truk
Batubara yang telah selesai diproses di ROM *Stockpile* akan dimuat ke dalam truk untuk diangkut ke terminal tujuan (*Coal Hauling*).
8. Pengangkutan Batubara ke Terminal Tujuan (*Coal Hauling*)
Batubara diangkut ke pelabuhan atau langsung ke area PLTU sebagai sumber energi.

2. Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan mendaftarkan merek Ulima Nitra kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia pada tanggal 8 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Permohonan : JID2020052065
Tipe Permohonan : Merek Jasa
Nama Merek : Ulima Nitra



Label Merek :
Status : Proses Validasi

3. Daerah Pemasaran dan Pelanggan

Kegiatan operasional Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir ini berfokus di daerah Sumatera Selatan, diantaranya ialah Musi Rawas Utara, Muara Enim, Musi Banyu Asin, dan Lahat. Namun kedepannya Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pelanggan di luar daerah Sumatera Selatan.

Berikut merupakan data penjualan bersih Perseroan kepada beberapa pelanggan utama selama tiga tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
PT Menambang Muara Enim	55.554	61.066	145.835	124.168	101.317
PT Banyan Koalindo Lestari	50.451	-	65.180	-	-
PT Bukit Asam Tbk	24.585	24.721	42.480	46.910	-
PT Pacific Global Utama	8.433	12.042	20.784	37.619	-
ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2.183	24.509	31.369	69.537	75.468
PT Muara Alam Sejahtera	-	1.915	1.915	61.522	80.213
Jumlah	141.206	124.253	307.563	339.755	256.998

4. Keunggulan Kompetitif

Sumber Daya Manusia yang Handal

Dalam sektor usaha pertambangan, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pencapaian target Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan proses seleksi yang ketat sesuai dengan standar kemampuan dan keahlian untuk sektor pertambangan terhadap calon karyawan baru, peningkatan keahlian karyawan dengan berbagai pelatihan, menciptakan kesadaran karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara melengkapi karyawan dengan berbagai peralatan dan pelatihan untuk menghindari kecelakaan saat bekerja, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung dan memotivasi karyawan agar menciptakan kinerja yang efektif dan efisien.

Pengetahuan Luas tentang Wilayah Operasional

Proyek-proyek yang telah dan sedang dikerjakan oleh Perseroan mayoritas berada di wilayah Sumatera Selatan, yang mana merupakan daerah kedudukan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki pengetahuan yang baik terkait wilayah operasional seperti kondisi jalan dari *warehouse* menuju lokasi tambang atau sebaliknya, kondisi cuaca, dan keadaan tanah di daerah pemilik tambang. Pengetahuan tersebut penting demi menunjang terciptanya produktivitas Perseroan yang optimal.



Rekam Jejak yang Terbukti

Perseroan memiliki rekam jejak (*track record*) panjang yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun di sektor usaha penyewaan alat berat dan jasa pertambangan, terutama tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan. Sejak Perseroan didirikan, Perseroan telah dipercaya dalam berbagai kegiatan pertambangan sebagai penyedia jasa penyewaan alat berat, jasa penambangan, dan jasa pendukung penambangan lainnya. Beberapa kontrak yang telah dimiliki oleh Perseroan tidak jarang mendapat pembaruan kembali dari kliennya.

Peralatan Prima

Salah satu kekuatan utama Perseroan adalah kemampuan Perseroan dalam menyediakan peralatan-peralatan yang selalu dapat diandalkan. Sebagai upaya menjaga kondisi alat berat yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan memiliki *workshop* dan teknisi yang memiliki kemampuan dalam pemeliharaan dan perbaikan alat berat. Selain itu, akses *workshop* Perseroan yang juga dekat dengan pusat kota memberikan kemudahan akses apabila diperlukan perbaikan khusus yang harus mendatangkan tenaga ahli dari pihak OEM. Perseroan juga memiliki persediaan suku cadang demi mencegah risiko terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga suku cadang alat-alat berat Perseroan. Tersedianya suku cadang yang lengkap serta kemampuan pemeliharaan dan perbaikan dari teknisi yang handal membuat kinerja operasional Perseroan tetap terjaga dengan baik dan optimal.

Dukungan Kuat Pemegang Saham dan Tim Manajemen Yang Berpengalaman

Perseroan memiliki kekuatan berupa tim manajemen berpengalaman, dengan rata-rata lebih dari 25 tahun berkecimpung dalam bidang keahliannya, terutama dalam jasa penyewaan alat berat dan jasa pertambangan. Dalam mencari penyedia jasa penyewaan alat berat dan jasa pertambangan, para pemilik tender umumnya sangat mempertimbangkan rekam jejak kinerja dan tim manajemen yang berpengalaman. Rekam jejak yang baik dari Perseroan dan tim manajemen yang berpengalaman tersebut akan membantu meningkatkan keyakinan para pemilik tender untuk bekerjasama dan memilih Perseroan sebagai penyedia jasa alat berat dan/atau jasa pertambangan.

Efisien

Industri jasa pertambangan merupakan suatu industri yang membutuhkan kalkulasi dan perencanaan yang matang dalam penentuan rencana kerja dan operasionalnya. Kemampuan Perseroan untuk menjaga/mempertahankan efisiensi operasional telah terbukti mampu membawa Perseroan bertahan dalam industri ini lebih dari 25 tahun dan melewati berbagai siklus bisnis dengan tetap mampu menunjukkan performa yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan kepercayaan pelanggan, baik Perusahaan Nasional dan Multinasional yang sudah terjalin lebih dari 2 (dua) dekade. Efisiensi ini juga tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

5. Persaingan

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup memiliki ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan mineral, dimana tercatat sebagai produsen terbesar ke-4 di dunia untuk batubara (2019) dan 10 besar produsen mineral (termasuk *bauxite*) di tahun 2018. Tingginya permintaan atas sektor pertambangan dan mineral ini turut mendorong perkembangan industri pendukungnya, seperti alat berat (baik penjualan maupun sewa) dan jasa pertambangan.

Saat ini, beberapa pemain utama jasa pertambangan di Indonesia diisi oleh nama-nama besar, seperti PT Pamapersada Nusantara (PAMA - group United Tractor atau ASTRA), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT Sapta Indra Lestari (SIS - group Adaro), PT Cipta Kridatama (CK- group Trakindo), PT Petrosea Tbk (group Indika Energy), dan lain-lain. Para pemain utama tersebut saat ini merupakan pemain terbesar dengan kemampuan beroperasi di seluruh Indonesia.

Perseroan melihat bahwa terlepas dari skala proyek dan nama besar mereka, Perseroan sendiri memiliki kekhususan, antara lain fokus operasional di daerah Sumatera Selatan dengan target proyek pada kontrak-kontrak *small-to-mid size project*. Skala proyek yang berbeda tersebut, menyebabkan Perseroan tidak berkompetisi langsung (*head to head*) dengan para pemain besar tersebut. Saat ini persaingan Perseroan lebih kepada perusahaan-perusahaan daerah (*local*) dengan yang memiliki skala kecil sampai menengah (UKM) sehingga dengan kemampuan, pengalaman dan skala perseroan yang cukup kuat, Perseroan yakin akan mampu terus bersaing dan menjadi pemain terkemuka di Sumatera Selatan. Di masa yang akan datang, seiring dengan pertumbuhan skala Perusahaan, tidak menutup kemungkinan Perseroan akan melakukan ekspansi usaha ke daerah lain di Indonesia, baik seluruh daerah Sumatera maupun Kalimantan.

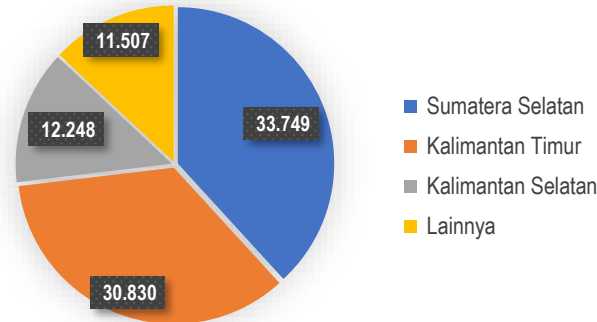
6. Prospek Usaha Perseroan

Sebagai pemilik Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), saat ini Perseroan berfokus menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan di wilayah Sumatera Selatan. Walaupun



batubara di wilayah Sumatera Selatan didominasi oleh batubara yang berkalori rendah hingga sedang, namun merupakan wilayah dengan sumber daya dan cadangan batubara terbesar di Indonesia. Per tahun 2019, data dari Dewan Energi Nasional menunjukkan jumlah sumber daya batubara di wilayah Sumatera Selatan sebesar 33,75 miliar ton, sehingga keberlanjutan tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan masih sangat terjaga.

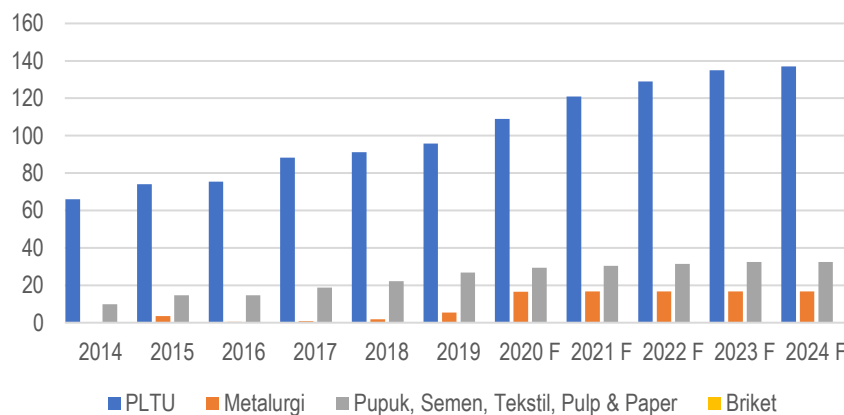
Cadangan Batubara di Indonesia (dalam Juta Ton)



Sumber: Data diolah dari Buku Bauran Energi Nasional 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020, Kementerian ESDM memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan terkait kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) minimal 25 persen dari rencana produksi batubara pada 2020 atau sebesar 155 juta ton. Alokasi tersebut dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri dan industri melalui pengembangan batubara cair dan gasifikasi batubara serta pemanfaatan batubara sebagai bahan baku *Dimethyl Ether* (DME).

Pertumbuhan dan Proyeksi Konsumsi Batubara Dalam Negeri (dalam Juta Ton)



Sumber: Data diolah dari LapKin Ditjen Minerba dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 cukup memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional dan global. Pandemi ini menimbulkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh dunia yang juga berdampak pada sisi produksi dan konsumsi batubara. Secara nasional, berdasarkan data dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) dari bulan Januari-Desember 2020 hanya mencapai US\$58,17 juta /ton, mengalami penurunan sebesar US\$19,72 juta/ton atau sebesar 25,32% dibandingkan dengan rata-rata HBA tahun 2019 sebesar US\$77,82 juta/ton. Meskipun total realisasi produksi batubara Indonesia mampu melampaui target rencana produksi di tahun 2020, realisasi DMO dan ekspor batubara pada tahun 2020 belum mampu untuk mencapai target rencana DMO dan ekspor batubara tahun 2020, yang realisasinya masing-masing hanya mencapai 85,09% dan 81,46% dari target yang telah ditentukan.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap peningkatan biaya operasional Perseroan sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja Perseroan. Perseroan menerapkan kewajiban karantina lebih kurang 14 hari di lokasi mess karyawan pada *site* tambang, baik karyawan yang akan masuk bekerja maupun karyawan yang akan meninggalkan *site* tambang (karena *shift*), pada saat tersebut, jumlah karyawan akan menumpuk sehingga menimbulkan beban operasional, namun karyawan tersebut tidak efektif bekerja karena tidak dapat bekerja sampai periode karantina berakhir. Selain itu, terdapat penurunan target pekerjaan oleh pemberi kerja dikarenakan harga dan permintaan batubara



yang menurun di awal-awal periode pandemi. Namun demikian, Perseroan meyakini akan adanya pemulihan kondisi industri secara keseluruhan seiring dengan upaya dan program vaksinasi nasional oleh pemerintah yang telah dimulai sejak awal tahun 2021.

Sebagian besar hasil tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan saat ini masih digunakan sebagai sumber energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa merupakan 78,13% dari total populasi penduduk Indonesia. Selain itu, pusat bisnis di Indonesia juga masih berada di Pulau Jawa dan diikuti oleh Pulau Sumatera yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,00% dan 21,49%. Sehingga kebutuhan hasil tambang batubara sebagai bahan baku pembangkit listrik di wilayah Sumatera dan Jawa masih akan cukup besar untuk ke depannya.

Berikut ini merupakan data kapasitas PLTU yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya:

Keterangan	Kapasitas PLTU dan PLTUMT ¹ (dalam Megawatt)		Total
	Terpasang (2018)	Rencana Pembangunan (2019-2028)	
Sumatera Selatan	1.322	2.990	4.312
Kepulauan Bangka Belitung	93	130	223
Jambi	32	1.200	1.232
Bengkulu	0	200	200
Lampung	431	300	731
Total	1.878	4.820	6.698

¹Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang

Sumber: data diolah dari Rencana Usaha Penediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2019-2028

Kondisi permintaan dan jumlah sumber daya batubara di wilayah Sumatera Selatan yang masih sangat besar tersebut membuat Perseroan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan, yang memiliki pengalaman panjang dan mampu menjaga hubungan baik dengan mitra, memiliki prospek usaha yang sangat terjaga.

7. Setiap Kecenderungan yang Signifikan

Pendapatan Perseroan memiliki kecenderungan terkorrelasi terhadap harga komoditas tambang khususnya batubara. Dimana penurunan permintaan batubara akan mengakibatkan penurunan pada *volume* pekerjaan dan pendapatan perseroan. Rendahnya tingkat utilitas akibat penurunan beban kerja tersebut dapat berdampak penurunan tingkat profitabilitas perseroan.

8. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan senantiasa menyelaraskan kegiatan usaha dengan kegiatan sosial yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial / *corporate social responsibilities* ("CSR") Perseroan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Realisasi program CSR Perseroan meliputi:

- Melibatkan karyawan Perseroan dalam penyelenggaraan acara sosial, seperti dalam menyelenggarakan bantuan untuk korban bencana alam.
- Menyediakan fasilitas dana Perseroan yang dapat digunakan untuk membantu karyawan dan keluarga karyawan, terutama dalam pembayaran uang pangkal sekolah, biaya rumah sakit dan pemberian fasilitas transportasi.
- Memberikan dana bantuan untuk desa dalam rangka hari raya Qurban dan memberikan THR pada saat hari raya Idul Fitri.
- Menerima siswa dan mahasiswa yang melakukan tugas Magang.
- Menerima kunjungan mahasiswa dalam rangka studi lapangan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



IX. INDUSTRI BATUBARA

Perkembangan Ekonomi

Situasi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 lalu masih mengalami tekanan yang berasal dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok sejak tahun 2018. International Monetary Fund (IMF) mencatatkan pertumbuhan perekonomian global tahun 2019 hanya mencapai 2,9% atau masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 3,6%. Perlambatan pertumbuhan perekonomian tersebut tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi negara maju maupun berkembang yang secara bersamaan mengalami perlambatan.

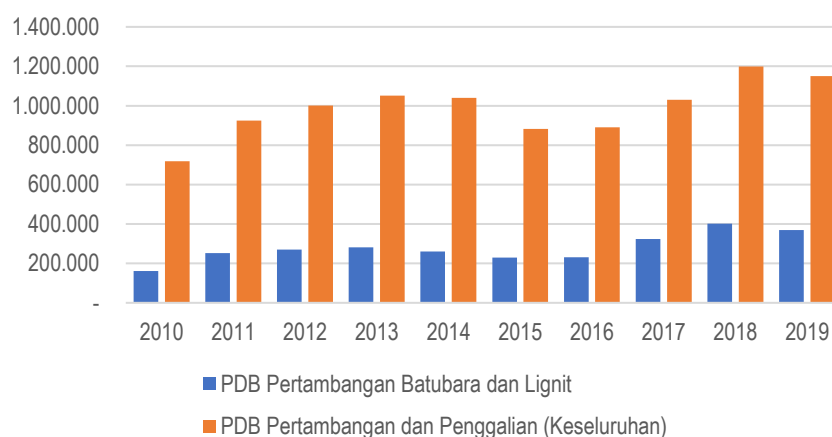
Seiring dengan melemahnya kondisi perekonomian global, perekonomian Indonesia juga menunjukkan sedikit perlambatan dengan daya tahan yang cukup baik yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilihat berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 5,02% atau menurun dibanding posisi akhir tahun 2018 yang sebesar 5,17%. Selain itu, tingkat inflasi di tahun 2019 pun cukup terkendali di level rendah dan stabil yang menjadi pendukung stabilitas perekonomian Indonesia. Inflasi pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,7% atau turun dari tingkat inflasi 2018 yang sebesar 3,1%.

Kondisi perekonomian global di tahun 2020 semakin memburuk akibat penyebaran wabah Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian, seiring dengan upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19 ini dengan terus melakukan pengembangan terhadap vaksin Covid-19, diharapkan perekonomian dunia akan dapat pulih kembali pada tahun 2021.

Produk Domestik Bruto (PDB) Pertambangan

Selama beberapa tahun terakhir PDB dari sektor pertambangan mengalami pertumbuhan, dimana PDB sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp718,13 triliun dan meningkat menjadi Rp1.149,91 triliun pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, PDB dari subsektor Pertambangan Batubara dan Lignit pada tahun 2015 menyumbang sebesar Rp160,73 triliun dan meningkat menjadi Rp368,89 triliun pada tahun 2019.

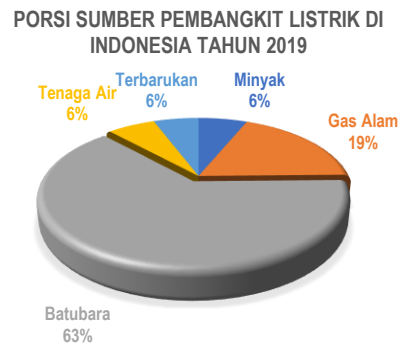
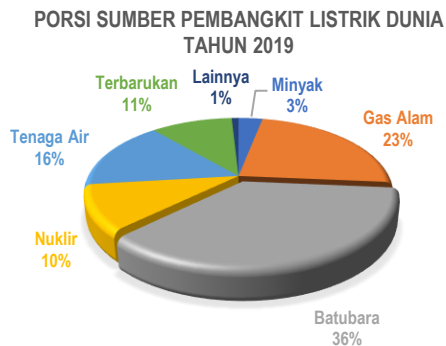
Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian 2010-2019 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Tinjauan Industri Batubara

Batubara masih menjadi sumber terbesar pembangkit energi listrik di dunia. Per tahun 2019, sebanyak 9.824,1 terawatt-hours listrik di dunia masih menggunakan batubara sebagai bahan pembangkit listriknya. Negara-negara yang dominan dalam menyumbang penggunaan batubara sebagai pembangkit listrik tersebut ialah Tiongkok dan India. Di Indonesia sendiri penggunaan batubara sebagai bahan pembangkit listrik juga sangat dominan yaitu sebesar 177 terawatt-hours atau menyumbang sebesar 63% dari total seluruh sumber listrik di Indonesia.

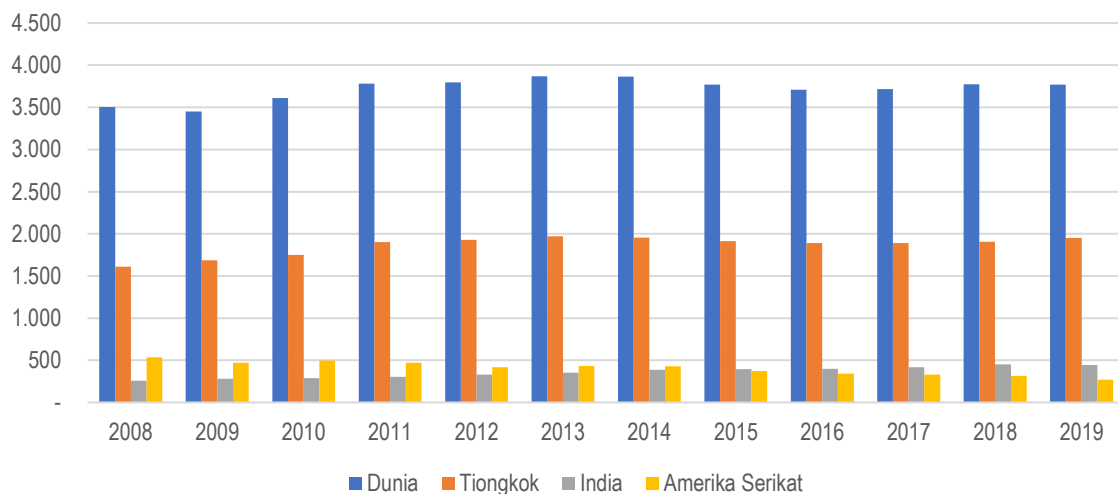


Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2020

Pertumbuhan Konsumsi Batubara

Berdasarkan data dari BP Statistical Review of World Energy 2020, sejak tahun 2008 hingga tahun 2019 tren konsumsi batubara di AS tercatat menunjukkan penurunan. Namun, secara umum konsumsi batubara secara global masih cukup stabil, terutama konsumsi batubara di Tiongkok dan India yang merupakan negara tujuan utama ekspor batubara Indonesia juga masih stabil.

Perkembangan Konsumsi Batubara (dalam Juta Ton Minyak)



Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2020

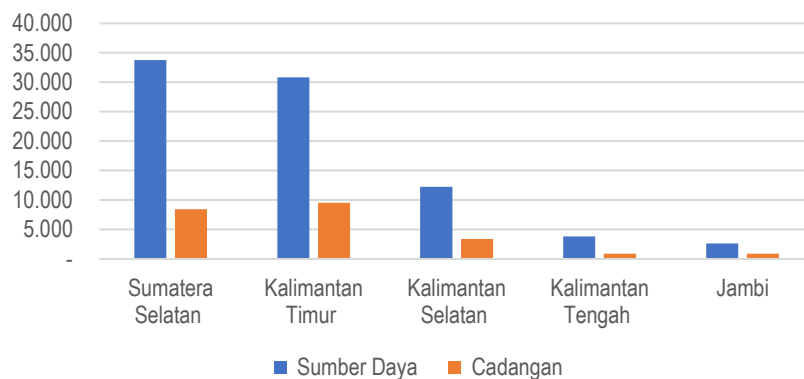
Saat ini, hasil tambang batubara Indonesia masih didominasi untuk keperluan ekspor, sedangkan penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 22-28% dari hasil produksi batubara setiap tahunnya (Laporan Kinerja Ditjen Minerba, 2019). Konsumsi batubara dalam negeri sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain menjadi sumber pembangkit listrik utama di Indonesia, saat ini batubara juga digunakan di industri semen, pupuk, tekstil, kertas, metalurgi, dan briket. Dari tahun 2014 hingga saat ini, konsumsi batubara dalam negeri terus mengalami peningkatan dan diproyeksikan akan tetap mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan untuk pemenuhan program penambahan kapasitas listrik oleh pemerintah sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028.

Industri Batubara Sumatera Selatan

Berdasarkan data dari Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2020, total sumber daya batubara di Indonesia per tahun 2019 berjumlah 88,34 miliar ton dan total cadangan batubara di Indonesia sebesar 25,07 miliar ton. Jumlah sumber daya batubara tersebut diperkirakan akan mampu untuk mencukupi keperluan konsumsi dalam negeri dan permintaan negara tujuan ekspor Indonesia selama lebih dari 50 tahun mendatang.



Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Indonesia (dalam Juta Ton)



Sumber: Data diolah dari Buku Bauran Energi Nasional 2020

Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki sumber daya batubara terbesar di Indonesia. Saat ini sumber daya batubara di Sumatera Selatan sebesar 33,75 miliar ton dan cadangan sebesar 8,46 miliar ton. Kualitas batubara di daerah Sumatera Selatan didominasi oleh batubara dengan kalori rendah dan menengah yaitu sekitar 4.022-7.714 kal/gar. Batubara dari daerah Sumatera Selatan tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan sumber energi PLTU di wilayah Sumatera dan Jawa.

Dukungan Pemerintah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memberi kepastian perpanjangan kontrak kepada perusahaan pertambangan, khususnya batubara. Dengan adanya kepastian hukum terkait kontrak penambangan, membuat pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi lebih terjamin. Hal tersebut juga dapat berdampak positif bagi Perseroan sebagai penyedia jasa pertambangan dalam mendapatkan kontrak kerja baru.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020, Kementerian ESDM memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan terkait kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) minimal 25 persen dari rencana produksi batubara pada 2020 atau sebesar 155 juta ton. Alokasi tersebut dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri dan industri melalui pengembangan batubara cair dan gasifikasi batubara serta pemanfaatan batubara sebagai bahan baku Dimethyl Ether (DME).

Saat ini, beberapa perusahaan BUMN juga sedang mempersiapkan proyek gasifikasi batubara di wilayah Sumatera yang juga mendapat dukungan dari pemerintah melalui Kementerian ESDM karena diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah batubara serta mengurangi impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Proyek ini dapat menyerap produksi batubara dengan kalori rendah yang sesuai dengan karakteristik batubara di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk bahan pembangkit listrik.



Halaman ini sengaja dikosongkan



X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sains Idris berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia masing-masing dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.000	5.000	5.000	5.000
Cadangan umum	1.000	1.000	-	-
Saldo laba	263.511	265.679	254.245	239.105
Penghasilan komprehensif lain	6.725	6.818	6.777	6.690
Jumlah Ekuitas	276.236	278.496	266.023	250.795

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 10 tanggal 2 September 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0066428.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391211 tertanggal 25 September 2020, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391212 tertanggal 25 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161673.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020. Pemegang Saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula nilai nominal saham sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp2,- (dua Rupiah);
2. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham.
3. Persetujuan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Cadangan Umum	Saldo Laba	Penghasilan komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020	5.000	-	1.000	263.511	6.725	276.236
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2020						
Penawaran Umum sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan harga penawaran Rp118 per saham	600	34.800	-	-	-	35.400
Hasil konversi utang	678	39.322	-	-	-	40.000
Perkiraan biaya emisi	-	(4.744)	-	-	-	(4.744)
Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum	6.278	69.378	1.000	263.511	6.725	346.892



Halaman ini sengaja dikosongkan



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seterusnya, Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas tahunan sebesar sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun, atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Sesuai Pasal 71 UUPT, laba bersih yang dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT, dimana Perseroan telah menyisihkan laba sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atau 20% dari total modal disetor saat ini.

Perseroan telah membagikan dividen pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang masing-masing nilainya sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah), dan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).



Halaman ini sengaja dikosongkan



XII. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan". Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Surya Fajar Sekuritas	300.000.000	35.400.000.000	100%
	Total	300.000.000	35.400.000.000	100%

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp118 setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industry yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Mirawati Sensi Idris

Solis Building

Jl. Arjuna Utara No. 10, Blok A Kav 10,

Jakarta Barat, 11470, Indonesia

Telp. : (021) – 29501180

Fax. : (021) – 29501166

Idris Jono, selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.AP-104/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 034/II/2020/IDR/MSId-A tanggal 18 Februari 2020 dan No. 073/VI/2020/IDR/MSId-A tanggal 19 Juni 2020.

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : Nasoetion & Atyanto (N&A)

Equity Tower 26th

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD

Jakarta, 12190, Indonesia

Telp. : (021) – 51400311, (021) 51400312

Fax. : (021) – 51400313

Genio Yudha Wibowo Atyanto, selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-61/PM/22/2018 tanggal 23 April 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Nomor 201209.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Nomor Ref.: OPR-20-0474 tertanggal 21 Agustus 2020.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Notaris : Jose Dima Satria, S.H, M.Kn

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp : (021) – 29125500

Nomor STTD : STTD.N-90/PM.22/2018

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 1487/JDS/VII/2019 tanggal 27 Juli 2020.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.



4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240
Telp : (021) – 29745222
Fax : (021) - 29289961
No. Ijin Usaha : KEP-41/D.04/2014
Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat PW-041/UN/022020 tanggal 19 Februari 2020.

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.



XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No.10/2020. Anggaran dasar perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 serta UUPT.

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalian, pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah, konstruksi, pengangkutan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan ketenagakerjaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
 - b) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
 - c) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; dan
 - d) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a) Pertambangan Batu Bara;
 - b) Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya;
 - c) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
 - d) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
 - e) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya;
 - f) Konstruksi Gedung Lainnya;
 - g) Konstruksi Jalan Raya;
 - h) Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
 - i) Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas;
 - j) Penyiapan Lahan;
 - k) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;
 - l) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;
 - m) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; dan
 - n) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu

B. Ketentuan yang Mengatur mengenai Perubahan Permodalan

Perseroan dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk peraturan dan ketentuan OJK dan Bursa, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan



- f) dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari Anggaran Dasar Perseroan.
4. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
- a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham -yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga



- modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi;
- e) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

7. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

C. Ketentuan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a) RUPS Tahunan;
 - b) RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya -dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a) Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b) Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c) Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d) Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
 - e) Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut diatas, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Anggaran Dasar.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b) Dewan Komisaris
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan



persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS

12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
13. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan, serta wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan poin di atas, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
16. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
18. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan diterima Direksi.
19. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
20. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
21. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
22. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan lain.
23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
24. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

D. Ketentuan Mengenai Saham:

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.



3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham .
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

E. Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Ringkasan Ketentuan dalam Anggaran Dasar yang Berkaitan dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.



4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tidak berwenang:
 - a) menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan; atau
 - b) Lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.
15. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
17. a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
18. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.



Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

19. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVI. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Surya Fajar Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut



akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;



- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 - 4 Maret 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41/2020.



Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya dibatasi dengan minimal sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pada tanggal 4 Maret 2021.

I. Penjatahan Terpusat

Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

II. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan.



8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website **www.e-ipo.co.id**.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Surya Fajar Sekuritas

Satrio Tower Lt. 9, Unit 5,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Mega Kuningan

Jakarta Selatan 12950

Telepon: (021) 2788 3989

Faksimili: (021) 2788 3990

www.sfsekuritas.co.id



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Nasoetion & Atyanto (N&A)

No.: 003/PSH-UN/NA/II/2021

Jakarta, 25 Februari 2021

Kepada Yang Terhormat,

PT ULIMA NITRA TBK

Jl. Betet No. 28, RT.22

Palembang 30113, Indonesia

U.p. Direksi

**Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Ulima Nitra Tbk Dalam Rangka
Penawaran Umum Perdana Saham**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-61/PM.22/2018 tanggal 23 April 2018, dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 201209, keduanya atas Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH, berkantor di firma hukum Nasoetion & Atyanto, telah ditunjuk oleh PT Ulima Nitra Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan surat Perseroan No. OPR-20-0474 tanggal 24 Agustus 2020, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan menyusun Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ("**Laporan Uji Tuntas**" atau "**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan, sejumlah 300.000.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp2,00 setiap saham yang mewakili sebanyak 9,56% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana**") kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp118 setiap saham serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp35.400.000.000.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana tersebut akan termasuk program *employee stock allocation* ("**ESA**") sebanyak 3,21% atau 9.626.100 saham dari total seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana. Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan perjanjian utang dengan opsi konversi senilai Rp40.000.000.000 ("**Utang Konversi**") oleh PT Surya Fajar Capital Tbk ("**SFC**") sebesar 233.050.800 saham dan PT Surya Fajar Corpora ("**SFCO**") sebesar 105.932.200 saham yang akan dilaksanakan pada tanggal penjabatan sampai dengan tanggal pencatatan dengan jumlah total sebanyak 338.983.000 saham atau setara dengan 10,80% dari seluruh total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Utang Konversi ini dilakukan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan sama dengan harga Penawaran Umum Perdana yaitu pada harga Rp118, maka SFC dan SFCO tidak terkena pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (**"POJK 25/2017"**).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (a) menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Ulima Nitra Tbk No. 24 tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana diubah berdasarkan Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Ulima Nitra Tbk No. 129 tanggal 29 Januari 2021, dan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Ulima Nitra Tbk No. 208 tanggal 22 Februari 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek; dan
- (b) menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Ulima Nitra Tbk No. 23 tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana diubah berdasarkan Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Ulima Nitra Tbk No. 128 tanggal 29 Januari 2021, dan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Ulima Nitra Tbk No. 207 tanggal 22 Februari 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan surat No. S-08066/BEI.PP1/12-2020 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ulima Nitra Tbk, tanggal 23 Desember 2020.

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai modal kerja (biaya operasional) Perseroan.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang kami berikan sebelumnya dalam surat kami 002/PSH-UN/NA/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan Uji Tuntas terhadap Perseroan berdasarkan Uji Tuntas terhadap Perseroan atas dokumen-dokumen, konfirmasi lisan dan tertulis yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dengan No. Ref.: 005/LUT-UN/NA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut (tanpa dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), yaitu:

- (i) seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, serta fotokopi dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya;
- (ii) seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan kepada kami oleh Perseroan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja atau tidak, serta tidak ada dokumen material lainnya yang tidak diberikan atau diberitahukan kepada kami;
- (iii) dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan tersebut tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas;
- (iv) para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
- (v) pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga (di luar Perseroan) di dalam membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dengan Perseroan merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (vi) pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut; dan
- (vii) seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan asumsi serta kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dan setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, kami berpendapat bahwa:

1. MENGENAI PERSEROAN

- (a) Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tanggal 25 Agustus 1992, dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, SH, Notaris di Palembang (**"Akta Pendirian"**). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. C2-2811.HT.01.01.Tahun 1993 tanggal 5 Mei 1993 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 di bawah agenda No. 37./1993/PT. Akta Pendirian telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3515 dan No. 62 tanggal 3 Agustus 1993.
- (b) Anggaran dasar perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam akta-akta berikut ini:
 - (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 213 tanggal 24 Juni 2008, dibuat di hadapan Heniwati Ridwan SH, Notaris di Palembang (**"Akta 213/2008"**), telah dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akta 213/2008 telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) berdasarkan Surat No. AHU-44469.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063019.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008. Akta 213/2008 telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 26 dan No. 9046 tanggal 31 Maret 2009.

Berdasarkan persetujuan membuka kredit tanggal 23 Maret 2001 No. 063/021/KRD/PLG/2001 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.1 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Isnie Agustina Mahardika, SH, Mkn, Notaris di Palembang antara Perseroan PT Bank BCA Tbk (**"Bank BCA"**) (**"Akta Fasilitas BCA"**), Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa hal tanpa adanya persetujuan dari Bank, antara lain, perubahan anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta 213/2008 telah diberitahukan dan dimintakan persetujuan dan ratifikasinya kepada Bank BCA berdasarkan surat Perseroan No. FNC-20-169 tanggal 10 Agustus 2020.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 18 Februari 2019, dibuat di hadapan Heniwati Ridwan SH, Notaris di Palembang ("**Akta 43/2019**"), telah dilakukan perubahan Pasal 3 sehubungan dengan maksud dan tujuan.

Akta 43/2019 yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0012585.AH.01.02.Tahun 2019 Tanggal 08 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, di bawah agenda No. AHU-0038456.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019. Akta 43/2019. Akta 43/2019 telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15516 dan No. 43 tanggal 28 Mei 2019.

Berdasarkan Akta Fasilitas BCA dan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 97 tanggal 25 September 2014 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, SH, Notaris di Palembang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ketujuh atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 347/PFPA-DBSI/VII/3-4/2019 tanggal 29 Juli 2019 antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia ("**Bank DBS**") ("**Akta Fasilitas DBS**"), Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa hal tanpa adanya persetujuan dari Bank, antara lain, perubahan anggaran dasar termasuk namun tidak terbatas pada struktur permodalan dan susunan pengurus.

Perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta 43/2019 telah memperoleh persetujuan dan diratifikasi oleh (i) Bank DBS berdasarkan Surat Bank DBS No. 131/BG-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 ("**Surat Bank DBS**") dan telah diberitahukan dan diminta persetujuan dan ratifikasinya kepada Bank BCA berdasarkan surat Perseroan No. FNC-20-169 tanggal 10 Agustus 2020.

- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 49 tanggal 14 Agustus 2019 ("**Akta 49/2019**"), dibuat di hadapan Isnie Agustina Mahardika SH, Mkn, Notaris di Palembang, telah dilakukan perubahan Pasal 3 sehubungan dengan penambahan maksud dan tujuan.

Akta 49/2019 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0057182.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147768.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2019. Akta 49/2019 telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 70 Tanggal 30 Agustus 2019.

Berdasarkan Akta Fasilitas DBS dan Akta Fasilitas BCA, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa hal tanpa adanya persetujuan dari Bank, antara lain, perubahan anggaran dasar tentang struktur permodalan dan susunan pengurus.

Perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta 43/2019 telah memperoleh persetujuan dan diratifikasi oleh (i) Bank DBS berdasarkan Surat Bank DBS dan telah diberitahukan dan diminta persetujuan dan ratifikasinya kepada Bank BCA berdasarkan surat Perseroan No. FNC-20-169 tanggal 10 Agustus 2020.

(iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 2 September 2020 ("**Akta 10/2020**"), dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

- a. perubahan nilai nominal saham (*stock split*);
- b. perubahan peningkatan modal dasar Perseroan;
- c. perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Ulima Nitra Tbk;
- d. pengeluaran saham dalam simpanan (pertopel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 9,56% dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah Penawaran Umum, masing-masing saham bernilai Rp2, melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, termasuk di dalamnya saham hasil konversi atas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman dengan opsi konversi yang telah ditandatangani antara Perseroan dan PT Surya Fajar Capital, Tbk dan PT Surya Fajar Corpora tertanggal 26 Juni 2020, yang dapat dikonversikan menjadi saham sebanyak-banyaknya 15% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana;
- e. pelaksanaan *program employee stock allocation* dan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10% atau sebanyak-banyaknya 100.000.000 saham dari total seluruh saham yang akan ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana;
- f. peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;

- g. penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 15/2020**”); dan
- h. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”).

Akta 10/2020 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0066428.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161673.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 25 September 2020. Akta 10/2020 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391211 tanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161673.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”), perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal (A) efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau (B) dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan perjanjian kredit berikut yang dibuat Perseroan selaku penerima pinjaman:

- (i) Akta Fasilitas DBS;
- (ii) Akta Fasilitas BCA;
- (iii) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Receivables Financing* – 1 No. 13 tanggal 8 November 2019 yang dibuat di hadapan Juhaidi, SH, Notaris di Palembang dengan PT Bank Mandiri Tbk (“**Akta Fasilitas 1 Mandiri**”);
- (iv) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Receivables Financing* – 2 No. 14 tanggal 8 November 2019 yang dibuat di hadapan Juhaidi, SH, Notaris di Palembang dengan PT Bank Mandiri Tbk (“**Akta Fasilitas 2 Mandiri**”);

- (v) Perjanjian Fasilitas Non *Cash Loan* No. CRO.PLG/0004/NCL/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Adendum ke-8 Perjanjian Non *Cash Loan* No. CRO.PLG/0004/NCL/2011 tanggal 8 November 2019 ("**Akta Fasilitas Kredit 3 Mandiri**"); dan
- (vi) Akta Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik (IMBT) No. 114 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, SH, Notaris di Palembang dengan PT Bank Permata, Tbk ("**Akta Pembiayaan Permata**").

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa hal tanpa adanya persetujuan dari pemberi pinjaman, antara lain:

- (i) perubahan anggaran dasar tentang struktur permodalan, susunan pengurus; dan
- (ii) perubahan susunan pemegang saham, susunan anggota direksi dan/atau dewan komisaris.

Perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta 10/2020 telah memperoleh persetujuan dan diratifikasi oleh (i) Bank DBS berdasarkan Surat Bank DBS dan (ii) Bank BCA berdasarkan surat Bank BCA No. 133/SBK/VI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 (iii) Bank Mandiri berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM1.PLB/SPPK/387/2020 tanggal 30 September 2020 dan (ii) Bank Permata berdasarkan surat Bank Permata No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020. Persetujuan dan ratifikasi yang diberikan oleh Bank DBS, Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank Permata akan berlaku sampai dengan perjanjian antara Perseroan dengan masing-masing bank tersebut berakhir.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembatasan terkait perubahan anggaran dasar terkait susunan pemegang saham sebagaimana diatur berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit, telah disesuaikan oleh (i) Bank DBS berdasarkan Surat Bank DBS menjadi "*nasabah apabila perubahan tersebut terhadap lebih dari 30% jumlah saham dengan hak suara sah atau persentase lainnya yang berakibat kepada berubahnya pengendalian atas Nasabah*", (ii) Bank BCA berdasarkan surat Bank BCA No. No. 133/SBK/VI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi "*nasabah wajib mempertahankan persentase kepemilikan saham Ibu Jati Simina/keluarganya minimal 60% atau kepemilikan saham mayoritas harus tetap Ibu Jati Simina/keluarganya*", (iii) Bank Mandiri berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM1.PLB/SPPK/387/2020 tanggal 30 September 2020 menjadi "*nasabah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri apabila nasabah akan melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas*" dan (ii) Bank Permata berdasarkan surat Bank Permata No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9

Oktober 2020 tidak lagi mempersyaratkan pemberitahuan apabila terjadi perubahan pemegang saham dalam Perseroan. Perubahan-perubahan tersebut akan terus berlaku sampai dengan perjanjian antara Perseroan dengan masing-masing bank tersebut berakhir.

Seluruh perubahan anggaran dasar telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 10/2020 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020 dan POJK 33/2014 sebagaimana dipersyaratkan bagi Perusahaan Terbuka.

- (c) Maksud dan tujuan dari Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalian, pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah, pengangkutan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan ketenagakerjaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha di bidang Informasi dan komunikasi yang meliputi:

- (i) aktivitas penunjang pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
- (ii) aktivitas Pertambangan dan Penggalian lainnya;
- (iii) penyewaan alat konstruksi dengan operator;
- (iv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (i) penunjang pertambangan Batu Bara;
- (ii) penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
- (iii) pengumpulan air limbah berbahaya;
- (iv) pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
- (v) pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya;
- (vi) konstruksi gedung lainnya;
- (vii) konstruksi jalan raya;
- (viii) pembuatan/pengeboran sumur air tanah;

- (ix) konstruksi bangunan pengelolaan dan penampungan barang minyak dan gas;
- (x) penyiapan lahan;
- (xi) pemasangan fondasi dan tiang pancang;
- (xii) angkutan bermotor untuk barang khusus;
- (xiii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- (xiv) aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa-menyewa peralatan. Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Bidang usaha Perseroan juga telah sesuai dengan KBLI 2017 sebagaimana telah terdaftar dalam NIB Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres 44/2016**"), Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

Bidang usaha Perseroan, yaitu jasa pertambangan, merupakan bidang usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres 44/2016, sehingga bidang usaha Perseroan termasuk dalam bidang usaha yang terbuka atau bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam bidang penanaman modal.

- (d) Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 10/2020 yaitu sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp20.000.000.000, terbagi atas 10.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp2; dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp5.000.000.000, terbagi atas 2.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp2.

Berdasarkan Akta 10/2020, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta 10/2020, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp80		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000	
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u>			
1. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15
2. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15
3. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5
4. Mertty Tjokro	125.000.000	250.000.000	5
5. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5
6. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perseroan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan Perseroan tersebut telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyeteroran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Para pemegang saham Perseroan telah menyetor penuh permodalan dalam Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan struktur permodalan telah merefleksikan jumlah total permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan Perseroan yang terakhir.

- (e) Berdasarkan pada definisi pengendali perusahaan terbuka pada Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang menyatakan bahwa Pengendali Perusahaan terbuka, adalah pihak, dalam hal ini merupakan kelompok yang terorganisasi, yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka, maka Perseroan dikendalikan oleh Jati Simina dan/atau keluarganya.
- (f) Pemilik manfaat Perseroan adalah (i) Jati Simina, (ii) Burhan Tjokro, (iii) Ulung Wijaya, (iv) Merty Tjokro, (v) Tuti Nuarni, dan (vi) Mertje Tjokro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"). Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Perpres 13/2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- (g) Perseroan telah memiliki Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 November 2020 dan Perseroan telah menyimpan Daftar Khusus per tanggal 24 November yang telah sesuai dengan UUPT.
- (h) Berdasarkan Akta 10/2020, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Burhan Tjokro

Direktur Keuangan : Ulung Wijaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mertje Tjokro

Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten

Atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (i) Perseroan telah memenuhi (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit; (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2015 Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- (j) Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkan Pendapat Hukum ini.
- (k) Perseroan telah melakukan kewajiban yang timbul berdasarkan izin-izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usahanya, kecuali untuk Laporan SIUP.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ("**Peraturan SIUP**"), apabila diperlukan oleh Menteri atau Pejabat Penerbit SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya. Namun, Peraturan SIUP tidak mengatur apabila Perseroan tidak melakukan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perseroan tidak dikenakan sanksi apa pun sehubungan dengan tidak dilaksanakannya pelaporan kepada pejabat penerbit SIUP.

- (l) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Februari 2021 ("**Surat Pernyataan**"), Perseroan memiliki kewajiban utang pajak yang belum dilaksanakan, yaitu:

No.	Jenis Pajak	Masa Pajak	Jumlah	Jatuh Tempo
1	PPh Pasal 21	Februari 2021	314.488	10 Maret 2021
2	PPh Pasal 23	Februari 2021	36.329.443	10 Maret 2021
4	PPh Pasal 25 dimuka	Februari 2021	207.200	10 Maret 2021
TOTAL Hutang Pajak			36.851.131	

Utang Pajak tersebut tidak memiliki dampak material bagi Perseroan dan merupakan utang pajak kegiatan usaha yang wajar bagi Perseroan dan akan selalu dilunasi setiap tanggal jatuh tempo.

- (m) Perjanjian-perjanjian penting yang material bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (n) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (o) Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan WLTk yang masih berlaku sampai dengan 5 November 2021, Peraturan Perusahaan yang masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Desember 2022, keanggotaan di BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, pemenuhan upah minimum regional dan lembaga kerja sama bipartit.
- (p) Perseroan memiliki/menguasai aset berupa (i) mesin dan alat berat, (ii) kendaraan bermotor dan (iii) tanah dan bangunan yang dilengkapi dengan dokumen pemilikan/penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku. Aset-aset tersebut tidak sedang dalam dijaminkan, kecuali untuk sebagian aset tetap berupa tanah dan bangunan dan peralatan alat berat. Aset-aset yang dijaminkan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jaminan yang sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku, yaitu untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan dijaminkan dengan hak tanggungan dan untuk peralatan berat dan kendaraan bermotor dijaminkan dengan fidusia. Aset-aset tersebut tidak sedang dalam sengketa.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Pernyataan Perseroan, apabila aset-aset yang dijaminkan dieksekusi maka dapat berdampak material kepada kegiatan usaha Perseroan, mengingat aset-aset yang dijaminkan umumnya aset-aset produktif yang digunakan untuk keperluan produksi dan operasional.

- (q) Perseroan memiliki asuransi yang mencakup aset-aset yang material bagi Perseroan yang mana asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti kerugian terhadap aset-aset Perseroan dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
- (r) Perseroan telah melakukan satu pendaftaran hak merek No. JID2020052065 tanggal 8 September 2020 dengan merek Ulima Nitra. Namun, sertifikat atas merek tersebut belum diterbitkan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran, sehingga sejak tanggal 8 September 2020 merek Ulima Nitra sudah memperoleh perlindungan hukum apabila terdapat pihak lain yang menggunakan merek Ulima Nitra tersebut.

- (s) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dan tidak ada somasi/klaim dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (t) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan yang sedang terlibat dan tidak ada somasi/klaim dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (u) Pengungkapan dalam Bab VIII Riwayat Singkat Perseroan dari Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas kami.
- (v) Pelaksanaan penysetoran atas saham sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana akan dilakukan dalam bentuk uang dan konversi Utang Konversi. Utang Konversi ini akan dilakukan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan sama dengan harga Penawaran Umum Perdana yaitu pada harga Rp118, maka SFC dan SFCO tidak terkena pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK 25/2017**"). Pelaksanaan konversi Utang Konversi telah diumumkan dalam Surat Kabar Sumatera Express pada tanggal 17 Februari 2021 dan Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 43 UU PT, pengeluaran saham baru sehubungan dengan konversi Utang Konversi tidak wajib untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi yang sama, dalam hal mana konversi Utang Konversi telah disetujui RUPS Perseroan dalam Akta 10/2010.

- (w) Pelaksanaan *program employee stock allocation* wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- (x) Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib paling sedikit mengungkapkan: (i) seluruh dana yang telah diperoleh; (ii) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum; (iii) dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya; dan (iv) dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (y) Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (z) Dalam hal penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Selanjutnya, apabila mengacu pada Pasal 8 POJK 42/2020 dan Pasal 13 POJK 17/2020 dikecualikan dari kewajiban untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 apabila penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan (biaya operasional), namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi penggunaan dana sebagai modal kerja (biaya operasional) Perseroan tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

- (a) Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
- (b) Penawaran Umum Perdana baru dapat dilaksanakan apabila Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Perseroan telah menjadi efektif;
- (c) Pendapat kami sehubungan dengan “izin-izin penting” dan “perjanjian-perjanjian penting dan material” adalah sejauh izin-izin dan perjanjian-perjanjian tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan;
- (d) Dalam proses Uji Tuntas, kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**Standar Profesi HKHPM**”) dan POJK 53/2017. Mengacu pada Standar Profesi HKHPM, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan “Prinsip Keterbukaan” dan “Prinsip Materialitas” dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha;
- (e) Pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap Perseroan sebagai badan hukum Indonesia;
- (f) Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum di dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini;

- (g) Pendapat Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana yang di luar lingkup hukum, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami; dan
- (h) Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami sampaikan selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

NASOETION & ATYANTO



Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH

STTD: No. STTD.KH-61/PM.22/2020

Tembusan

- Ketua Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, OJK
- PT Bursa Efek Indonesia u.p. Direksi



XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Idris Jono, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

PT Ulima Nitra Tbk

Laporan Keuangan/

Financial Statements

Pada Tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017

Serta untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2020
dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019, 2018 dan 2017/

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017

and for the Six-Month Periods Ended June 30, 2020

and 2019 (unaudited) and for the Years Ended

December 31, 2019, 2018 and 2017

Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Ulima Nitra Tbk pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017/*The Directors' Statement on the Responsibility for Financial Statements of PT Ulima Nitra Tbk as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the Six-Month Periods Ended June 30, 2020 and 2019 (unaudited) and for the Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017*

LAPORAN KEUANGAN - Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017/

FINANCIAL STATEMENTS - *As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the Six-Month Periods Ended June 30, 2020 and 2019 (unaudited) and for the Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	4
Laporan Perubahan Ekuitas/ <i>Statements of Changes in Equity</i>	5
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	8
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	9

Branch Office:Solis Building
Jl. Arjuna Utara No. 10 Blok A Kav 10
Jakarta Barat – 11470
INDONESIA

T +62 21 2950 1180

F +62 21 2950 1166

Laporan Auditor Independen**No. 00008/3.0341/AU.1/05/0323-2/1/II/2021****Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi****PT Ulima Nitra Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Ulima Nitra Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report**No. 00008/3.0341/AU.1/05/0323-2/1/II/2021****The Stockholders, Board of Commissioners and Directors****PT Ulima Nitra Tbk**

We have audited the accompanying financial statements of PT Ulima Nitra Tbk, which comprise the statements of financial position as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and the statements of profit and loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Ulima Nitra Tbk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Audit Independen No. 00004/3.0341/AU.1/05/0323-2/1/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebelum penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan informasi tambahan.

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 38 atas laporan keuangan, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan PT Ulima Nitra Tbk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dengan disertai beberapa perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Ulima Nitra Tbk as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and its financial performance and cash flows for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

We have previously issued Independent Auditor's Report No. 00004/3.0341/AU.1/05/0323-2/1/I/2021 dated January 29, 2021 on the financial statements of the Company as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, prior to the reissuance of the financial statements relating to the additional information disclosure.

As explained in Note 38 to the financial statements, pertain to the Company's plan for initial public offering, management has reissued the financial statements of PT Ulima Nitra Tbk for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 with several changes or additional presentation and disclosure in the notes to the financial statements.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Ulima Nitra Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk, digunakan untuk tujuan lain.

This report is prepared solely for inclusion in the offering prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Ulima Nitra Tbk on Indonesia Capital Market, and it is not intended to be and should not be used for any other purposes.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Idris Jono

Izin Akuntan Publik No. AP 0323/*Certified Public Accountant License No. AP 0323*

8 Februari 2021/*February 8, 2021*

Branch Office:Solis Building
Jl. Arjuna Utara No. 10 Blok A Kav 10
Jakarta Barat – 11470
INDONESIA

T +62 21 2950 1180

F +62 21 2950 1166

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim**No. 00004/3.0341/AK/05/0323/1/II/2021****Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi****PT Ulima Nitra Tbk**

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT Ulima Nitra Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 30 Juni 2019 (tidak disajikan dalam laporan ini), serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, laporan perubahan ekuitas interim, dan laporan arus kas interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan serta catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas laporan keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang dari pada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim PT Ulima Nitra Tbk tanggal 30 Juni 2019 serta kinerja keuangan interim dan arus kas interimnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Report on Review of Interim Financial Information**No. 00004/3.0341/AK/05/0323/1/II/2021****The Stockholders, Board of Commissioners and Directors****PT Ulima Nitra Tbk**

We have reviewed the accompanying interim financial statements of PT Ulima Nitra Tbk, which comprise the interim statement of financial position as of June 30, 2019 (not presented herein), and the interim statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the six-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these interim financial statements based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial statements consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim financial statements do not present fairly, in all material respects, the interim financial position of the PT Ulima Nitra Tbk as of June 30, 2019 and its interim financial performance and cash flows for the six-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Ulima Nitra Tbk di Pasar Modal Indonesia serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk, digunakan untuk tujuan lain.

Other matter

This report has been issued solely for inclusion in the prospectus in connection with the initial public offering of the equity securities of the PT Ulima Nitra Tbk on Indonesia Capital Market, and it is not intended and should not be used for other purposes.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Idris Jono

Izin Akuntan Publik No. AP 0323/Certified Public Accountant License No. AP 0323

8 Februari 2021/February 8, 2021



PT. ULIMA NITRA

General Construction, Mining Contractor and Rental Equipment



SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN
2019 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
PT ULIMA NITRA Tbk

THE DIRECTORS' STATEMENT ON THE
RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS
AS OF JUNE 30, 2020, DECEMBER 31, 2019, 2018
AND 2017 AND FOR SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2020 AND 2019 (UNAUDITED) AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019,
2018 AND 2017
PT ULIMA NITRA Tbk

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama/Name

: Burhan Tjokro

Alamat Kantor/Office Address

: Jl. Betet No. 28 RT. 22
Palembang 30113

Alamat sesuai dengan Kartu Identitas
Pribadi/Residential address/in accordance with Personal
Identity Card

: Jl. Kutilang No. 3 RT/RW.024/004 Ilir Timur Tiga
Palembang

Nomor Telepon/Telephone Number

: 0711 - 365157

Jabatan/Title

: Direktur Utama/President Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements.
2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully completely and properly disclosed in the financial statements, and
b. The financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Directors:

08 Februari 2021/February 08, 2021




Burhan Tjokro
Direktur Utama/President Director

Head Office :
Jl. Betet No. 28 Rt. 22
Palembang 30113, Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 365157, 365158, 365580
Fax. : 0711 - 359469
e-mail : info@ulimanitra.co.id

Workshop Musi Dua :
Jl. Raya Palembang - Tanjung Raya Km.08
Palembang - Sumatera Selatan
e-mail : musi2@ulimanitra.co.id

PT ULIMA NITRA Tbk
Laporan Posisi Keuangan
30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Statements of Financial Position
June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
			2019	2018	2017	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	7.015.557.148	11.917.432.793	20.701.902.534	4.744.972.363	Cash and cash equivalents
Piutang usaha						Trade accounts
pihak ketiga - setelah						receivable from third
dikurangi cadangan						parties - net of allowance
kerugian penurunan nilai						for impairment
sebesar Rp 307.226.767						of Rp 307,226,767 as of
pada tanggal 30 Juni 2020	5,12,18	110.451.047.433	118.929.378.868	46.548.588.013	51.294.809.011	June 30, 2020
Piutang lain-lain pihak						Other accounts receivable
ketiga	6	780.201.728	5.545.933.039	150.554.508	291.708.590	from third parties
Persediaan	7	3.152.430.406	1.653.122.119	-	-	Inventories
Pajak dibayar dimuka	8	-	-	782.723.866	-	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	9	3.555.857.822	2.964.954.101	3.504.194.578	3.088.796.596	Prepaid expenses
Uang muka	10,29	36.081.521.078	211.363.658	147.907.859	1.848.394.966	Advances
Jumlah Aset Lancar		161.036.615.615	141.222.184.578	71.835.871.358	61.268.681.526	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NONCURRENT ASSETS
Klaim pengembalian pajak	26	2.120.266.832	-	5.269.706.993	5.269.706.993	Claims for tax refund
Aset pajak tangguhan	26	-	2.955.090.557	-	4.146.009.179	Deferred tax assets
Aset tetap - setelah						Property and equipment -
dikurangi akumulasi						net of accumulated
penyusutan sebesar						depreciation of
Rp 398.318.018.504,						Rp 398,318,018,504,
Rp 393.230.242.280,						Rp 393,230,242,280,
Rp 366.913.528.925						Rp 366,913,528,925
dan Rp 399.371.050.417						and Rp 399,371,050,417
pada tanggal 30 Juni 2020,						as of June 30, 2020,
31 Desember 2019, 2018,	11,12,					December 31, 2019, 2018,
dan 2017	18,19	395.631.376.561	436.401.844.480	415.877.323.993	368.389.850.479	and 2017
Jumlah Aset Tidak Lancar		397.751.643.393	439.356.935.037	421.147.030.986	377.805.566.651	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		558.788.259.008	580.579.119.615	492.982.902.344	439.074.248.177	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
			2019	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	12	57.273.030.604	62.294.292.251	-	15.802.653.870	Short-term bank loans
Utang usaha	13					Trade accounts payable
Pihak berelasi	29	1.665.938.224	883.003.073	704.939.734	668.771.956	Related parties
Pihak ketiga		27.489.998.981	33.202.440.769	22.938.665.677	24.874.065.726	Third parties
Utang lain-lain						Other accounts payable to
pihak ketiga	14	125.914.500	13.944.188.040	10.572.058.454	17.456.674.729	third parties
Utang pajak	15	4.822.743.430	3.326.602.934	230.669.877	782.662.290	Taxes payable
Beban akrual	16	6.455.394.754	5.815.670.350	11.138.899.125	5.484.924.399	Accrued expenses
Uang muka pelanggan		125.000.000	175.000.000	27.899.000	-	Advances from customers
Pinjaman opsi konversi						Convertible loans to
pihak ketiga	17	40.000.000.000	-	-	-	third parties
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Current portion of long-term liabilities
Utang bank	18	52.110.786.416	60.186.589.195	59.980.984.345	33.086.726.524	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	19	31.784.608.672	32.372.073.947	26.597.040.242	32.076.289.606	Consumer financing payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		221.853.415.581	212.199.860.559	132.191.156.454	130.232.769.100	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Long-term liabilities - net of current portion
Utang bank	18	27.344.968.833	51.281.766.558	73.916.182.139	29.770.854.873	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	19	29.394.840.071	34.852.068.666	16.556.066.477	25.088.110.690	Consumer financing payable
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	25	3.923.331.820	3.749.204.174	3.508.045.468	3.187.319.766	Long-term employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan	26	35.936.554	-	788.737.501	-	Deferred tax liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		60.699.077.278	89.883.039.398	94.769.031.585	58.046.285.329	Total Noncurrent Liabilities
Jumlah Liabilitas		282.552.492.859	302.082.899.957	226.960.188.039	188.279.054.429	Total Liabilities

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT ULIMA NITRA Tbk
Laporan Posisi Keuangan
30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Statements of Financial Position
June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
			2019	2018	2017	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham						Capital stock
Modal dasar - 80.000 saham						Authorized - 80,000
dengan nilai nominal						shares with
sebesar Rp 100.000						Rp 100,000 par value
per saham pada tanggal						per share as of June 30,
30 Juni 2020, 31 Desember						2020, December 31,
2019, 2018 dan 2017						2019, 2018 and 2017
Modal ditempatkan dan						Issued and paid - up -
disetor - 50.000 saham						50,000 shares
pada tanggal 30 Juni 2020,						as of June 30, 2020,
31 Desember 2019, 2018						December 31, 2019,
dan 2017	20	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2018 and 2017
Cadangan umum	27	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	General reserve
Saldo laba		263.511.192.294	265.678.565.225	254.245.421.282	239.104.902.381	Retained earnings
Penghasilan komprehensif						Other comprehensive
lain		6.724.573.855	6.817.654.433	6.777.293.023	6.690.291.367	income
Jumlah Ekuitas		276.235.766.149	278.496.219.658	266.022.714.305	250.795.193.748	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN						TOTAL LIABILITIES
EKUITAS		558.788.259.008	580.579.119.615	492.982.902.344	439.074.248.177	AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

		2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Catatan/ Notes							
PENJUALAN BERSIH	21	155.482.008.747	140.087.633.715	332.526.315.303	345.023.595.926	301.947.121.212	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	22,29	(136.697.848.474)	(124.089.992.797)	(274.727.282.941)	(286.897.021.328)	(258.179.456.278)	COST OF SALES
LABA KOTOR		18.784.160.273	15.997.640.918	57.799.032.362	58.126.574.598	43.767.664.934	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	23,29						OPERATING EXPENSES
Umum dan administrasi		(11.461.858.567)	(10.752.588.276)	(25.267.692.017)	(23.214.589.785)	(22.581.704.003)	General and administrative
Pajak final		-	-	-	(661.422.622)	(1.399.538.709)	Final tax
Jumlah Beban Usaha		(11.461.858.567)	(10.752.588.276)	(25.267.692.017)	(23.876.012.407)	(23.981.242.712)	Total Operating Expenses
LABA USAHA		7.322.301.706	5.245.052.642	32.531.340.345	34.250.562.191	19.786.422.222	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (EXPENSES)
Keuntungan atas penjualan aset tetap	11	4.288.648.862	2.478.396.648	1.738.743.369	8.387.181.178	2.274.332.309	Gain on sale of property and equipment
Pendapatan klaim asuransi		544.382.902	-	5.053.756.100	2.749.512.903	848.346.110	Insurance claims income
Pendapatan bunga		14.730.482	98.421.597	113.151.660	90.357.268	72.219.515	Interest income
Beban bunga dan keuangan lainnya	24	(11.224.873.782)	(9.452.876.558)	(19.911.317.593)	(16.121.888.816)	(15.429.720.558)	Interest and other financial charges
Lain-lain - bersih		1.107.507.697	(126.987.081)	4.670.951	(912.718.695)	(572.108.237)	Others - net
Beban Lain-lain - Bersih		(5.269.603.839)	(7.003.045.394)	(13.000.995.513)	(5.807.556.162)	(12.806.930.861)	Other Expenses - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		2.052.697.867	(1.757.992.752)	19.530.344.832	28.443.006.029	6.979.491.361	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK - Bersih	26	(3.465.501.128)	1.463.150.174	(2.097.200.889)	(11.302.487.128)	1.089.682.466	TAX BENEFIT (EXPENSE) - Net
LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUN BERJALAN		(1.412.803.261)	(294.842.578)	17.433.143.943	17.140.518.901	8.069.173.827	PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas imbangan pasti	25	(119.334.075)	26.907.607	53.815.213	116.002.208	(434.904.758)	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak terkait	26	26.253.497	(6.726.902)	(13.453.803)	(29.000.552)	108.726.190	Related tax
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK		(93.080.578)	20.180.705	40.361.410	87.001.656	(326.178.568)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF		(1.505.883.839)	(274.661.873)	17.473.505.353	17.227.520.557	7.742.995.259	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUN BERJALAN PER SAHAM	28	(0,57)	(0,12)	6,97	6,86	3,23	EARNINGS (LOSS) PER SHARE FROM PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Paid-up Capital	Cadangan Umum/ General Reserve	Saldo Laba/ Retained Earning	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Saldo pada tanggal 1 Januari 2017/ Balance as of January 1, 2017		5.000.000.000	-	232.035.728.554	7.016.469.935	244.052.198.489
Penghasilan komprehensif/Comprehensive income						
Laba tahun berjalan/Profit for the year		-	-	8.069.173.827	-	8.069.173.827
Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss			-			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang-bersih/Remeasurement of long-term employee benefits liability-net		-	-	-	(326.178.568)	(326.178.568)
Transaksi dengan pemilik/Transaction with owners						
Dividen/Dividend	27	-	-	(1.000.000.000)	-	(1.000.000.000)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017/ Balance as of December 31, 2017		5.000.000.000	-	239.104.902.381	6.690.291.367	250.795.193.748
Penghasilan komprehensif/Comprehensive income						
Laba tahun berjalan/Profit for the year		-	-	17.140.518.901	-	17.140.518.901
Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang-bersih/Remeasurement of long-term employee benefits liability-net		-	-	-	87.001.656	87.001.656
Transaksi dengan pemilik/Transaction with owners						
Dividen/Dividend	27	-	-	(2.000.000.000)	-	(2.000.000.000)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018/ Balance as of December 31, 2018		5.000.000.000	-	254.245.421.282	6.777.293.023	266.022.714.305

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid-up Capital	Cadangan Umum/ General Reserve	Saldo Laba/ Retained Earning	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019/ Balance as of January 1, 2019		5.000.000.000	-	254.245.421.282	6.777.293.023	266.022.714.305
Penghasilan komprehensif/Comprehensive income						
Laba tahun berjalan/Profit for the year		-	-	17.433.143.943	-	17.433.143.943
Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang-bersih/Remeasurement of long-term employee benefits liability-net		-	-	-	40.361.410	40.361.410
Transaksi dengan pemilik/Transaction with owners						
Dividen/Dividend	27	-	-	(5.000.000.000)	-	(5.000.000.000)
Pembentukan cadangan umum/Appropriation for general reserve	27	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-	-
Jumlah transaksi dengan pemilik/Total transactions with owners		-	1.000.000.000	(6.000.000.000)	-	(5.000.000.000)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019/ Balance as of December 31, 2019		5.000.000.000	1.000.000.000	265.678.565.225	6.817.654.433	278.496.219.658
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019/ Balance as of January 1, 2019		5.000.000.000	-	254.245.421.282	6.777.293.023	266.022.714.305
Rugi komprehensif/Comprehensive loss						
Rugi periode berjalan/Loss for the period		-	-	(294.842.578)	-	(294.842.578)
Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang-bersih/Remeasurement of long-term employee benefits liability-net		-	-	-	20.180.705	20.180.705
Transaksi dengan pemilik/Transaction with owners						
Dividen/Dividend	27	-	-	(5.000.000.000)	-	(5.000.000.000)
Saldo pada tanggal 30 Juni 2019/ Balance as of June 30, 2015		5.000.000.000	-	248.950.578.704	6.797.473.728	260.748.052.432

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid-up Capital	Cadangan Umum/ General Reserve	Saldo Laba/ Retained Earning	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 - sebelum dampak penyesuaian/Balance as of December 31, 2019 - before adjustment		5.000.000.000	1.000.000.000	265.678.565.225	6.817.654.433	278.496.219.658
Penyesuaian dampak penerapan PSAK No. 71/Impact of initial adoption of PSAK No. 71	5	-	-	(754.569.670)	-	(754.569.670)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 - setelah dampak penyesuaian/Balance as of January 1, 2020 - after adjustment		5.000.000.000	1.000.000.000	264.923.995.555	6.817.654.433	277.741.649.988
Rugi komprehensif/Comprehensive loss						
Rugi periode berjalan/Loss for the period		-	-	(1.412.803.261)	-	(1.412.803.261)
Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang-bersih/Remeasurement of long-term employee benefits liability-net		-	-	-	(93.080.578)	(93.080.578)
Saldo pada tanggal 30 Juni 2020/ Balance as of June 30, 2020		5.000.000.000	1.000.000.000	263.511.192.294	6.724.573.855	276.235.766.149

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

		2020	2019	2018	2017	
		(enam bulan/ six months)	(enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	(satu tahun/ one year)	(satu tahun/ one year)	(satu tahun/ one year)
Catatan/ Notes						
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		163.910.340.182	112.186.570.615	260.292.625.448	349.797.715.924	311.032.643.235
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya		(99.381.107.556)	(58.972.694.874)	(122.444.833.870)	(149.605.537.941)	(102.111.329.567)
Pembayaran kepada karyawan		(40.484.051.488)	(35.356.650.876)	(74.346.121.152)	(77.299.200.974)	(71.960.291.909)
Kas dihasilkan dari operasi		24.045.181.138	17.857.224.865	63.501.670.426	122.892.977.009	136.961.021.759
Pembayaran pajak penghasilan		(2.599.261.473)	(2.270.784.678)	(5.892.468.299)	(6.327.981.330)	(5.276.436.007)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		21.445.919.665	15.586.440.187	57.609.202.127	116.564.995.679	131.684.585.752
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		14.730.482	98.421.597	113.151.660	90.357.268	72.219.515
Penerimaan dari penjualan aset tetap	11	7.166.454.556	3.831.818.190	14.711.818.202	15.560.000.000	4.067.045.454
Perolehan aset tetap	11	(6.896.750.545)	(5.626.378.000)	(24.291.591.551)	(666.319.600)	(41.313.519.690)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		284.434.493	(1.696.138.213)	(9.466.621.689)	14.984.037.668	(37.174.254.721)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang bank jangka pendek		(11.721.261.647)	-	(7.500.000.000)	(27.802.653.870)	(23.000.000.000)
Penerimaan utang bank jangka pendek		6.700.000.000	31.027.780.545	69.794.292.251	12.000.000.000	19.856.245.044
Penerimaan pinjaman opsi konversi pihak ketiga		40.000.000.000	-	-	-	-
Pembayaran utang bank jangka panjang		(32.012.600.504)	(31.199.992.176)	(62.520.210.731)	(44.509.792.913)	(39.880.043.676)
Penurunan utang pembiayaan konsumen jangka panjang		(18.373.493.870)	(15.468.141.109)	(31.789.814.106)	(37.157.767.577)	(38.459.760.664)
Pembayaran dividen		-	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)	(2.000.000.000)	(1.000.000.000)
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya		(11.224.873.782)	(9.452.876.558)	(19.911.317.593)	(16.121.888.816)	(15.429.720.558)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(26.632.229.803)	(30.093.229.298)	(56.927.050.179)	(115.592.103.176)	(97.913.279.854)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS						NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
		(4.901.875.645)	(16.202.927.324)	(8.784.469.741)	15.956.930.171	(3.402.948.823)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN						CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
		11.917.432.793	20.701.902.534	20.701.902.534	4.744.972.363	8.147.921.186
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN						CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR
		7.015.557.148	4.498.975.210	11.917.432.793	20.701.902.534	4.744.972.363

Tambahan informasi arus kas diungkapkan dalam Catatan 36

Supplemental cash flows information is presented in Note 36

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Ulima Nitra Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 74 tanggal 25 Agustus 1992 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2811. HT.01.01.th.93 tanggal 5 Mei 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 1993, Tambahan No. 3515. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 49 tanggal 14 Agustus 2019 dari Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, mengenai perubahan ruang lingkup usaha Perusahaan. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0057182.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2019 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 30 Agustus 2019, Tambahan No. 25760.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak di bidang jasa konstruksi, persewaan kendaraan dan alat berat dan jasa pertambangan.

Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1992 dan kegiatan usaha Perusahaan saat ini adalah persewaan kendaraan dan alat berat serta jasa pertambangan. Perusahaan berdomisili di Jl. Betet No. 28, Palembang 30113.

b. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham tanggal 12 Desember 2017 yang didokumentasikan dalam Akta No. 26 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jati Simina
Komisaris	:	Mertje Tjokro

1. General

a. Establishment and General Information

PT Ulima Nitra Tbk (the Company) was established based on Notarial Deed No. 74 dated August 25, 1992 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-2811. HT.01.01.th.93 dated May 5, 1993 and was published in State Gazette No. 62 dated August 3, 1993, Supplement No. 3515. The Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 49 dated August 14, 2019 of Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., a public notary in Palembang, concerning the changes of the Company's scope of activities. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0057182.AH.01.02.Tahun 2019 dated August 24, 2019, and was published in State Gazette No. 70 dated August 30, 2019, Supplement No. 25760.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage mainly in construction services, vehicle and heavy equipment rental and mining services.

The Company started its commercial operations in 1992 and the Company's current business activities are vehicle and heavy equipment rental and mining services. The Company is domiciled on Jl. Betet No. 28, Palembang 30113.

b. Employees, Directors and Board of Commissioners

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, based on a circular resolution on the stockholders dated December 12, 2017, as documented in Notarial Deed No. 26 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, the Company's management consists of the following:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama : Burhan Tjokro
 Direktur : Ulung Wijaya
 Mertty Tjokro
 Tuti Nuarni

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Dewan Komisaris dan Direktur.

Jumlah karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 856, 871, 760, dan 941 karyawan, masing-masing tahun 2020, 2019, 2018, dan 2017.

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT Ulina Nitra Tbk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 8 Februari 2021 oleh Direksi Perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Directors

President Director
 Directors

Key management personnel of the Company consist of Board of Commissioners and Directors.

The Company had a total number of employees (unaudited) of 856, 871, 760, and 941 in 2020, 2019, 2018, dan 2017, respectively.

c. Completion of Financial Statements

The financial statements of PT Ulina Nitra Tbk for the six-month period ended June 30, 2020 were completed and authorized for issuance on February 8, 2021 by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI) and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements".

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the six-month period ended June 30, 2020 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017.

b. Penjabaran Mata Uang Asing

b. Foreign Currency Translation

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Functional and Reporting Currencies

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsional).

Items included in the financial statements of the Company's are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the functional currency).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Perusahaan.

The financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and the Company's presentation currency.

Transaksi dan Saldo

Transactions and Balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss. Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp 14.302, Rp 13.901, Rp 14.481 dan Rp 13.548 per 1 Dolar Amerika Serikat (USD).

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the conversion rates used by the Company were the middle rates of Bank Indonesia Rp 14,302, Rp 13,901, Rp 14,481 and Rp 13,548 equivalent to 1 United States Dollar (USD), respectively.

c. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

e. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

c. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Company if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

d. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of 3 (three) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

e. Financial Instruments

From January 1, 2020, the Company has applied PSAK No. 71, Financial Instruments, which replaced PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

Financial Assets

From January 1, 2020

The Company classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Company's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

*Aset keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi*

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan.

Sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Aset keuangan diklasifikasikan menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, dan tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal berdasarkan intensi manajemen untuk memegang instrumen keuangan tersebut.

Financial assets at amortized cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's cash and cash equivalents, trade accounts receivable and other accounts receivable were included in this category.

Prior to January 1, 2020

The Company classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial assets are classified into financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity, and available for sale. Classifications of financial assets are determined at initial recognition based on the management's intention to hold the financial assets.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Sejak 1 Januari 2020, liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Liabilitas keuangan diklasifikasikan menjadi liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain. Liabilitas keuangan lain-lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities.

From January 1, 2020, financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPTL) or other comprehensive income (FVOCI). The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Prior to January 1, 2020, the Company classifies its financial liabilities in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial liabilities are classified into financial liabilities at fair value through profit or loss, and other liabilities. Other liabilities are measured at amortized cost.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

*Liabilitas Keuangan yang Diukur pada
Biaya Perolehan Diamortisasi*

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kategori ini meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, pinjaman opsi konversi pihak ketiga, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang dimiliki oleh Perusahaan.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Perusahaan mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's short-term bank loans, trade accounts payable, other accounts payable, accrued expenses, convertible loans to third parties, long-term bank loans and long-term consumer financing payable were included in this category.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Company reclassifies its financial assets when, and only when, the Company changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, sebagai berikut:

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Prior to January 1, 2020

The Company applies measurement for impairment of financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments, as follows:

Assets Carried at Amortized Cost

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1. Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. The rights to receive cash flows from the asset have expired;

b. Perusahaan tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau

c. Perusahaan telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

b. The Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

c. The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

f. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Company must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika Perusahaan menggunakan teknik penilaian, maka Perusahaan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

When the Company uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

g. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method.

Allowance for inventory obsolescence and decline in value of the inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable values.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset Tetap

Pemilikan Langsung

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui dalam laba rugi.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Bangunan/ <i>Building</i>	20	5%
Mesin dan peralatan/ <i>Machinery and equipment</i>	4-8	12,5%-25%
Kendaraan/ <i>Vehicles</i>	8	12,5%
Alat berat/ <i>Heavy equipment</i>	8	12,5%
Peralatan kantor/ <i>Office equipment</i>	4-8	12,5%-25%

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

i. Property and Equipment

Direct Acquisition

Property and equipment, except land, are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized in profit or loss.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Depreciation are computed based on a straight-line basis over the property and equipment's useful lives as follows:

<u>Tahun/Years</u>	<u>Persentase/ Percentage</u>
20	5%
4-8	12,5%-25%
8	12,5%
8	12,5%
4-8	12,5%-25%

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset Tetap Dalam Pembangunan

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

j. Transaksi Sewa

Sejak 1 Januari 2020

Perusahaan menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau yang telah berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from de-recognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The assets' residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Construction in Progress

Construction in progress represents property and equipment under construction which is stated at cost and is not depreciated. The accumulated costs will be reclassified to the respective property and equipment account and will be depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

j. Lease Transactions

From January 1, 2020

The Company has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after January 1, 2020.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

As Lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
 - The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
1. The Company has the right to operate the asset;
 2. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Sewa Jangka-pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka- pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Pesewa

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pesewa, Perusahaan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

Sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan dalam laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Short-term Leases

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short- term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

As Lessor

When the Company acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

Prior to January 1, 2020

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in the arrangement.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards incidental to ownership retained by the lessor are classified as operating leases.

Payments made under operating leases are charged profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Sewa dimana Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Unsur bunga sebagai biaya keuangan dibebankan dalam laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

k. Distribusi Dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan dalam periode saat dividen tersebut disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Leases whereby the Company has substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments.

Each finance lease payment is allocated between the finance and liability. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statements of profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The fixed asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

k. Dividend Distribution

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

l. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

m. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

From January 1, 2020, the Company has applied PSAK No. 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan dari jasa pertambangan diakui pada saat jasa telah selesai dikerjakan dengan mengacu pada tingkat jumlah produksi yang ditargetkan dalam kontrak.

Pendapatan dari sewa kendaraan dan alat berat diakui secara proporsional selama masa sewa dan sesuai penggunaan oleh pihak ketiga.

Pendapatan dari jasa konstruksi diakui sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam proses konstruksi.

Pendapatan dari jasa lainnya diakui pada saat jasa telah selesai dikerjakan.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya.

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. here these are not directly observable, the relative stand- alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.

5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Revenue from mining services is recognized when services are rendered with reference to the stage of production amount that targeted in the contract.

Revenue from vehicle and heavy equipment rental is recognized proportionately over rental period and based on useage by third parties.

Revenue from construction services is recognized in line with the amount of cost spent during construction process.

Revenue from other services is recognized when services are rendered.

Interest income and interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss in accrual basis using the effective interest method.

Expenses are recognized when they are incurred.

n. Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

o. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

n. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

o. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

p. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

q. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Perusahaan yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perusahaan.

r. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

p. Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing net income attributable to owners of the Parent Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are computed by dividing net income attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year as adjusted for the effects of all potentially dilutive ordinary shares.

q. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

r. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

3. Management Use of Estimates, Judgments and Assumptions

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71 (prior to January 1, 2020: PSAK No. 55). Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020

At each financial position reporting date, the Company shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Company shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Company shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Company shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Prior to January 1, 2020

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables. The Company assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying values of the Company's financial assets at amortized cost as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 were as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
<i>Pada biaya perolehan diamortisasi</i>					<i>At amortized cost</i>
Kas dan setara kas	7.015.557.148	11.917.432.793	20.701.902.534	4.744.972.363	Cash and cash equivalents
Piutang usaha					Trade accounts receivable
pihak ketiga	110.451.047.433	118.929.378.868	46.548.588.013	51.294.809.011	from third parties
Piutang lain-lain					Other accounts receivable
pihak ketiga	780.201.728	5.545.933.039	150.554.508	291.708.590	from third parties
Jumlah	118.246.806.309	136.392.744.700	67.401.045.055	56.331.489.964	Total

d. Komitmen Sewa

Komitmen Sewa - Perusahaan Sebagai Penyewa

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa lahan serta perjanjian sewa sejumlah kendaraan, mesin dan peralatan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

Komitmen Sewa Operasi - Perusahaan Sebagai Pesewa

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa kendaraan dan alat berat. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Perusahaan menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

d. Lease Commitments

Operating Lease Commitments - Company as Lessee

The Company has entered into various lease agreements for land spaces, vehicle and commercial machineries and equipment. The Company has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases.

Operating Lease Commitments - Company as Lessor

The Company has entered into various vehicle and heavy equipment lease agreements. The Company has determined that it is an operating lease since the Company bears substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 395.631.376.561, Rp 436.401.844.480, Rp 415.877.323.993, dan Rp 368.389.850.479 (Catatan 11).

a. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the fair value of its financial assets and liabilities approximates its carrying value.

b. Estimated Useful Lives Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Company's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of property and equipment as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 amounted to Rp 395,631,376,561, Rp 436,401,844,480, Rp 415,877,323,993, and Rp 368,389,850,479, respectively (Note 11).

c. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 diungkapkan di Catatan 11.

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 25 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

c. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying value of non-financial assets as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 were disclosed in Note 11.

d. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 25 and include, among others, rate of salary increase and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Company's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing sebesar Rp 3.923.331.820, Rp 3.749.204.174, Rp 3.508.045.468, dan Rp 3.187.319.766 (Catatan 25).

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, long-term employee benefits liability amounted to Rp 3,923,331,820, Rp 3,749,204,174, Rp 3,508,045,468, and Rp 3,187,319,766, respectively (Note 25).

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp 7.446.821.163, Rp 11.615.757.775, Rp 9.049.766.650 dan Rp 12.176.624.672 (Catatan 26).

e. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

As of 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, deferred tax assets amounted to Rp 7,446,821,163, Rp 11,615,757,775, Rp 9,049,766,650 and Rp 12,176,624,672, respectively (Note 26).

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

4. Cash and Cash Equivalents

This account consists of:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
Kas	120.752.611	343.646.950	642.706.876	637.179.049	Cash on hand
Bank					Cash in banks
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.876.983.065	11.527.139.858	685.919.392	1.099.270.162	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.001.900.000	-	-	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank DBS Indonesia	9.702.925	41.838.508	5.907.805	2.902.377	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk	3.696.873	1.869.961	2.151.653	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.521.674	2.937.516	2.307.807	5.620.775	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	62.909.001	-	PT Bank Central Asia Tbk
Subjumlah	6.894.804.537	11.573.785.843	759.195.658	1.107.793.314	Subtotal
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank DBS Indonesia	-	-	10.000.000.000	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	9.300.000.000	3.000.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
Subjumlah	-	-	19.300.000.000	3.000.000.000	Subtotal
Jumlah	7.015.557.148	11.917.432.793	20.701.902.534	4.744.972.363	Total
Suku bunga per tahun atas deposito berjangka	-	-	6,25% - 7,50%	4,50%	Interest rate per annum on time deposits

Berdasarkan mata uang

Based on currency

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
Rupiah	7.015.557.148	11.917.432.793	20.701.902.534	4.574.903.642	Rupiah
Mata uang asing (Catatan 31)					Foreign currency (Note 31)
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	170.068.721	United States Dollar
Jumlah	7.015.557.148	11.917.432.793	20.701.902.534	4.744.972.363	Total

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak ada kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, no cash and cash equivalents were used as collateral.

5. Piutang Usaha Pihak Ketiga

5. Trade Accounts Receivable from Third Parties

Rincian dari piutang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The detail of trade accounts receivable from third parties is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
PT Banyan Koalindo Lestari	51.984.607.969	41.471.615.783	-	-	PT Banyan Koalindo Lestari
PT Manambang Muara Enim	19.463.070.827	46.126.661.115	12.929.755.159	10.998.505.348	PT Manambang Muara Enim
PT Bukit Asam Tbk	11.919.200.000	7.963.303.806	10.010.929.432	10.286.099.014	PT Bukit Asam Tbk
PT Pacific Global Utama	8.692.840.448	7.501.648.631	11.193.925.050	2.533.637.700	PT Pacific Global Utama
PT Duta Bara Utama	6.252.073.537	11.216.295.952	-	-	PT Duta Bara Utama
PT Satria Bahana Sarana	4.604.522.266	271.085.100	1.157.148.106	2.993.344.145	PT Satria Bahana Sarana
PT Pertamina Gas	2.432.533.380	-	-	-	PT Pertamina Gas
PT Tritama Niaga Berjaya	2.166.783.418	2.166.783.418	-	-	PT Tritama Niaga Berjaya
ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	1.765.968.000	1.620.756.000	4.494.832.462	9.701.980.243	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
PT Musi Mitra Jaya	919.390.200	-	-	-	PT Musi Mitra Jaya
PT Medco E & P Indonesia	551.784.155	579.889.063	825.323.155	416.320.252	PT Medco E & P Indonesia
PT Muara Alam Sejahtera	-	-	5.478.056.904	14.341.496.987	PT Muara Alam Sejahtera
PT Prima Sarana Gemilang	-	-	445.912.745	-	PT Prima Sarana Gemilang
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200.000.000)	5.500.000	11.340.000	12.705.000	23.425.322	Others (less than Rp 200,000,000 each)
Jumlah	110.758.274.200	118.929.378.868	46.548.588.013	51.294.809.011	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(307.226.767)	-	-	-	Allowance for impairment
Jumlah - Bersih	110.451.047.433	118.929.378.868	46.548.588.013	51.294.809.011	Total - Net

Analisa umur piutang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade accounts receivable from third parties is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Belum jatuh tempo	68.486.435.486	67.999.769.587	24.099.366.547	37.883.139.199	Not past due
Sudah jatuh tempo:					Overdue:
1-30 hari	11.602.410.723	33.531.055.752	15.159.705.179	10.373.099.879	1-30 days
31-60 hari	2.938.488.870	3.586.198.303	5.113.849.664	37.640.724	31-60 days
61-90 hari	6.643.962.259	4.922.287.733	1.018.518.517	3.000.929.209	61-90 days
Lebih dari 90 hari	21.086.976.862	8.890.067.493	1.157.148.106	-	More than 90 days
Jumlah	110.758.274.200	118.929.378.868	46.548.588.013	51.294.809.011	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(307.226.767)	-	-	-	Allowance for impairment
Jumlah - Bersih	110.451.047.433	118.929.378.868	46.548.588.013	51.294.809.011	Total - Net

Berdasarkan mata uang

Based on currency

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Rupiah	110.451.047.433	118.929.378.868	46.548.588.013	50.511.436.555	Rupiah
Mata uang asing (Catatan 31)	-	-	-	783.372.456	Foreign currency (Note 31)
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	-	United States Dollar
Jumlah	110.451.047.433	118.929.378.868	46.548.588.013	51.294.809.011	Total

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment of trade accounts receivable are detailed as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Saldo awal periode/tahun	-	-	-	-	Balance at the beginning of the period/year
Dampak penerapan PSAK No. 71 Pemulihan	754.569.670	-	-	-	Impact of adoption PSAK No. 71 Recoveries
	(447.342.903)	-	-	-	
Saldo akhir periode/tahun	307.226.767	-	-	-	Balance at the end of the period/year

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung cadangan kerugian ekspektasian pada tanggal 1 Januari 2020 yang disyaratkan oleh PSAK No. 71, yang memperbolehkan penerapan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur cadangan kerugian ekspektasian tersebut, piutang usaha dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan pola tunggakan atau gagal bayar.

The Company applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 on January 1, 2020, which permits the use of the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2020 memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment as of June 30, 2020 is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Untuk periode pelaporan sebelum 1 Januari 2020, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan penurunan nilai.

For reporting period prior to January 1, 2020, the Company's management believes that all receivable are fully collectible, hence no allowance for impairment was provided.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha dari pihak ketiga.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade accounts receivable from third parties.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, sebagian piutang usaha pihak ketiga digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang (Catatan 12 dan 18).

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, certain trade accounts receivable from third parties were used as collateral for short-term bank loans and long-term bank loans (Notes 12 and 18).

Piutang kepada PT Tritama Niaga Berjaya (TNB) tidak mengalami pergerakan dikarenakan Perusahaan sedang menegosiasikan cara pelunasan piutang dari TNB.

Trade accounts receivable to PT Tritama Niaga Berjaya (TNB) have no mutation because the Company still negotiate with TNB regarding the payment method of trade accounts receivable.

6. Piutang Lain-lain Pihak Ketiga

6. Other Accounts Receivable from Third Parties

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Pinjaman karyawan	129.947.303	224.072.685	117.317.215	129.538.215	Employee loan
Klaim asuransi	113.917.000	4.675.013.563	24.438.323	95.946.691	Insurance claims
Lain-lain	536.337.425	646.846.791	8.798.970	66.223.684	Others
Jumlah	780.201.728	5.545.933.039	150.554.508	291.708.590	Total

Piutang klaim asuransi pada tanggal 31 Desember 2019 merupakan klaim atas kerusakan alat berat Perusahaan akibat kebakaran kepada PT Asuransi Astra Buana, pihak ketiga.

Insurance claims as of December 31, 2019 represent claims on Company's damaged heavy equipment caused by fire to PT Asuransi Astra Buana, third party.

Seluruh piutang lain-lain pihak ketiga didenominasi dalam mata uang Rupiah.

All other accounts receivable from third parties are denominated in Rupiah.

7. Persediaan

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Suku cadang	2.755.843.926	1.110.286.631	-	-	Spareparts
Bahan bakar minyak	396.586.480	542.835.488	-	-	Fuel
Jumlah	3.152.430.406	1.653.122.119	-	-	Total

Jumlah persediaan yang digunakan selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, masing-masing sebesar Rp 35.380.979.791 dan Rp 98.409.797.287.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai dan persediaan usang.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, persediaan telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Central Asia, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 2.500.000.000. Management berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan.

7. Inventories

This account consists of:

Inventories used for six-month periods ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019 amounting to Rp 35,380,979,791 and Rp 98,409,797,287, respectively.

Management believes that all inventories can be used, therefore no allowance for impairment and inventory obsolescences is needed.

As of June 30, 2020 and December 31, 2019, inventories are insured with PT Asuransi Central Asia, third party, against losses from fire, theft and other risks for Rp 2,500,000,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

As of June 30, 2020 and December 31, 2019, no inventories were used as collateral.

8. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan pajak dibayar dimuka atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 782.723.866 pada tanggal 31 Desember 2018.

8. Prepaid Tax

This account represents prepaid Value Added Tax amounting to Rp 782,723,866 as of December 31, 2018.

9. Biaya Dibayar Dimuka

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Asuransi dibayar dimuka	1.706.540.934	2.643.495.435	2.711.991.417	2.267.534.900	Prepaid insurance
Sewa dibayar dimuka	103.437.499	33.962.500	119.945.833	62.425.000	Prepaid rent
Lain-lain	1.745.879.389	287.496.166	672.257.328	758.836.696	Others
Jumlah	3.555.857.822	2.964.954.101	3.504.194.578	3.088.796.596	Total

9. Prepaid Expenses

This account consists of:

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

10. Uang Muka

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Uang muka pembelian aset tetap	35.403.881.338	206.363.658	147.907.859	825.421.671	Advance for purchase of property and equipment
Uang muka pemeliharaan dan perbaikan	10.139.740	5.000.000	-	1.022.973.295	Advance for repair and maintenance
Lain-lain	667.500.000	-	-	-	Others
Jumlah	36.081.521.078	211.363.658	147.907.859	1.848.394.966	Total

10. Advances

This account consists of:

Pada tahun 2020, Perusahaan membeli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Karya Baru, Palembang, dengan luas keseluruhan sebesar 14.281 M2 dan 2 (dua) bidang yang terletak di Jl. HBR Motik, Karya Baru, Palembang, dengan luas keseluruhan sebesar 13.014 M2 dari pemegang saham. Sampai dengan 30 Juni 2020, dokumen legalitas atas tanah masih dalam proses legalisasi.

In 2020, the Company bought 3 (three) plots of land located on Jl. Soekarno Hatta, Karya Baru, Palembang, with total area of 14,281 square meters and 2 (two) plots located on Jl. HBR Motik, Karya Baru, Palembang, with total area of 13,014 square meters from the stockholders. As of June 30, 2020, legal documents related to these land are still on process to be legalized.

11. Aset Tetap

Akun ini terdiri dari:

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Perubahan selama 2020 (enam bulan)/ Changes during 2020 (six months)		30 Juni 2020/ June 30, 2020	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Koreksi/ Corrections	
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	8.800.000.000	-	-	-	Land
Bangunan	2.110.519.150	-	-	-	Building
Mesin dan peralatan	40.510.328.805	529.861.200	2.659.561.950	-	Machinery and equipment
Kendaraan	373.686.666.540	2.202.422.000	23.818.368.040	-	Vehicles
Alat berat	396.377.811.850	910.000.000	16.909.443.500	-	Heavy equipment
Peralatan kantor	8.146.760.415	136.241.000	102.068.750	-	Office equipment
Aset tetap dalam pembangunan	-	4.028.226.345	-	-	Construction in progress
Jumlah	829.632.086.760	7.806.750.545	43.489.442.240	-	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan	1.077.432.128	44.711.375	-	-	Building
Mesin dan peralatan	23.978.681.135	2.891.055.057	2.322.283.951	-	Machinery and equipment
Kendaraan	179.267.614.178	20.498.898.137	23.134.758.097	-	Vehicles
Alat berat	184.569.952.013	21.702.909.423	15.052.525.771	-	Heavy equipment
Peralatan kantor	4.336.562.826	561.838.784	102.068.727	(6)	Office equipment
Jumlah	393.230.242.280	45.699.412.776	40.611.636.546	(6)	Total
Nilai Tercatat	436.401.844.480				Net Carrying Value

11. Property and Equipment

This account consists of:

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Perubahan selama 2019 (satu tahun)/ Changes during 2019 (one year)		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	8.800.000.000	-	-	8.800.000.000	Land
Bangunan	2.110.519.150	-	-	2.110.519.150	Building
Mesin dan peralatan	36.379.866.013	6.701.852.001	2.571.389.209	40.510.328.805	Machinery and equipment
Kendaraan	358.229.289.540	54.698.615.000	39.241.238.000	373.686.666.540	Vehicles
Alat berat	369.953.439.350	57.828.821.000	31.404.448.500	396.377.811.850	Heavy equipment
Peralatan kantor	7.317.738.865	1.014.553.550	185.532.000	8.146.760.415	Office equipment
Jumlah	782.790.852.918	120.243.841.551	73.402.607.709	829.632.086.760	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan	981.800.043	95.632.085	-	1.077.432.128	Building
Mesin dan peralatan	21.247.429.965	5.283.541.420	2.552.290.250	23.978.681.135	Machinery and equipment
Kendaraan	172.117.270.947	39.045.316.323	31.894.973.092	179.267.614.178	Vehicles
Alat berat	169.069.299.104	41.297.390.444	25.796.737.535	184.569.952.013	Heavy equipment
Peralatan kantor	3.497.728.866	1.007.260.719	168.426.759	4.336.562.826	Office equipment
Jumlah	366.913.528.925	86.729.140.991	60.412.427.636	393.230.242.280	Total
Nilai Tercatat	415.877.323.993			436.401.844.480	Net Carrying Value

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Perubahan selama 2018 (satu tahun)/ Changes during 2018 (one year)		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Tanah	8.800.000.000	-	-	8.800.000.000	Land
Bangunan	1.928.964.150	181.555.000	-	2.110.519.150	Building
Mesin dan peralatan	35.381.872.273	4.632.925.100	3.634.931.360	36.379.866.013	Machinery and equipment
Kendaraan	297.353.833.858	74.164.189.500	13.288.733.818	358.229.289.540	Vehicles
Alat berat	356.837.083.750	60.270.500.000	47.154.144.400	369.953.439.350	Heavy equipment
Peralatan kantor	7.459.146.865	113.002.000	254.410.000	7.317.738.865	Office equipment
Jumlah	707.760.900.896	139.362.171.600	64.332.219.578	782.790.852.918	Total
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					<u>Accumulated depreciation:</u>
Bangunan	894.489.232	87.310.811	-	981.800.043	Building
Mesin dan peralatan	19.547.711.502	4.978.007.833	3.278.289.370	21.247.429.965	Machinery and equipment
Kendaraan	146.159.776.551	38.215.099.380	12.257.604.984	172.117.270.947	Vehicles
Alat berat	170.055.782.666	40.382.612.839	41.369.096.401	169.069.299.104	Heavy equipment
Peralatan kantor	2.713.290.466	992.865.066	208.426.666	3.497.728.866	Office equipment
Jumlah	339.371.050.417	84.655.895.929	57.113.417.421	366.913.528.925	Total
Nilai Tercatat	368.389.850.479			415.877.323.993	Net Carrying Value

	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Perubahan selama 2017 (satu tahun)/ Changes during 2017 (one year)		31 Desember 2017/ December 31, 2017	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Tanah	8.800.000.000	-	-	8.800.000.000	Land
Bangunan	1.928.964.150	-	-	1.928.964.150	Building
Mesin dan peralatan	29.778.013.593	6.367.643.680	763.785.000	35.381.872.273	Machinery and equipment
Kendaraan	264.276.619.858	47.568.136.000	14.490.922.000	297.353.833.858	Vehicles
Alat berat	306.396.998.750	53.386.110.000	2.946.025.000	356.837.083.750	Heavy equipment
Peralatan kantor	2.876.683.865	4.634.843.000	52.380.000	7.459.146.865	Office equipment
Jumlah	614.057.280.216	111.956.732.680	18.253.112.000	707.760.900.896	Total
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					<u>Accumulated depreciation:</u>
Bangunan	807.934.897	86.554.335	-	894.489.232	Building
Mesin dan peralatan	15.989.142.105	4.319.977.730	761.408.333	19.547.711.502	Machinery and equipment
Kendaraan	125.884.073.004	33.006.390.318	12.730.676.771	146.159.776.551	Vehicles
Alat berat	135.710.721.118	37.284.263.631	2.939.202.083	170.055.782.666	Heavy equipment
Peralatan kantor	2.153.985.267	588.416.867	29.111.668	2.713.290.466	Office equipment
Jumlah	280.545.856.391	75.285.592.881	16.460.398.855	339.371.050.417	Total
Nilai Tercatat	333.511.423.825			368.389.850.479	Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses were allocated as follows:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Beban pokok penjualan (Catatan 22)	45.092.862.613	42.256.590.996	85.626.248.174	83.575.720.051	74.610.621.679	Cost of sales (Note 22)
Beban umum dan administrasi (Catatan 23)	606.550.163	517.880.524	1.102.892.817	1.080.175.878	674.971.202	General and administrative expenses (Note 23)
Jumlah	45.699.412.776	42.774.471.520	86.729.140.991	84.655.895.929	75.285.592.881	Total

Aset tetap dalam pembangunan merupakan akumulasi biaya konstruksi bangunan dimana *workshop* yang baru akan berdiri yang dimaksudkan untuk menunjang pengembangan kegiatan operasional Perusahaan. Persentase penyelesaian aset ini adalah sebesar 30% pada tanggal 30 Juni 2020 dan direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2021.

Construction in progress represents accumulated construction costs of a building where a new workshop will be situated and, which is intended to facilitate the expansion of the Company's operations. The percentage of completion for this asset is 30% as of June 30, 2020 and planned to be finish in the end of 2021.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengurangan selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 merupakan penjualan aset tetap dengan perincian sebagai berikut:

Deductions for six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 (unaudited) and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 pertain to the sale of certain property and equipment with details as follows:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Harga jual	7.166.454.556	3.831.818.190	14.711.818.202	15.560.000.000	4.067.045.454	Selling price
Nilai tercatat	(2.877.805.694)	(1.353.421.542)	(12.973.074.833)	(7.172.818.822)	(1.792.713.145)	Net carrying value
Keuntungan atas penjualan aset tetap	4.288.648.862	2.478.396.648	1.738.743.369	8.387.181.178	2.274.332.309	Gain on sale of property and equipment

Pada tahun 2019 dan 2018, Perusahaan melakukan penghapusan aset tetap dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp 17.105.240 dan Rp 45.983.335. Rugi dalam penghapusan aset tetap dimasukkan dalam "Penghasilan (beban) lain-lain" dalam laporan laba rugi.

In 2019 and 2018, the Company has disposed its property and equipment with net carrying value of Rp 17,105,240 and Rp 45,983,335. Loss on disposal of property and equipment was included in the "Other income (expenses)" in the profit or loss.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Palembang dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat diperbarui dan berjangka waktu antara 10 (sepuluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2024 dan 2042. Berdasarkan data tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa HGB akan dapat diperpanjang pada akhir periode HGB, karena masing-masing tanah diperoleh secara legal dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai.

The Company owns several plot of land located in Palembang with renewable Building Use Rights (HGB) for 10 (ten) to 30 (thirty) years until 2024 to 2042. Based on the data above, management believes that it is probable to extend the term of the land rights on its expiration since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, beberapa aset tetap dijadikan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang (Catatan 12, 18 dan 19).

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, certain property and equipment were used as collateral for short-term bank loans, long-term bank loans and long-term consumer financing payable (Notes 12, 18 and 19).

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, property and equipment, except for land, were insured to third parties with detail as follows

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
PT Asuransi Astra Buana	575.406.316.400	438.128.760.000	615.826.825.000	481.827.800.000	PT Asuransi Astra Buana
PT Asuransi Central Asia	21.702.388.000	21.702.388.000	21.721.211.250	21.721.211.250	PT Asuransi Central Asia
PT Asuransi Raksa Pratikara	6.532.080.500	6.532.080.500	10.912.970.000	17.085.737.000	PT Asuransi Raksa Pratikara
PT Asuransi Tugu Pratama Tbk	5.600.000.000	5.600.000.000	-	80.000.000	PT Asuransi Tugu Pratama Tbk
PT Asuransi Jasa Indonesia	5.100.000.000	5.100.000.000	5.000.000.000	-	PT Asuransi Jasa Indonesia
PT MNC Asuransi Indonesia	1.540.000.000	1.540.000.000	1.540.000.000	1.540.000.000	PT MNC Asuransi Indonesia
PT Jasa Raharja	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	PT Jasa Raharja
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	-	-	2.240.000.000	2.450.000.000	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Jumlah	615.960.784.900	478.683.228.500	657.241.006.250	524.784.748.250	Total

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset dipertanggungan.

Management believed that the insurance coverage was adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, management believed that there was no impairment in values of the aforementioned property and equipment.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, biaya perolehan atas aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan sepenuhnya tetapi masih digunakan masing-masing sebesar Rp 79.233.663.575, Rp 89.833.073.259, Rp 77.746.953.568 dan Rp 59.202.372.546.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, acquisition costs of the Company's property and equipment that are fully-depreciated but are still in use amounted to Rp 79,233,663,575, Rp 89,833,073,259, Rp 77,746,953,568 and Rp 59,202,372,546.

12. Utang Bank Jangka Pendek

12. Short-term Bank Loans

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31, 2019	2018	2017	
PT Bank Central Asia Tbk	31.173.030.604	42.894.292.251	-	15.802.653.870	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.600.000.000	14.400.000.000	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	9.500.000.000	5.000.000.000	-	-	PT Bank DBS Indonesia
Jumlah	57.273.030.604	62.294.292.251	-	15.802.653.870	Total
Suku bunga per tahun	10,25% - 10,75%	10,50%	-	10,50% - 10,75%	Interest rate per annum

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

Berdasarkan Surat No. 063/021/KRD/PLG/2001 tanggal 23 Maret 2001, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank BCA dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 41.000.000.000 dan USD 500.000.

Based on Letter No. 063/021/KRD/PLG/2001 dated March 23, 2001, the Company obtained working capital credit facility from Bank BCA with maximum credit of Rp 41,000,000,000 and USD 500,000.

Pada tanggal 16 Maret 2016, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 23 Maret 2017 melalui surat persetujuan kredit No. 017/SPPK/SLA/PLG/2016.

On March 16, 2016, the Company obtained extension of the credit facility to March 23, 2017 through credit agreement letter No. 017/SPPK/SLA/PLG/2016.

Berdasarkan Akta Notaris No. 91 tanggal 28 November 2016 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Based on Notarial Deed No. 91 dated November 28, 2016 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

Berdasarkan surat pemberitahuan kredit No. 028/SPPK/SLA/PLG/2017 tanggal 29 Maret 2017, maksimum pinjaman diubah menjadi Rp 46.000.000.000 dan USD 500.000 dan jatuh tempo pada 23 Maret 2018.

Based on this credit facility letter No. 028/SPPK/SLA/PLG/2017 dated March 29, 2017, the maximum credit was changed to Rp 46,000,000,000 and USD 500,000 and was due to March 23, 2018.

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 18 Desember 2017 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Pada tanggal 6 November 2018, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 23 Maret 2019 melalui surat persetujuan kredit No. 127/SPPK/SLA/PLG/2018.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Desember 2018 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan kredit No. 920/SPPK/SLA/2019 tanggal 21 Agustus 2019, maksimum pinjaman diubah menjadi Rp 76.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,50% per tahun dan jatuh tempo dalam 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 21 Oktober 2019 dari Isniet Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Pada tanggal 17 Februari 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 12 September 2020 melalui surat persetujuan kredit No. 013/SPPK/SLA/2020.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Maret 2020 dari Isniet Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan adalah sebesar Rp 31.173.030.604, Rp 42.894.292.251, Rp Nihil dan Rp 15.802.653.870 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan utang bank jangka panjang (Catatan 18).

Based on Notarial Deed No. 44 dated December 18, 2017 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

On November 6, 2018, the Company obtained extension of the credit facility to March 23, 2019 through credit agreement letter No. 127/SPPK/SLA/PLG/2018.

Based on Notarial Deed No. 24 dated December 18, 2018 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

Based on credit agreement letter No. 920/SPPK/SLA/2019 dated August 21, 2019, maximum credit was changed to Rp 76,000,000,000 with interest rate of 10.50% per annum and was due to 6 (six) to 12 (twelve) months.

Based on Notarial Deed No. 20 dated October 21, 2019 of Isniet Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

On February 17, 2020, the Company obtained extension of the credit facility to September 12, 2020 through credit agreement letter No. 013/SPPK/SLA/2020.

Based on Notarial Deed No. 1 dated March 2, 2020 of Isniet Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

Loan facility that has been utilized amounting to Rp 31,173,030,604, Rp 42,894,292,251, Rp Nil and Rp 15,802,653,870 as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively.

The loan was secured with the same collaterals as the long-term bank loans (Note 18).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 dan 14 tanggal 8 November 2019 dari Juhaidi, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *Receivable Financing* 1 dan 2 dari Bank Mandiri dengan maksimum pinjaman masing-masing sebesar Rp 31.000.000.000 dan Rp 28.000.000.000 dengan suku bunga mengikuti suku bunga *trade finance* mingguan dari Bank Mandiri dan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan sebagian piutang usaha milik Perusahaan yang dibiayai melalui fasilitas ini (Catatan 5).

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan adalah sebesar Rp 16.600.000.000 dan Rp 14.400.000.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 25 September 2014 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank DBS dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000 yang dapat diperpanjang setiap satu tahun.

Pada tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 26 Juni 2016 melalui Akta Notaris No. 54 tanggal 10 Juni 2015 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang.

Berdasarkan surat perubahan No. 311/PFPA-DBSI/VII/3-4/2016 tanggal 14 Juli 2016, maksimum fasilitas kredit diubah menjadi Rp 6.000.000.000 dan tanggal jatuh tempo sampai dengan 25 Juni 2017.

Berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 28 November 2016 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, maksimum fasilitas kredit diubah menjadi Rp 9.500.000.000 dan tanggal jatuh tempo sampai dengan 25 Juni 2017.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2018 melalui surat perubahan No. 307/PFPA-DBSI/VII/3-4/2017.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

Based on Notarial Deed No. 13 and 14 dated November 8, 2019 of Juhaidi, S.H., a public notary in Palembang, the Company obtained Receivable Financing 1 and 2 credit facility from Bank Mandiri with maximum credit of Rp 31,000,000,000 and Rp 28,000,000,000, respectively, with interest rate based on the weekly trade finance interest rate from Bank Mandiri and will mature within one year.

This loan was secured with certain trade accounts receivable of the Company which is financed by this facility (Note 5).

Loan facility that has been utilized amounting to Rp 16,600,000,000 and Rp 14,400,000,000 as of June 30, 2020 and December 31, 2019, respectively.

PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS)

Based on Notarial Deed No. 97 dated September 25, 2014 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, the Company obtained working capital credit facility from Bank DBS with maximum credit of Rp 10,000,000,000 and renewable within one year.

On June 10, 2015, the Company obtained extension of the credit facility to June 26, 2016 through Notarial Deed No. 54 dated June 10, 2015 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang.

Based on addendum letter No. 311/PFPA-DBSI/VII/3-4/2016 dated July 14, 2016, the maximum credit facility was changed to Rp 6,000,000,000 and was due to June 25, 2017.

Based on Notarial Deed No. 89 dated November 28, 2016 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, maximum credit facility was changed to Rp 9,500,000,000 and was due to June 25, 2017.

On July 18, 2017, the Company obtained extension of the credit facility to June 26, 2018 through addendum letter No. 307/PFPA-DBSI/VII/3-4/2017.

Pada tanggal 18 Juli 2018, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2019 melalui surat perubahan No. 302/PFPA-DBSI/VII/3-4/2018.

Pada tanggal 29 Juli 2019, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2020 melalui surat perubahan No. 347/PFPA-DBSI/VII/3-4/2019.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa tanah milik Burhan Tjokro, pemegang saham Perusahaan.

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan adalah sebesar Rp 9.500.000.000 dan Rp 5.000.000.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 11.721.261.647, Rp 7.500.000.000, Rp 27.802.653.870 dan Rp 23.000.000.000 pada tahun 2020, 2019, 2018 dan 2017.

Beban bunga atas utang bank jangka pendek adalah sebesar Rp 2.806.942.703, Rp 377.305.568, Rp 2.300.537.592, Rp 1.321.651.755 dan Rp 2.240.444.215 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 24).

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi batasan-batasan tertentu (rasio keuangan dan *negative covenants*) yang tercantum dalam perjanjian.

Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan telah memenuhi sebagian batasan-batasan (*negative covenants*) yang tercantum dalam perjanjian.

On July 18, 2018, the Company obtained extension of the credit facility to June 25, 2019 through addendum letter No. 302/PFPA-DBSI/VII/3-4/2018.

On July 29, 2019, the Company obtained extension of the credit facility to June 25, 2020 through addendum letter No. 347/PFPA-DBSI/VII/ 3-4/2019.

This loan was secured with land of Burhan Tjokro, stockholders of the Company.

Loan facility that has been utilized amounting to Rp 9,500,000,000 and 5,000,000,000 as of June 30, 2020 and December 31, 2019, respectively.

Payment of loan principal amounted to Rp 11,721,261,647, Rp 7,500,000,000, Rp 27,802,653,870 and Rp 23,000,000,000 in 2020, 2019, 2018 and 2017, respectively.

Interest expense on short-term bank loan amounted to Rp 2,806,942,703, Rp 377,305,568, Rp 2,300,537,592, Rp 1,321,651,755 and Rp 2,240,444,215 for six-months period ended June 30, 2020 and 2019 (unaudited) and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively (Note 24).

Compliance with Loan Covenants

According to the above facilities, the Company was required to comply with certain covenants (financial ratio and negative covenants) stated in the agreement.

According to the above facilities, the Company has been complied with certain covenants (negative covenants) as stated in the agreement.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

13. Utang Usaha

Akun ini merupakan utang Perusahaan untuk pembelian suku cadang, perlengkapan dan peralatan operasi. Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
Pihak berelasi (Catatan 29)	1.665.938.224	883.003.073	704.939.734	668.771.956	Related parties (Note 29)
Pihak ketiga					Third parties
PT Haniven Mulia Sarana	17.975.952.540	21.585.170.600	7.386.052.000	-	PT Haniven Mulia Sarana
PT Diandra Kharisma Abadi	1.746.870.400	-	-	-	PT Diandra Kharisma Abadi
PT Tata Kurnia Pratama	1.629.971.200	2.249.420.800	-	-	PT Tata Kurnia Pratama
PT Virgo Makmur Perkasa	752.800.000	752.800.000	828.080.000	-	PT Virgo Makmur Perkasa
PT Chitra Paratama	704.660.000	-	356.400.000	280.700.000	PT Chitra Paratama
PT Asuransi Astra Buana	628.840.562	1.361.518.870	124.195.958	369.352.387	PT Asuransi Astra Buana
PT United Tractor Tbk	550.131.249	1.116.468.803	2.119.292.462	1.904.832.225	PT United Tractor Tbk
PT Atlantic Multi Mandiri	414.032.000	750.205.991	-	-	PT Atlantic Multi Mandiri
PT Bukit Mayana	337.591.984	-	-	-	PT Bukit Mayana
PT Indotruck Utama	313.140.612	422.194.788	531.779.744	7.607.503.931	PT Indotruck Utama
Monica Catering (Hasby Basyar)	311.032.653	-	-	-	Monica Catering (Hasby Basyar)
Arfa catering	304.714.286	-	-	-	Arfa catering
PT Trakindo Utama Tbk	205.868.000	-	-	-	PT Trakindo Utama Tbk
PT Astrinusa Jaya Dharma	45.870.000	148.076.500	323.735.500	-	PT Astrinusa Jaya Dharma
Toko Utama Motor	35.727.500	175.890.500	210.850.000	-	Toko Utama Motor
PT Bukit Asam Tbk	21.848.068	69.446.584	819.703.147	-	PT Bukit Asam Tbk
PT Chakra Jawara	7.565.265	42.628.724	282.427.420	189.642.112	PT Chakra Jawara
PT Mandiri Multi Traktor	2.420.000	20.900.000	377.624.500	-	PT Mandiri Multi Traktor
PT Indra Angkola Energy	-	1.031.627.400	-	-	PT Indra Angkola Energy
PT Taman Bukit Mas	-	322.926.400	-	-	PT Taman Bukit Mas
PT Karya Indo Permai	-	313.600.000	-	-	PT Karya Indo Permai
PT Prakarsa Putra	-	124.423.200	231.000.000	-	PT Prakarsa Putra
PT Karya Niaga Sukses	-	18.000.000	-	-	PT Karya Niaga Sukses
PT Weir Minerals Indonesia	-	5.348.090	4.695.130	239.465.567	PT Weir Minerals Indonesia
PT Muara Alam Sejahtera	-	-	1.838.751.671	3.634.018.184	PT Muara Alam Sejahtera
PT Putra Laskar Merdeka	-	-	1.582.672.000	6.516.028.724	PT Putra Laskar Merdeka
PT Lematang	-	-	1.450.709.270	-	PT Lematang
PT Hera Aman Sentosa 88	-	-	1.412.600.000	-	PT Hera Aman Sentosa 88
PT Sumber Awal Sinar	-	-	445.541.715	-	PT Sumber Awal Sinar
PT Karya Suka Abadi	-	-	370.458.348	-	PT Karya Suka Abadi
PT Banih Rahmat Utama	-	-	-	805.485.450	PT Banih Rahmat Utama
CV Musi Star Mandiri	-	-	-	395.702.500	CV Musi Star Mandiri
CV King Jaya	-	-	-	348.975.000	CV King Jaya
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200.000.000)	1.500.962.662	2.691.793.519	2.242.096.812	2.582.359.646	Others (less than Rp 200,000,000 each)
Subjumlah	27.489.998.981	33.202.440.769	22.938.665.677	24.874.065.726	Subtotal
Jumlah	29.155.937.205	34.085.443.842	23.643.605.411	25.542.837.682	Total

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
Belum jatuh tempo	13.173.266.202	21.984.564.459	15.811.401.406	11.757.076.662	Not past due
Jatuh tempo:					Overdue:
1-30 hari	7.594.641.809	10.421.349.391	6.201.183.566	5.772.378.465	1-30 days
31-60 hari	5.681.139.854	376.949.873	428.043.081	114.884.890	31-60 days
61-90 hari	1.471.446.800	1.302.580.119	916.971.000	7.466.552.165	61-90 days
Lebih dari 90 hari	1.235.442.540	-	286.006.358	431.945.500	More than 90 days
Jumlah	29.155.937.205	34.085.443.842	23.643.605.411	25.542.837.682	Total

Seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

13. Trade Accounts Payable

This account consists of the Company's payable to suppliers in relation to the purchases of spareparts and operational supplies and equipment. The following is the detail of trade accounts payable:

The aging analysis of trade accounts payable is as follows:

All trade accounts payable are denominated in Rupiah.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

14. Utang Lain-lain Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Uang jaminan	76.732.500	77.132.500	75.987.500	75.837.500	Deposits
Utang pembelian aset tetap	-	13.689.500.000	10.032.000.000	17.313.000.000	Liability for purchase of property and equipment
Lain-lain	49.182.000	177.555.540	464.070.954	67.837.229	Others
Jumlah	125.914.500	13.944.188.040	10.572.058.454	17.456.674.729	Total

Utang pembelian aset tetap merupakan liabilitas atas perolehan alat berat dari PT United Tractor Tbk.

Seluruh utang lain-lain pihak ketiga didenominasi dalam mata uang Rupiah.

14. Other Accounts Payable to Third Parties

This account consists of:

Liability for purchase of property and equipment represents liability for the acquisition of heavy equipment from PT United Tractor Tbk.

All other accounts payable to third parties are denominated in Rupiah.

15. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Pajak kini (Catatan 26)	-	30.774.121	68.759.670	-	Current tax (Note 26)
Pajak penghasilan	-	-	-	-	Income taxes
Pasal 4(2)	-	-	3.740.500	408.333	Article 4(2)
Pasal 21	88.096.750	116.878.670	121.500.369	97.397.406	Article 21
Pasal 23	34.043.577	20.955.643	36.462.138	29.769.931	Article 23
Pasal 25	207.200	207.200	207.200	207.200	Article 25
Pasal 29	34.156.491	3.382.370	-	-	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	4.666.239.412	3.154.404.930	-	654.879.420	Value Added Tax - net
Jumlah	4.822.743.430	3.326.602.934	230.669.877	782.662.290	Total

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

15. Taxes Payable

This account consists of:

The filed tax returns are based on the Company's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*). The time limit for the tax authorities to assess or amend taxes is determined in accordance with provisions of the prevailing Law.

16. Beban Akrua

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Gaji dan tunjangan	5.922.982.792	5.665.872.490	5.237.942.671	5.484.924.399	Salaries and allowance
Penalti penjualan	-	-	5.206.816.954	-	Sales penalty
Lain-lain	532.411.962	149.797.860	694.139.500	-	Others
Jumlah	6.455.394.754	5.815.670.350	11.138.899.125	5.484.924.399	Total

Penalti penjualan merupakan penalti atas kelebihan pemakaian bahan bakar dan volume *spoil*, lumpur dan air pada proyek PT Muara Alam Sejahtera.

16. Accrued Expenses

This account consists of:

Sales penalty represents penalty for excess usage of fuel and *spoil*, mud and water on project of PT Muara Alam Sejahtera.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

17. Pinjaman Opsi Konversi Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31 2018	2017	
PT Surya Fajar Capital Tbk	27.500.000.000	-	-	-	PT Surya Fajar Capital Tbk
PT Surya Fajar Corpora	12.500.000.000	-	-	-	PT Surya Fajar Corpora
Jumlah	40.000.000.000	-	-	-	Total

Pada tanggal 26 Juni 2020, Perusahaan memperoleh pinjaman jangka pendek dari surat utang dengan opsi konversi untuk keperluan modal kerja Perusahaan sebesar Rp 40.000.000.000.

Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 25 Juni 2021, dengan mekanisme pelunasan secara tunai ataupun konversi saham Perusahaan. Jika Perusahaan memilih metode pelunasan secara tunai maka Perusahaan diwajibkan membayar biaya komisi sebesar 10% dari pinjaman. Jika Perusahaan menggunakan metode pelunasan berupa konversi saham, maka saham yang dikonversi tidak akan melebihi dari 15% saham beredar Perusahaan.

Terkait pinjaman diatas, Perusahaan tidak memberikan jaminan tertentu dan tidak diwajibkan untuk memenuhi pembatasan tertentu.

17. Convertible Loans to Third Parties

This account consists of:

On June 26, 2020, the Company obtained short-term loan from convertible loans for the Company's working capital amounting to Rp 40,000,000,000.

This loan will be due on June 25, 2021 with repayment mechanism in cash or stock conversion of the Company. If the Company choose to settle by cash payment, the Company is obligated to pay 10% commission fee of the total loan. If the Company choose to settle by stock conversion method, the total converted stock should not be more than 15% of the Company's outstanding shares.

Regarding the above loan, the Company did not placed any collateral and is not obligate to comply with certain covenant.

18. Utang Bank Jangka Panjang

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31 2018	2017	
PT Bank Central Asia Tbk	71.712.809.022	100.449.588.194	116.326.756.261	62.857.581.397	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	7.742.946.227	11.018.767.559	17.570.410.223	-	PT Bank Permata Tbk
Jumlah	79.455.755.249	111.468.355.753	133.897.166.484	62.857.581.397	Total
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(52.110.786.416)	(60.186.589.195)	(59.980.984.345)	(33.086.726.524)	Less: Current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	27.344.968.833	51.281.766.558	73.916.182.139	29.770.854.873	Long-term portion of bank loan
Suku bunga per tahun	9,50% - 10,25%	9,50% - 10,50%	9,50% - 10,50%	10,75%	Interest rate per annum

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

Berdasarkan Surat No. 063/021/KRD/PLG/2001 tanggal 23 Maret 2001, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank BCA dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 160.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian kendaraan dan alat berat dan dibayar dengan cicilan bulanan selama periode 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun.

18. Long-term Bank Loans

This account consist of:

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

Based on Letter No. 063/021/KRD/PLG/2001 dated March 23, 2001, the Company obtained working capital credit facility from Bank BCA with maximum credit limit of Rp 160,000,000,000. This loan is used for purchase of vehicle and heavy equipment and is payable in monthly installment for a period of 3 (three) to 4 (four) years.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 017/SPPK/SLA/PLG/2016 tanggal 16 Maret 2016, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 190.000.000.000.

Based on credit agreement letter No. 017/SPPK/SLA/PLG/2016 dated March 16, 2016, Bank BCA amended the maximum credit limit to Rp 190,000,000,000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 91 tanggal 28 November 2016 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Based on Notarial Deed No. 91 dated November 28, 2016 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 028/SPPK/SLA/PLG/2017 tanggal 29 Maret 2017, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 240.000.000.000.

Based on credit agreement letter No. 028/SPPK/SLA/PLG/2017 dated March 29, 2017, Bank BCA amended the maximum credit limit to Rp 240,000,000,000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 18 Desember 2017 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Based on Notarial Deed No. 44 dated December 18, 2017 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 127/SPPK/SLA/PLG/2018 tanggal 6 November 2018, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 260.000.000.000.

Based on credit agreement letter No. 127/SPPK/SLA/PLG/2018 dated November 6, 2018, Bank BCA amended the maximum credit limit to Rp 260,000,000,000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Desember 2018 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Based on Notarial Deed No. 24 dated December 18, 2018 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 0920/SPPK/SLA/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Bank BCA mengubah fasilitas kredit terkait dengan penambahan fasilitas kredit investasi jangka panjang XVIII dan XIX dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 25.000.000.000 dan Rp 20.000.000.000.

Based on credit agreement letter No. 0920/SPPK/SLA/2019 dated August 21, 2019, Bank BCA amended the credit facility regarding additional of long-term investment credit facility XVIII and XIX with maximum credit amounting to Rp 25,000,000,000 and Rp 20,000,000,000, respectively.

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 21 Oktober 2019 dari Isnje Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Based on Notarial Deed No. 20 dated October 21, 2019 of Isnje Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 013/SPPK/SLA/2020 tanggal 17 Februari 2020, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 205.000.000.000.

Based on credit agreement letter No. 013/SPPK/SLA/2020 dated February 17, 2020, Bank BCA amended the maximum credit limit to Rp 205,000,000,000.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Maret 2020 dari Isnje Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, fasilitas pinjaman yang telah digunakan masing-masing sebesar Rp 71.712.809.022, Rp 100.449.588.194, Rp 116.326.756.261 dan Rp 62.857.581.397.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap Perusahaan (Catatan 5 dan 11) serta jaminan pribadi dari pemegang saham.

PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)

Berdasarkan Akta Notaris No. 114 tanggal 30 Juli 2018 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit pembiayaan dari Bank Permata dengan maksimum kredit sebesar Rp 20.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian kendaraan dan alat berat dan dibayar dengan cicilan bulanan selama periode 3 (tiga) tahun.

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan sebesar Rp 7.742.946.227, Rp 11.018.767.559 dan Rp 17.570.410.223 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibeli dan jaminan pribadi dari pemegang saham.

Jadwal pembayaran kembali utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31, 2018	2017	
Pembayaran yang akan jatuh tempo pada tahun:					Payments due in:
2018	-	-	-	33.086.726.524	2018
2019	-	-	59.980.984.345	21.464.525.012	2019
2020	-	60.186.589.195	46.822.789.194	8.306.329.861	2020
2021	52.110.786.416	40.457.192.945	27.093.392.945	-	2021
2022	22.807.517.442	10.824.573.613	-	-	2022
2023	4.537.451.391	-	-	-	2023
Jumlah	79.455.755.249	111.468.355.753	133.897.166.484	62.857.581.397	Total

Beban bunga atas utang bank jangka panjang adalah sebesar Rp 4.973.794.368, Rp 6.426.242.469, Rp 11.769.792.788, Rp 8.021.836.491 dan Rp 6.058.593.402 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 24).

Based on Notarial Deed No. 1 dated March 2, 2020 of Isnje Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., a public notary in Palembang, Bank BCA approved to amend the credit agreement regarding the change and addition of collateral.

As of June 30, 2020, Desember 31, 2019, 2018 and 2017, loan facility that has been utilized amounting to Rp 71,712,809,022, Rp 100,449,588,194, Rp 116,326,756,261 and 62,857,581,397, respectively.

This loan is secured with certain trade accounts receivable and property and equipment of the Company (Notes 5 and 11) and personal guarantee of the stockholders.

PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)

Based on Notarial Deed No. 114 dated July 30, 2018 of Heniwati Ridwan, S.H., a public notary in Palembang, the Company obtained financing credit facility from Bank Permata with maximum credit of Rp 20,000,000,000. This loan is used for purchase of vehicle and heavy equipment and is payable in monthly installment for a period of 3 (three) years.

Loan facility that has been utilized amounting to Rp 7,742,946,227, Rp 11,018,767,559 and Rp 17,570,410,223 as of June 30, 2020, December 31, 2019 and 2018, respectively.

This loan is secured with assets purchased and personal guarantee from the stockholders.

The schedule of repayment of long-term bank loans is as follows:

Interest expense on long-term bank loan amounted to Rp 4,973,794,368, Rp 6,426,242,469, Rp 11,769,792,788, Rp 8,021,836,491 and Rp 6,058,593,402 for six-months period ended June 30, 2020 and 2019 (unaudited) and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively (Note 24).

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi batasan-batasan tertentu (rasio keuangan dan *negative covenants*) yang tercantum dalam perjanjian.

Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan telah memenuhi sebagian batasan-batasan (*negative covenants*) yang tercantum dalam perjanjian.

Compliance with Loan Covenants

According to the above facilities, the Company was required to comply with certain covenants (financial ratio and negative covenants) stated in the agreement.

According to the above facilities, the Company has been complied with certain covenants (negative covenants) as stated in the agreement.

19. Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Panjang

Utang pembiayaan konsumen merupakan liabilitas perolehan kendaraan dan alat berat antara Perusahaan dengan PT Dipo Star Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, PT Surya Artha Nusantara Finance, PT SMFL Finance Indonesia, PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Buana Finance Tbk:

19. Long-Term Consumer Financing Payable

Consumer financing payable represent liabilities for the acquisition of vehicle and heavy equipment between the Company with PT Dipo Star Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, PT Surya Artha Nusantara Finance, PT SMFL Finance Indonesia, PT Chandra Sakti Utama Leasing and PT Buana Finance Tbk:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	31 Desember/December 31 2018	2017	
Pembayaran yang akan jatuh tempo pada tahun:					Payments due in:
2018	-	-	-	32.076.289.606	2018
2019	-	-	26.597.040.242	18.843.127.820	2019
2020	-	32.372.072.947	14.005.403.257	6.244.982.870	2020
2021	31.784.608.672	21.572.861.975	2.550.663.220	-	2021
2022	21.504.637.706	13.279.207.691	-	-	2022
2023	7.890.202.365	-	-	-	2023
Jumlah	61.179.448.743	67.224.142.613	43.153.106.719	57.164.400.296	Total
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(31.784.608.672)	(32.372.073.947)	(26.597.040.242)	(32.076.289.606)	Less: Current portion
Bagian utang pembiayaan konsumen yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	29.394.840.071	34.852.068.666	16.556.066.477	25.088.110.690	Long-term portion of consumer financing payable - net of current portion

Utang pembiayaan konsumen berjangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif antara 6%-13% per tahun dan dijamin dengan aset yang bersangkutan (Catatan 11).

These liabilities have terms of 1 (one) until 3 (three) years with effective interest rate at 6%-13% per annum which are secured with the related assets (Note 11).

Beban bunga atas utang pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp 3.349.099.217, Rp 2.453.203.662, Rp 5.137.203.921, Rp 6.057.006.802 dan Rp 6.731.653.379 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 24).

Interest expense on consumer financing payable amounted to Rp3,349,099,217, Rp 2,453,203,662, Rp 5,137,203,921, Rp 6,057,006,802 and Rp 6,731,653,379 for six-months period ended June 30, 2020 and 2019 (unaudited) and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively (Note 24).

20. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017/ June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor/ Total Issued and Paid-up Capital	
Jati Simina	27.500	55%	2.750.000.000	Jati Simina
Burhan Tjokro	7.500	15%	750.000.000	Burhan Tjokro
Ulung Wijaya	7.500	15%	750.000.000	Ulung Wijaya
Merty Tjokro	2.500	5%	250.000.000	Merty Tjokro
Tuti Nuarni	2.500	5%	250.000.000	Tuti Nuarni
Mertje Tjokro	2.500	5%	250.000.000	Mertje Tjokro
Jumlah	50.000	100%	5.000.000.000	Total

20. Capital Stock

The share ownership in the Company is as follows:

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi.

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions.

21. Penjualan Bersih

Rincian dari penjualan bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Jasa pertambangan	95.168.461.692	66.404.852.300	217.369.417.554	178.919.923.395	177.024.687.347	Mining services
Sewa truk dan alat berat	52.564.723.617	72.716.727.819	113.025.304.188	142.464.090.404	77.368.926.610	Truck and heavy equipment rental
Jasa konstruksi	-	-	-	22.047.420.668	46.651.289.542	Construction services
Lainnya	7.748.823.438	966.053.596	2.131.593.561	1.592.161.459	902.217.713	Others
Jumlah	155.482.008.747	140.087.633.715	332.526.315.303	345.023.595.926	301.947.121.212	Total

21. Net Sales

The detail of the Company's net sales is as follows:

Tidak terdapat penjualan dari pihak berelasi.

No sales were made to related parties.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penjualan dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sales from individual customers exceeding 10% of the Company's total net sales is as follows:

	2020 (enam bulan/six months)		2019 (enam bulan/six months)		
	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	
PT Menambang Muara Enim	55.553.501.117	35,73%	61.066.484.321	43,59%	PT Menambang Muara Enim
PT Banyan Koalindo Lestari	50.451.460.574	32,45%	-	0,00%	PT Banyan Koalindo Lestari
PT Bukit Asam Tbk	24.584.630.000	15,81%	24.721.308.350	17,65%	PT Bukit Asam Tbk
PT Pacific Global Utama	8.433.075.500	5,42%	12.041.731.468	8,60%	PT Pacific Global Utama
ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2.183.020.000	1,40%	24.508.507.326	17,50%	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
PT Muara Alam Sejahtera	-	0,00%	1.914.856.785	1,37%	PT Muara Alam Sejahtera
Jumlah	141.205.687.191	90,81%	124.252.888.250	88,71%	Total

	2019 (satu tahun/one year)		2018 (satu tahun/one year)		2017 (satu tahun/one year)		
	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	
PT Menambang Muara Enim	145.835.317.293	43,86%	124.168.016.654	35,99%	101.317.496.184	33,55%	PT Menambang Muara Enim
PT Banyan Koalindo Lestari	65.180.454.032	19,60%	-	0,00%	-	0,00%	PT Banyan Koalindo Lestari
PT Bukit Asam Tbk	42.479.698.027	12,77%	46.910.227.763	13,60%	-	0,00%	PT Bukit Asam Tbk
PT Pacific Global Utama	20.784.118.468	6,25%	37.618.718.000	10,90%	-	0,00%	PT Pacific Global Utama
ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	31.368.833.315	9,43%	69.536.878.967	20,15%	75.467.519.438	24,99%	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
PT Muara Alam Sejahtera	1.914.856.785	0,58%	61.521.638.098	17,83%	80.213.356.553	26,57%	PT Muara Alam Sejahtera
Jumlah	307.563.277.920	92,49%	339.755.479.482	98,47%	256.998.372.175	85,11%	Total

22. Beban Pokok Penjualan

22. Cost of Sales

Rincian dari beban pokok penjualan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The detail of the Company's cost of sales is as follows:

	2020 (enam bulan/six months)		2019 (enam bulan/six months)		2019 (satu tahun/one year)		2018 (satu tahun/one year)		2017 (satu tahun/one year)		
	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	
Penyusutan (Catatan 11)	45.092.862.613	32,02%	42.256.590.996	32,02%	85.626.248.174	25,18%	83.575.720.051	24,82%	74.610.621.679	21,82%	Depreciation (Note 11)
Gaji dan tunjangan	37.239.819.921	26,59%	32.024.686.303	26,59%	67.936.721.885	20,00%	68.827.218.263	20,00%	64.628.131.322	18,95%	Salaries and allowance
Bahan bakar	34.499.203.456	24,49%	26.598.926.208	24,49%	75.436.716.408	22,15%	61.341.815.221	18,22%	45.087.489.658	13,15%	Fuel
Pemeliharaan dan perbaikan	11.183.878.317	7,93%	13.406.338.199	10,15%	27.755.440.929	8,23%	36.529.661.176	10,85%	35.750.797.287	10,45%	Repair and maintenance
Asuransi	2.194.514.616	1,59%	2.524.996.387	1,93%	4.753.094.265	1,41%	5.513.405.078	1,64%	5.091.215.296	1,51%	Insurance
Kepemilikan dan keselamatan	1.559.915.950	1,11%	2.193.575.615	1,66%	4.061.500.191	1,21%	4.423.056.109	1,33%	4.532.817.635	1,35%	Safety and security
Biaya lapangan	1.274.068.055	0,91%	1.623.023.547	1,23%	2.359.886.098	0,71%	10.855.355.323	3,23%	17.600.409.450	5,14%	Field costs
Penalti	230.983.554	0,17%	422.471.971	0,32%	573.729.379	0,17%	8.466.670.917	2,52%	1.566.736.597	0,46%	Penalty
Lainnya	3.422.601.992	2,43%	3.039.383.571	2,32%	6.223.945.612	1,86%	7.364.119.190	2,22%	9.311.237.354	2,74%	Others
Jumlah	136.697.848.474	92,49%	124.089.992.797	92,49%	274.727.282.941	83,47%	286.897.021.328	85,11%	258.179.456.278	76,11%	Total

Berdasarkan segmen usaha:

Based on business segment:

	2020 (enam bulan/six months)		2019 (enam bulan/six months)		2019 (satu tahun/one year)		2018 (satu tahun/one year)		2017 (satu tahun/one year)		
	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	
Jasa pertambangan	83.601.935.438	58,82%	58.821.592.064	58,82%	179.603.821.709	52,18%	148.796.327.482	42,18%	151.332.572.446	44,82%	Mining services
Sewa truk dan alat berat	46.499.684.894	33,82%	64.412.667.928	51,81%	93.421.957.267	27,00%	118.500.804.841	33,42%	66.335.296.058	19,45%	Truck and heavy equipment rental
Jasa konstruksi	-	-	-	-	-	-	18.291.566.114	5,18%	39.761.487.772	11,55%	Construction services
Lainnya	6.596.228.142	4,81%	855.732.805	0,68%	1.701.503.965	0,50%	1.308.322.891	0,37%	750.100.002	0,22%	Others
Jumlah	136.697.848.474	92,49%	124.089.992.797	92,49%	274.727.282.941	83,47%	286.897.021.328	85,11%	258.179.456.278	76,11%	Total

Pembelian dari pihak berelasi mewakili 1,43%, 1,74%, 1,44%, 1,16% dan 1,11% dari jumlah penjualan bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 29).

Purchases from related parties represent 1.43%, 1.74%, 1.44%, 1.16% and 1.11% of net sales for six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 (unaudited) and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively (Note 29).

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pembelian dari pemasok individu yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

Purchases from individual suppliers exceeding 10% of the Company's total net sales is as follows:

	2020 (enam bulan/six months)		2019 (enam bulan/six months)		
	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	
PT Haniven Mulia Sarana	25.363.104.260	16,31%	23.241.942.068	16,59%	PT Haniven Mulia Sarana
PT United Tractor Tbk	2.667.763.067	1,72%	3.854.272.110	2,75%	PT United Tractor Tbk
PT Putra Laskar Merdeka	-	0,00%	727.770.000	0,52%	PT Putra Laskar Merdeka
Jumlah	28.030.867.327	18,03%	27.823.984.178	19,86%	Total

	2019 (satu tahun/one year)		2018 (satu tahun/one year)		2017 (satu tahun/one year)		
	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan bersih/ Percentage from total net sales	
PT Haniven Mulia Sarana	60.842.548.108	18,30%	10.727.920.000	3,11%	-	0,00%	PT Haniven Mulia Sarana
PT United Tractor Tbk	97.302.121.871	29,26%	129.556.922.532	37,55%	53.303.783.421	17,65%	PT United Tractor Tbk
PT Putra Laskar Merdeka	727.770.000	0,22%	36.226.416.783	10,50%	36.369.479.956	12,04%	PT Putra Laskar Merdeka
Jumlah	158.872.439.979	47,78%	176.511.259.315	51,16%	89.664.263.377	29,69%	Total

23. Beban Usaha

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

23. Operating Expenses

The detail of operating expenses is as follows:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Umum dan administrasi						General and administrative
Gaji dan tunjangan	3.285.322.505	3.547.983.937	6.837.329.086	8.225.000.983	7.343.609.456	Salaries and allowance
Konsumsi	4.332.395.679	3.112.536.735	7.332.251.902	7.163.193.471	7.058.056.800	Consumptions
Transportasi dan akomodasi	1.265.218.625	1.781.013.907	6.232.469.589	3.376.250.413	3.322.514.009	Transportation and accommodation
Penyusutan (Catatan 11)	606.550.163	517.880.524	1.102.892.817	1.080.175.878	674.971.202	Depreciation (Note 11)
Listrik, air dan telekomunikasi	354.484.732	388.449.922	767.673.422	877.584.082	576.470.445	Electricity, water and telecommunication
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 25)	337.921.071	343.394.960	686.789.919	704.992.910	691.562.148	Long-term employee benefits (Note 25)
Jasa profesional	333.249.998	21.900.000	387.440.000	81.500.000	498.339.000	Professional fees
Perijinan	111.042.800	120.332.992	273.312.158	153.259.214	491.924.852	Permit
Asuransi	4.076.453	5.419.703	11.300.966	14.778.405	10.144.006	Insurance
Lain-lain	831.596.541	913.675.596	1.636.232.158	1.537.854.429	1.914.112.085	Others
Jumlah	11.461.858.567	10.752.588.276	25.267.692.017	23.214.589.785	22.581.704.003	Total

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Pajak final						Final tax
Jasa konstruksi	-	-	-	22.047.420.668	46.651.289.542	Construction services
Tarif pajak final	3%	3%	3%	3%	3%	Final tax rate
Pajak final yang dikenakan tarif 3% dari jasa konstruksi	-	-	-	661.422.622	1.399.538.709	Final tax levied at 3% from construction services
Jumlah	11.461.858.567	10.752.588.276	25.267.692.017	23.876.012.407	23.981.242.712	Total

Beban usaha dari pihak berelasi mewakili 1,85%, 0,93%, 0,79%, 0,86% dan 0,89% dari jumlah beban umum dan administrasi masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 29).

Operating expenses from related parties represent 1.85%, 0.93%, 0.79%, 0.86% and 0.89% of general and administrative expenses for six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 (unaudited) and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively (Note 29).

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

24. Beban Bunga dan Keuangan Lainnya

Rincian dari beban bunga dan keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)
Bunga atas:					
Utang bank jangka pendek (Catatan 12)	2.806.942.703	377.305.568	2.300.537.592	1.321.651.755	2.240.444.215
Utang bank jangka panjang (Catatan 18)	4.973.794.368	6.426.242.469	11.769.792.788	8.021.836.491	6.058.593.402
Utang pembiayaan konsumen (Catatan 19)	3.349.099.217	2.453.203.662	5.137.203.921	6.057.006.802	6.731.653.379
Biaya administrasi bank	95.037.494	196.124.859	703.783.292	721.393.768	399.029.562
Jumlah	11.224.873.782	9.452.876.558	19.911.317.593	16.121.888.816	15.429.720.558

Interest on:
Short-term bank loans
(Note 12)
Long-term bank loans
(Note 18)
Consumer financing
payable (Note 19)
Bank charges

Total

25. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuaria terakhir atas dana pensiun dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, tertanggal 15 Juli 2020.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 107 pada tanggal 30 Juni 2020 dan 112, 126 dan 139 karyawan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan terkait kewajiban Perusahaan atas program imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	3.923.331.820	3.749.204.174	3.508.045.468	3.187.319.766	Present value of benefit obligation
Nilai wajar aset	-	-	-	-	Fair value of plan assets
Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3.923.331.820	3.749.204.174	3.508.045.468	3.187.319.766	Total long-term employee benefits liability

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya sehubungan dengan cadangan manfaat ini adalah sebagai berikut:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Beban kini	194.447.320	196.057.050	392.114.100	475.505.887	509.693.508	Current service cost
Beban bunga	143.473.751	147.337.910	294.675.819	229.487.023	181.868.640	Interest expense
Komponen biaya imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi	337.921.071	343.394.960	686.789.919	704.992.910	691.562.148	Components of defined benefit costs recognized in profit or loss

24. Interest and Other Financial Charges

The detail of interest and other financial charges is as follows:

25. Long-term Employee Benefits Liability

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. There was no special fund made regarding long-term benefits liability.

The latest actuarial valuation upon the pension fund and the long-term employee benefits liability was from PT Dian Artha Tama, an independent actuary, dated July 15, 2020.

Number of eligible employees was 107 as of June 30, 2020 and 112, 126 and 139 as of December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively.

The liabilities amount included in the statements of financial position arising from the Company's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:

Amount recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans is as follows:

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari:						Actuarial gains (losses) arising from:
Perubahan asumsi keuangan	(34.370.379)	98.313.253	196.626.506	(434.826.307)	370.804.830	Changes in financial assumption
Penyesuaian pengalaman	153.704.454	(125.220.860)	(250.441.719)	318.824.099	64.099.928	Experience adjustment
Komponen biaya imbalan kerja yang diakui dalam rugi (penghasilan) komprehensif lainnya	119.334.075	(26.907.607)	(53.815.213)	(116.002.208)	434.904.758	Components of defined benefit cost recognized in other comprehensive loss (income)

Biaya jasa kini dan beban bunga bersih untuk tahun tersebut termasuk dalam "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi.

The current service cost and the net interest expense for the year are included in the "General and administrative expenses" in the profit or loss.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja bersih termasuk dalam rugi komprehensif lainnya.

The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive loss.

Pergerakan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movements of the long-term employee benefits liability are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
Saldo awal	3.749.204.174	3.508.045.468	3.187.319.766	2.165.102.860	Beginning balance
Beban imbalan kerja karyawan	337.921.071	686.789.919	704.992.910	691.562.148	Employee benefits expense
Rugi (penghasilan) komprehensif lainnya	119.334.075	(53.815.213)	(116.002.208)	434.904.758	Other comprehensive loss (income)
Pembayaran beban imbalan kerja	(283.127.500)	(391.816.000)	(268.265.000)	(104.250.000)	Benefits paid
Saldo akhir tahun	3.923.331.820	3.749.204.174	3.508.045.468	3.187.319.766	Balance at the end of the year

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

The principal actuarial assumptions used in valuation of the long-term employee benefits liability are as follows:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months)	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Tingkat diskonto	7,90%	7,80%	7,80%	8,40%	7,20%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	5,00%	5%	5%	Salary growth rate
Tingkat kematian	TM-II(2011)	TM-II(2011)	TM-II(2011)	TM-II(2011)	TM-II(2011)	Mortality rate
Usia pensiun	58	58	58	58	58	Retirement age

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions are as follows

30 Juni/June 30, 2020					
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability					
Perubahan Asumsi/ Changes in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption			
Tingkat diskonto	1%	318.355.635	(366.906.034)	Discount rate	
Kenaikan gaji	1%	(371.838.377)	327.462.172	Salary growth	
31 Desember/December 31, 2019					
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability					
Perubahan Asumsi/ Changes in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption			
Tingkat diskonto	1%	318.690.488	(368.318.748)	Discount rate	
Kenaikan gaji	1%	(372.825.377)	327.517.246	Salary growth	

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember/December 31, 2018				
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability				
Perubahan Asumsi/ Changes in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption		
Tingkat diskonto	1%	307.391.711	(356.725.904)	Discount rate
Kenaikan gaji	1%	(363.115.741)	317.361.294	Salary growth

31 Desember/December 31, 2017				
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability				
Perubahan Asumsi/ Changes in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption		
Tingkat diskonto	1%	313.761.059	(368.588.765)	Discount rate
Kenaikan gaji	1%	(370.909.708)	320.710.521	Salary growth

26. Pajak Penghasilan

Penghasilan (beban) pajak bersih Perusahaan terdiri dari:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Pajak kini	(448.220.520)	-	(5.854.482.750)	(6.396.741.000)	-	Current tax
Pajak tangguhan	(3.017.280.608)	1.463.150.174	3.757.281.861	(4.905.746.128)	1.089.682.466	Deferred tax
Jumlah	(3.465.501.128)	1.463.150.174	(2.097.200.889)	(11.302.487.128)	1.089.682.466	Total

26. Income Tax

The net tax benefit (expense) of the Company consists of the following:

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) is as follows:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Laba (rugi) sebelum pajak	2.052.697.867	(1.757.992.752)	19.530.344.832	28.443.006.029	6.979.491.361	Profit (loss) before tax
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Aset tetap	630.133.789	5.255.961.668	4.711.347.729	(7.231.554.633)	(6.907.781.431)	Property and equipment
Imbalan kerja jangka panjang	337.921.071	343.394.960	686.789.919	704.992.910	691.562.148	Long-term employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(447.342.903)	-	-	-	-	Allowance for impairment of trade accounts receivable
Pembiayaan konsumen	(1.629.040.609)	(6.492.726.475)	(5.203.905.378)	3.133.845.696	(3.244.113.514)	Consumer financing
Subtotal	(1.108.328.652)	(893.369.847)	194.232.270	(3.392.716.027)	(9.460.332.797)	Subtotal
Perbedaan tetap:						Permanent differences:
Biaya lapangan	1.076.952.710	1.996.540.210	3.738.821.497	2.423.058.275	1.133.079.900	Field costs
Konsumsi	28.139.500	17.346.416	45.035.256	20.723.474	34.321.941	Consumptions
Beban atas penghasilan yang dikenai pajak final	-	-	-	19.565.078.879	45.039.140.528	Expenses of incomes subjected to final tax
Beban pajak final	-	-	-	661.422.622	1.399.538.709	Final tax expense
Pemeliharaan dan perbaikan	-	-	-	-	2.421.936	Repair and maintenance
Penghasilan yang dikenai pajak final	-	-	-	(22.047.420.668)	(46.651.289.542)	Incomes subjected to final tax
Penghasilan bunga	(14.730.482)	(98.421.597)	(113.151.660)	(90.357.268)	(72.219.515)	Interest income
Lain-lain	2.635.978	17.962.628	22.649.281	4.168.886	9.768.942	Others
Subtotal	1.092.997.706	1.933.427.657	3.693.354.374	536.674.200	894.762.899	Subtotal
Penyesuaian Surat Ketetapan Pajak	-	-	-	-	(167.545.102)	Tax Assessment Letter adjustment
Laba kena pajak (rugi fiskal)	2.037.366.921	(717.934.942)	23.417.931.476	25.586.964.202	(1.753.623.639)	Taxable income (fiscal loss)
Laba kena pajak (pembulatan)	2.037.366.000	-	23.417.931.000	25.586.964.000	-	Taxable income (rounded)

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Laba kena pajak dan beban pajak Perusahaan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and current tax of the Company's were in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 six months) Tidak diaudit/ (enam bulan/ Unaudited)	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Beban pajak kini	448.220.520	-	5.854.482.750	6.396.741.000	-	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka:						Less prepaid taxes:
Pasal 22	4.357.000	2.050.500	187.782.000	73.776.495	51.290.489	Article 22
Pasal 23	2.562.887.152	2.198.731.308	5.633.440.229	6.251.718.435	5.215.930.104	Article 23
Pasal 25	1.243.200	1.243.200	2.486.400	2.486.400	2.486.400	Article 25
Subjumlah	2.568.487.352	2.202.025.008	5.823.708.629	6.327.981.330	5.269.706.993	Subtotal
Utang pajak kini (Klaim pengembalian pajak)	(2.120.266.832)	(2.202.025.008)	30.774.121	68.759.670	(5.269.706.993)	Current tax payable (Claim for tax refund)

Pemohonan klaim pengembalian pajak pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 2.120.266.832 dan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 5.269.706.993, disajikan sebagai akun "Klaim pengembalian pajak" dalam laporan posisi keuangan.

Request for claims for tax refund as of June 30, 2020 amounted to Rp 2,120,266,832 and as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp 5,269,706,993, respectively, are presented as "Claims for tax refund" in the statements of financial position.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Company's deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke/ (charged) to	Beban komprehensif lain/Other Comprehensive loss	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rate	30 Juni 2020/ June 30, 2020	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	937.301.046	12.054.586	26.253.497	(112.476.126)	863.133.003	Long-term benefits liability
Utang pembiayaan konsumen	10.678.456.729	(2.880.943.650)	-	(1.281.414.807)	6.516.098.272	Consumer financing payable
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	-	67.589.888	-	-	67.589.888	Allowance for impairment of trade accounts receivable
Aset tetap	(8.660.667.218)	138.629.434	-	1.039.280.067	(7.482.757.717)	Property and equipment
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	2.955.090.557	(2.662.669.742)	26.253.497	(354.610.866)	(35.936.554)	Deferred tax assets (liabilities) - net

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Dikreditkan (dibebankan) ke/Credited (charged) to				
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Laba atau rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rate	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Liabilitas imbalan kerja					
jangka panjang	877.011.369	73.743.480	(13.453.803)	-	937.301.046
Utang pembiayaan konsumen	8.172.755.281	2.505.701.448	-	-	10.678.456.729
Aset tetap	(9.838.504.151)	1.177.836.933	-	-	(8.660.667.218)
Aset (liabilitas) pajak tanggungan - bersih	(788.737.501)	3.757.281.861	(13.453.803)	-	2.955.090.557
					Deferred tax assets (liabilities) - net
	Dikreditkan (dibebankan) ke/Credited (charged) to				
	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Laba atau rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rate	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Liabilitas imbalan kerja					
jangka panjang	796.829.943	109.181.978	(29.000.552)	-	877.011.369
Utang pembiayaan konsumen	11.379.794.729	(3.207.039.448)	-	-	8.172.755.281
Aset tetap	(8.030.615.493)	(1.807.888.658)	-	-	(9.838.504.151)
Aset (liabilitas) pajak tanggungan - bersih	4.146.009.179	(4.905.746.128)	(29.000.552)	-	(788.737.501)
					Deferred tax assets (liabilities) - net
	Dikreditkan (dibebankan) ke/Credited (charged) to				
	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Laba atau rugi/ Profit or loss	Beban komprehensif lain/Other Comprehensive loss	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rate	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Liabilitas imbalan kerja					
jangka panjang	541.275.716	146.828.037	108.726.190	-	796.829.943
Utang pembiayaan konsumen	8.709.994.942	2.669.799.787	-	-	11.379.794.729
Aset tetap	(6.303.670.135)	(1.726.945.358)	-	-	(8.030.615.493)
Aset pajak tanggungan - bersih	2.947.600.523	1.089.682.466	108.726.190	-	4.146.009.179
					Deferred tax assets - net

Pemeriksaan Pajak

Pada tahun 2019, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Tax Audit

In 2019, the Company received the tax assessment letters with detail as follows:

Periode/Tahun/ Period/Year	Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letter Number	Jenis Pajak/ Kind of Tax	Kurang (Lebih) Bayar/ Under (Over) Payment
2016	0007/506/16/308/19	Pajak penghasilan badan/ Corporate income tax	Nihil/Nil
Januari/January - Desember/December 2016	00020/543/16/308/19	Pajak penghasilan final pasal 21/ Final income tax article 21	Nihil/Nil
Januari/January - Desember/December 2016	00023/501/16/313/19	Pajak penghasilan pasal 21/ income tax article 21	Nihil/Nil
Januari/January - Desember/December 2016	00077/201/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 21/ income tax article 21	72.073.833
Januari/January 2016	00036/240/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	444.000
Februari/February 2016	00102/540/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
Maret/March 2016	00037/240/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	432.000
April/April 2016	00038/240/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	426.000
Mei/May 2016	00039/240/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	420.000
Junii/June 2016	00040/240/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	414.000
Julii/July 2016	00041/240/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	408.000
Agustus/August 2016	00042/240/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	402.000

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Periode/Tahun/ Period/Year	Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letter Number	Jenis Pajak/ Kind of Tax	Kurang (Lebih) Bayar/ Under (Over) Payment
September/September 2016	00103/540/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
Oktober/October 2016	00104/540/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
Januari/January - Desember/December 2016	00001/542/16/308/19	Pajak penghasilan final pasal 19/ Final income tax article 19	Nihil/Nil
Januari/January 2016	00141/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	673.897
Februari/February 2016	00142/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	382.749
Maret/March 2016	00143/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	520.330
April/April 2016	00152/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	1.650.213
Mei/May 2016	00144/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	631.522
Juni/June 2016	00145/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	2.874.497
Juli/July 2016	00146/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	6.164.215
Agustus/August 2016	00147/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	1.831.515
September/September 2016	00148/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	7.871.432
Oktober/October 2016	00149/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	15.273.456
November/November 2016	00150/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	3.451.558
Desember/December 2016	00151/203/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	1.541.178
September/September 2016	00002/504/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 26/ Income tax article 26	Nihil/Nil
Desember/December 2016	00003/504/16/308/19	Pajak penghasilan pasal 26/ Income tax article 26	Nihil/Nil
Januari/January 2016	00489/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Februari/February 2016	00490/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Maret/March 2016	00491/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
April/April 2016	00492/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Mei/May 2016	00493/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Juni/June 2016	00494/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Juli/July 2016	00495/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Agustus/August 2016	00496/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
September/September 2016	00497/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Oktober/October 2016	00498/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
November/November 2016	00499/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Desember/December 2016	00500/507/16/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
2017	00028/406/17/308/19	Pajak penghasilan badan/ Corporate income tax	(5.269.706.993)
Januari/January 2017	00084/540/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Periode/Tahun/ Period/Year	Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letter Number	Jenis Pajak/ Kind of Tax	Kurang (Lebih) Bayar/ Under (Over) Payment
Maret/March 2017	00085/540/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
April/April 2017	00086/540/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
Mei/May 2017	00087/540/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
Juni/June 2017	00088/540/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
Juli/July 2017	00034/240/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	109.500
September/September 2017	00089/540/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
Oktober/October 2017	00090/540/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
November/November 2017	00091/540/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	Nihil/Nil
Desember/December 2017	00035/240/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2/ Income tax article 4 (2)	6.806.800
Januari/January - Desember/December 2017	00057/201/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 21/ income tax article 21	88.307.814
Januari/January - Desember/December 2017	00038/543/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 21/ income tax article 21	Nihil/Nil
Januari/January 2017	00133/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	9.147.888
Februari/February 2017	00134/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	7.333.984
Maret/March 2017	00135/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	13.441.059
April/April 2017	00136/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	6.023.360
Mei/May 2017	00137/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	8.420.172
Juni/June 2017	00138/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	1.524.041
Juli/July 2017	00139/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	2.272.572
Agustus/August 2017	00140/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	187.094
September/September 2017	00141/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	3.449.844
Oktober/October 2017	00142/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	506.171
November/November 2017	00143/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	996.993
Desember/December 2017	00144/203/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 23/ Income tax article 23	348.973
Juni/June 2017	00014/504/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 26/ Income tax article 26	Nihil/Nil
Oktober/October 2017	00015/504/17/308/19	Pajak penghasilan pasal 26/ Income tax article 26	Nihil/Nil
Januari/January 2017	00363/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Februari/February 2017	00364/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Maret/March 2017	00365/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
April/April 2017	00366/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Mei/May 2017	00367/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Juni/June 2017	00368/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Periode/Tahun/ Period/Year	Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letter Number	Jenis Pajak/ Kind of Tax	Kurang (Lebih) Bayar/ Under (Over) Payment
Juli/July 2017	00369/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Agustus/August 2017	00370/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
September/September 2017	00371/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Oktober/October 2017	00372/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
November/November 2017	00373/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil
Desember/December 2017	00374/507/17/308/19	Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	Nihil/Nil

Perusahaan menyetujui surat ketetapan pajak di atas dan mencatatnya dalam laporan keuangan. Lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar Rp 5.269.706.993 diterima pada tahun 2019.

The Company agreed with the tax assessments letter above and therefore reflected them in the financial statements. The 2017 corporate income tax overpayment amounting to Rp 5,269,706,993 was received in 2019.

27. Dividen Tunai dan Cadangan Umum

Dividen Tunai

Pada tahun 2019, 2018, dan 2017, Perusahaan membagikan dividen tunai masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000, Rp 2.000.000.000, dan Rp 1.000.000.000 kepada pemegang saham.

Cadangan Umum

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 2 Juli 2019, Perusahaan membentuk cadangan umum yaitu 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.000.000.000.

27. Cash Dividends and General Reserves

Cash Dividends

In 2019, 2018 and 2017, the Company distributed cash dividend amounting to Rp 5,000,000,000, Rp 2,000,000,000 and Rp 1,000,000,000, respectively, to stockholders.

General Reserve

Based on the Extraordinary General Stockholders' Meeting dated July 2, 2019, the Company provided general reserve that is 20% from total issued and paid-up capital amounting to Rp 1,000,000,000, respectively.

28. Laba (Rugi) Per Saham

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar berdasarkan pada informasi berikut:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months) Tidak diaudit/ Unaudited	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(1.412.803.261)	(294.842.578)	17.433.143.943	17.140.518.901	8.069.173.827	Profit (loss) for the period/year
Rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Weighted average number of shares for computation of ordinary basic earnings (loss) per share
Jumlah laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham	(0,57)	(0,12)	6,97	6,86	3,23	Total basic earnings (loss) per share attributable to shareholders

Rata-rata tertimbang saham biasa mengikuti perubahan sesuai dengan Catatan 35.

28. Earnings (Loss) Per Share

The computation of basic earnings (loss) per share is based on the following data:

Weighted average ordinary shares following the changes in accordance to Note 35.

Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar untuk perhitungan laba (rugi) per saham untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020, telah memperhitungkan efek berpotensi saham biasa dari pinjaman opsi konversi.

The weighted average of shares outstanding for computation of earnings (loss) per share for the period ended June 30, 2020 has considered the effects of potential shares of convertible loans.

29. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- Mertje Tjokro adalah Komisaris dan pemegang saham Perusahaan.
- Burhan Tjokro dan Ulung Wijaya adalah Direksi dan pemegang saham Perusahaan.
- RM Sederhana Muara Enim dan Toko Unit Diesel Utama adalah perusahaan dengan kesamaan manajemen dengan Perusahaan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- Perusahaan membeli barang dan menyewa gedung kantor dan apartemen dari pihak berelasi.
- Perusahaan membeli beberapa bidang tanah dari Burhan Tjokro dan Ulung Wijaya (Note 10).
- Beberapa aset milik Burhan Tjokro digunakan sebagai jaminan untuk utang bank jangka pendek (Catatan 12).
- Jumlah gaji dan remunerasi dewan komisaris dan direksi Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp 1.523.500.000, Rp 2.895.260.000, Rp 3.389.100.000 dan Rp 3.029.100.000 untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.
- Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

29. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

- Mertje Tjokro is Commissioner and shareholder of the Company.
- Burhan Tjokro and Ulung Wijaya is Director and shareholder of the Company.
- RM Sederhana Muara Enim and Toko Unit Diesel Utama is a company which have the same management with the Company.

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties involving the following:

- The Company has purchased material and rent of office space and apartment from its related parties.
- The Company purchased several plot of land from Burhan Tjokro and Ulung Wijaya (Note 10).
- Some assets of Burhan Tjokro were used for collateral of short-term bank loan (Note 12).
- Total salaries and remuneration paid by the Company to the Board of Commissioner and Directors amounted to Rp 1,523,500,000, Rp 2,895,260,000, Rp 3,389,100,000 and Rp 3,029,100,000 for six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively.
- The accounts involving transactions with a related party are as follows:

	30 Juni/June 30					31 Desember/December 31					Persentase terhadap Jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities					
	2020		2019			2019		2018		2017	30 Juni/June 30		31 Desember/December 31			
											2020	2019	2019	2018	2017	
Utang usaha																Trade accounts payable
RM Sederhana																RM Sederhana
Muara Enim	529.499.999		482.062.297			318.306.123		392.914.284		183.453.061	0,19%	0,22%	0,11%	0,17%	0,10%	Muara Enim
Toko Unit Diesel																Toko Unit Diesel
Utama	1.136.438.225		951.895.480			564.696.950		312.025.450		485.318.895	0,40%	0,43%	0,19%	0,14%	0,26%	Utama
Jumlah	1.665.938.224		1.433.957.777			883.003.073		704.939.734		668.771.956	0,59%	0,65%	0,29%	0,31%	0,36%	Total

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months)	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)	Persentase terhadap Penjualan Bersih/Beban Umum dan Administrasi/ Percentage to Net Sales/General and Administrative expenses				
						2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months)	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)
Pembelian										
Toko Unit Diesel										
Utama	1.155.004.225	1.341.548.535	2.703.714.435	1.518.110.568	987.785.561	0,74%	0,96%	0,81%	0,44%	0,33%
RM Sederhana										
Muara Enim	1.076.020.406	1.093.100.460	2.111.114.694	2.490.942.855	2.354.142.859	0,69%	0,78%	0,63%	0,72%	0,78%
Jumlah	2.231.024.631	2.434.648.995	4.814.829.129	4.009.053.423	3.341.928.420	1,43%	1,74%	1,44%	1,16%	1,11%
Beban umum dan administrasi										
Merje Tjokro	112.500.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0,98%	0,93%	0,79%	0,86%	0,89%
Burhan Tjokro	100.000.000	-	-	-	-	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jumlah	212.500.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1,85%	0,93%	0,79%	0,86%	0,89%

30. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Perusahaan terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perusahaan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko Pasar

a. Risiko Mata Uang Asing

Perusahaan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan atau aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

30. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Company's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Company's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Directors. The Directors have the responsibility to determine the basic principles of the Company's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk.

Market Risk

a. Foreign Exchange Risk

The Company is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the United States Dollar. Foreign exchange risk arises from future settlement of commercial transactions and recognized assets and liabilities.

Foreign exchange risk arises when future settlement of commercial transactions or recognized assets or liabilities are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. The risk is measured using cash flow forecasts.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar dan Rp 95.344.118, terutama diakibatkan keuntungan (kerugian) dari penjabaran kas dan setara kas dan piutang usaha.

As of December 31, 2017, if Rupiah had weakened/strengthened by 10% and 10%, respectively, against the United States Dollar with all other variables held constant, profit for the years would have been higher/lower by Rp 95,344,118, respectively, mainly as a result of foreign exchange gains (losses) on translation of cash and cash equivalents and trade accounts receivable.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga Perusahaan timbul dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang seperti utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tetap.

b. Interest Rate Risk

The Company's interest rate risk arises from short-term and long-term borrowings such as short-term bank loans, long-term bank loans and long-term consumer financing payable. Borrowings issued at fixed rates expose the Company to interest rate risk.

Suku bunga tetap pinjaman Perusahaan diakui pada biaya di amortisasi. Sehingga bukan merupakan subjek risiko suku bunga berdasarkan PSAK No. 60.

The Company's fixed rate borrowings are carried at amortized cost. They are therefore not subject to interest rate risk as defined in PSAK No. 60.

Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Perusahaan bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas dan setara kas termasuk piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat. Jika tidak terdapat peringkat independen, bagian pengendalian risiko menilai kualitas kredit pelanggan dengan mempertimbangkan posisi keuangan, pengalaman masa lampau dan faktor lainnya. Limit risiko individu ditentukan berdasarkan peringkat internal dan eksternal sesuai dengan batasan yang ditentukan Direksi. Penggunaan limit kredit secara teratur diamati.

Credit Risk

Credit risk is managed on a group basis except for credit risk relating to accounts receivable balances. The Company is responsible for managing and analysing the credit risk for each of its new clients before standard payment and delivery terms and conditions are offered. Credit risk arises from cash and cash equivalents including outstanding receivables and committed transactions. If there is no independent rating, risk control assesses the credit quality of the customer, taking into account its financial position, past experience and other factors. Individual risk limits are set based on internal or external ratings in accordance with limits set by the Director. The utilization of credit limits is regularly monitored.

Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

No credit limits were exceeded during the reporting period, and management does not expect any losses from non-performance by these counterparties.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the component of the statements of financial position as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
<i>Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi</i>					<i>Financial assets at amortized cost</i>
Kas dan setara kas	6.894.804.537	11.573.785.843	20.059.195.658	4.107.793.314	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga	110.451.047.433	118.929.378.868	46.548.588.013	51.294.809.011	Trade accounts receivable from third parties
Piutang lain-lain pihak ketiga	780.201.728	5.545.933.039	150.554.508	291.708.590	Other accounts receivable from third parties
Jumlah	118.126.053.698	136.049.097.750	66.758.338.179	55.694.310.915	Total

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perusahaan yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows.

The table below analyzes the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

30 Juni 2020/June 30, 2020					
	<= 1 tahun/ <= 1 Year	1-2 tahun/ 1-2 Years	3-5 tahun/ 3-5 Years	> 5 tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang bank jangka pendek	57.273.030.604	-	-	-	57.273.030.604
Utang usaha	29.155.937.205	-	-	-	29.155.937.205
Utang lain-lain					
pihak ketiga	125.914.500	-	-	-	125.914.500
Beban akrual	6.455.394.754	-	-	-	6.455.394.754
Pinjaman opsi konversi	40.000.000.000	-	-	-	40.000.000.000
Liabilitas jangka panjang					
Utang bank	52.110.786.416	22.807.517.442	4.537.451.391	-	79.455.755.249
Utang pembiayaan konsumen	31.784.608.672	21.504.637.706	7.890.202.365	-	61.179.448.743
Jumlah	216.905.672.151	44.312.155.148	12.427.653.756	-	273.645.481.055
					Total

31 Desember 2019/December 31, 2019					
	<= 1 tahun/ <= 1 Year	1-2 tahun/ 1-2 Years	3-5 tahun/ 3-5 Years	> 5 tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang bank jangka pendek	62.294.292.251	-	-	-	62.294.292.251
Utang usaha	34.085.443.842	-	-	-	34.085.443.842
Utang lain-lain					
pihak ketiga	13.944.188.040	-	-	-	13.944.188.040
Beban akrual	5.815.670.350	-	-	-	5.815.670.350
Liabilitas jangka panjang					
Utang bank	60.186.589.195	40.457.192.945	10.824.573.613	-	111.468.355.753
Utang pembiayaan konsumen	32.372.072.947	21.572.861.975	13.279.207.691	-	67.224.142.613
Jumlah	208.698.256.625	62.030.054.920	24.103.781.304	-	294.832.092.849
					Total

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember 2018/December 31, 2018						
	<= 1 tahun/ <= 1 Year	1-2 tahun/ 1-2 Years	3-5 tahun/ 3-5 Years	> 5 tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	23.643.605.411	-	-	-	23.643.605.411	Trade accounts payable
Utang lain-lain						Other accounts payable to
pihak ketiga	10.572.058.454	-	-	-	10.572.058.454	third parties
Beban akrual	11.138.899.125	-	-	-	11.138.899.125	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang						Long-term liabilities
Utang bank	59.980.984.345	46.822.789.194	27.093.392.945	-	133.897.166.484	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	26.597.040.242	14.005.403.257	2.550.663.220	-	43.153.106.719	Consumer financing payable
Jumlah	131.932.587.577	60.828.192.451	29.644.056.165	-	222.404.836.193	Total

31 Desember 2017/December 31, 2017						
	<= 1 tahun/ <= 1 Year	1-2 tahun/ 1-2 Years	3-5 tahun/ 3-5 Years	> 5 tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang bank jangka pendek	15.802.653.870	-	-	-	15.802.653.870	Short-term bank loans
Utang usaha	25.542.837.682	-	-	-	25.542.837.682	Trade accounts payable
Utang lain-lain						Other accounts payable to
pihak ketiga	17.456.674.729	-	-	-	17.456.674.729	third parties
Beban akrual	5.484.924.399	-	-	-	5.484.924.399	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang						Long-term liabilities
Utang bank	33.086.726.524	21.464.525.012	8.306.329.861	-	62.857.581.397	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	32.076.289.606	18.843.127.820	6.244.982.870	-	57.164.400.296	Consumer financing payable
Jumlah	129.450.106.810	40.307.652.832	14.551.312.731	-	184.309.072.373	Total

31. Aset Moneter Bersih dalam Mata Uang Asing

Tabel berikut mengungkapkan jumlah aset moneter:

30 Juni/June 30				31 Desember/December 31,					
2020		2019		2018		2017			
Mata uang asing/ Original currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Original currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Original currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Original currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp	Assets	
Aset								Current Assets	
Kas dan setara kas	USD -	USD -	USD -	USD -	USD 12.553	USD 170.068.721		Cash and cash equivalents	
Piutang usaha								Trade accounts receivable	
pihak ketiga	USD -	USD -	USD -	USD -	USD 57.822	USD 783.372.456		from third parties	
Jumlah Aset - Bersih	-	-	-	-	-	953.441.177		Total Assets - Net	

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kurs konversi yang digunakan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

31. Net Monetary Assets Denominated in a Foreign Currency

The following table shows monetary assets:

As of June 30 2020, December 31, 2019, 2018, and 2017, the conversion rates used by the Company were disclosed in Note 2 to financial statements.

32. Perjanjian dan Ikatan

Perjanjian Sewa Truk dan Alat Berat dan Jasa Pertambangan

- a. Pada tanggal 1 Maret 2010, Perusahaan menandatangani kontrak No. OPR-10-1527 dengan PT Menambang Muara Enim (MME) tentang jasa pembuangan *overburden* untuk tambangan batubara milik MME dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun. Pada tanggal 1 Maret 2013, jangka waktu kontrak diperpanjang untuk 6 (enam) bulan sampai dengan 1 September 2013. Pada tanggal 1 September 2013, jangka waktu kontrak diperpanjang untuk 6 (enam) bulan sampai dengan 1 Maret 2014. Kontrak terakhir diubah pada tanggal 24 Februari 2014, mengenai perpanjangan jangka waktu kontrak untuk 3 (tiga) tahun sampai dengan 1 Maret 2017.
- b. Berdasarkan kontrak No. OPR-17-0461 dan No. OPR-17-0462 tanggal 12 Mei 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan MME tentang penyewaan truk dan alat berat serta jasa pertambangan batubara milik MME selama 5 (lima) tahun.
- c. Pada tanggal 2 September 2013, Perusahaan menandatangani kontrak No. 010/MAS-UN/LEG/IX/13 dengan PT Muara Alam Sejahtera (MAS) tentang penyewaan alat berat serta jasa pertambangan batubara milik MAS. Kontrak tersebut kemudian diubah pada tanggal 7 Juli 2014, sehubungan dengan ketentuan pembayaran dan perhitungan kurs mata uang. Pada tanggal 25 Agustus 2014, kontrak diubah kembali terkait jangka waktu kontrak untuk jasa penambangan dan pengangkutan batubara. Pada tanggal 3 Juli 2015, kontrak diubah terkait harga satuan dan penggunaan bahan bakar minyak. Pada tanggal 31 Desember 2015, kontrak diubah terkait rasio bahan bakar minyak. Pada tanggal 5 Oktober 2018, Perusahaan dan MAS sepakat untuk melakukan perubahan ke lima atas kontrak No. 010C/ MASUN/LEG/IX/13 sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu kontrak.
- d. Pada tanggal 3 November 2014, Perusahaan menandatangani kontrak No. 078A/MAS-UN/LEG/XI/2014 dengan MAS tentang penyewaan alat berat dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun.

32. Agreements and Commitments

Truck and Heavy Equipment Rental and Mining Services Agreement

- a. Based on contract No. OPR-10-1527 dated March 1, 2010, the Company has signed a contract with PT Menambang Muara Enim (MME) concerning *overburden* removal service for coal mine owned by MME with contract period for 3 (three) years. On March 1, 2013, the contract period was extended for 6 (six) months until September 1, 2013. On September 1, 2013, the contract period was extended for 6 (six) months until March 1, 2014. Most recently, the contract was amended on February 24, 2014, concerning the extension of contract period for 3 (three) years until March 1, 2017.
- b. Based on contract No. OPR-17-0461 and No. OPR-17-0462 dated May 12, 2017, the Company has signed contracts with MME concerning the rental of trucks and heavy equipments and coal mining services owned by MME with period of 5 (five) years.
- c. Based on contract No. 010/MAS-UN/LEG/IX/13 dated September 2, 2013, the Company has signed a contract with PT Muara Alam Sejahtera (MAS) concerning the rental of heavy equipment and coal mining services owned by MAS. The contract was amended on July 7, 2014, concerning the payment method and currency rate used. On August 25, 2014, the contract was amended concerning the contract period for coal mining and haulage services. On July 3, 2015, the contract was amended concerning the unit price and fuel usage. On December 31, 2015, the contract was amended again concerning fuel ratio. On October 5, 2018, the Company has agreed with MAS for fifth amendment of contract No. 010C/MASUN/ LEG/IX/13 concerning the extension of contract period.
- d. Based on contract No. 078A/MAS-UN/LEG/XI/2014 dated November 3, 2014, the Company has signed a contract with MAS concerning the rental of heavy equipment with contract period of 3 (three) years.

- | | |
|---|---|
| <p>e. Pada tanggal 12 Februari 2014, Perusahaan menandatangani kontrak No.012/PJJ/P66366/EKS0100/HK.03/2014 dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tentang penyewaan truk dan alat berat untuk pertambangan batubara milik PTBA dengan jangka waktu kontrak selama 4 (empat) tahun. Pada tanggal 29 November 2016, berdasarkan surat perubahan No. 109/ADD/P66366/EKS-0400/HK.03/2016, kontrak diperbaharui mengenai daftar tarif sewa. Pada tanggal 28 November, 2017, berdasarkan surat perubahan No. 121/ADD/P66366/EKS-0600/HK.03/2017, kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit truk dan alat berat yang disewakan. Kontrak diperbaharui kembali pada tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan surat perubahan No. 044/ADD/P66366/EKS0600/HK.03/2018, mengenai perpanjangan jangka waktu sewa beberapa unit truk dan alat berat yang disewakan. Kontrak kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 17 Desember 2019, berdasarkan surat perubahan No. 056/T/ADD/P66366/0600/HK.03/2019 mengenai perpanjangan kembali masa sewa beberapa unit truk dan alat berat serta perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.</p> <p>f. Pada tanggal 30 Mei 2018, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PTBA No. 010/PJJ/A00918/EKS-0600/HK.03/2018 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk pertambangan batubara milik PTBA selama 4 (empat) tahun.</p> <p>g. Pada tanggal 7 Mei 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PTBA No. 013/T/PJJ/B07164/0600/HK.03/2019 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk pertambangan batubara milik PTBA selama 4 (empat) tahun.</p> <p>h. Pada tanggal 1 Mei 2014, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-16569315 dengan ConocoPhilips (Grissik) Ltd. (COPI) tentang penyewaan alat berat dengan jangka waktu kontrak selama 4 (empat) tahun. Pada tanggal 11 April 2015, kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit alat berat yang disewakan. Kontrak kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 30 April 2018, mengenai perpanjangan masa kontrak selama 1 (satu) tahun dan kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 30 April 2019, mengenai perpanjangan kembali masa kontrak selama 6 (enam) bulan.</p> | <p>e. Based on contract No. 012/PJJ/P66366/EKS0100/HK.03/2014 dated February 12, 2014, the Company has signed a contract with PT Bukit Asam Tbk (PTBA) concerning the rental of truck and heavy equipment for mining coal owned by PTBA with contract period for 4 (four) years. On November 29, 2016, the contract was amended based on amendment letter No.109/ADD/P66366/EKS-0400/HK.03/2016, concerning the changes of rental fee. The contract has recently been amended based on amendment letter No.121/ADD/P66366/EKS-0600/HK.03/2017 dated November 28, 2017, concerning the additional rental units of truck and heavy equipments. The contract then was amended based on letter No.044/ADD/P66366/EKS-0600/HK.03/2018 dated August 30, 2018, concerning the extension of rental period of several units of rented trucks and heavy equipments. The contract then was renewed again based on amendment letter No. 056/T/ADD/P66366/0600/HK.03/2019 dated December 17, 2019, concerning the extension rental period of certain units of trucks and heavy equipments and the overall contract value.</p> <p>f. Based on contract No.010/PJJ/A00918/EKS-0600/HK.03/2018 dated May 30, 2018, the Company has signed a contract with PTBA, concerning the rental of trucks and heavy equipments for coal mining owned by PTBA with period of 4 (four) years.</p> <p>g. Based on contract No.013/T/PJJ/B07164/0600/HK.03/2019 dated May 7, 2019, the Company has signed a contract with PTBA, concerning the rental of truck and heavy equipment for coal mining owned by PTBA with period of 4 (four) years.</p> <p>h. Based on contract No.CS-16569315 dated May 1, 2014, the Company has signed a contract with ConocoPhilips (Grissik) Ltd. (COPI) concerning the rental of heavy equipments with contract period of 4 (four) years. The contract has been amended on April 11, 2015, concerning the additional rental units of heavy equipments. The contract has been amended on April 30, 2018, concerning the extension period of rental for 1 (one) year and then renewed again on April 30, 2019, concerning the extension of contract period for 6 (six) months.</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <p>i. Pada tanggal 15 Oktober 2016, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-17220739 dengan COPI tentang penyewaan alat berat dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun. Pada tanggal 25 Januari 2018, kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit yang disewakan dan kontrak diubah kembali pada tanggal 1 Januari 2019, mengenai nilai kontrak.</p> <p>j. Pada tanggal 8 Agustus 2017, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-17193924R dengan COPI tentang penyewaan alat berat selama 5 (lima) tahun.</p> <p>k. Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menandatangani kontrak dengan COPI No. CS-17801618 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk kegiatan pengeboran milik COPI selama 1 (satu) tahun.</p> <p>l. Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menandatangani kontrak dengan COPI No. CS-17801618 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk kegiatan pengeboran milik COPI selama 1 (satu) tahun.</p> <p>m. Pada tanggal 20 Februari 2020, Perusahaan menandatangani kontrak dengan COPI No. CS-17915769 tentang penyewaan alat berat untuk kegiatan pengeboran milik COPI selama 2 (dua) tahun.</p> <p>n. Pada tanggal 1 Mei 2018, Perusahaan menandatangani kontrak No. OPR-18-0211 dengan PT Pacific Global Utama tentang penyewaan truk dan alat berat selama 2 (dua) tahun.</p> <p>o. Pada tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Banyan Koalindo Lestari (BKL) No. 010/PJ-BKL-UN/2019 tentang jasa penambangan tambang batubara milik BKL selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>p. Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Satria Bahana Sarana (SBS) No. 906A/SBS-HO/DIR/X/2019 tentang penyewaan alat berat milik Perusahaan selama 3 (tiga) tahun.</p> | <p>i. Based on contract No.CS-17220739 dated October 15, 2016, the Company has signed a contract with COPI concerning the rental of heavy equipment with the period of 3 (three) years. The contract has been amended on January 25, 2018, concerning the additional of rental units. The contract then was amended on January 1, 2019, concerning additional units rented and the overall contract value.</p> <p>j. Based on contract No.CS-17193924R dated August 8, 2017, the Company has signed a contract with COPI concerning the rental of heavy equipments with the period of 5 (five) years.</p> <p>k. Based on contract No.CS-17801618, the Company has signed a contract with COPI in June 2018, concerning the rental of trucks and heavy equipments for drilling activity by COPI with period of 1 (one) year.</p> <p>l. Based on contract No.CS-17801618, the Company has signed a contract with COPI in June 2018, concerning the rental of trucks and heavy equipments for drilling activity by COPI with period of 1 (one) year.</p> <p>m. Based on contract No. CS-17915769 dated February 20, 2020, the Company has signed a contract with COPI concerning the rental of heavy equipment for drilling activity by COPI with period of 2 (two) year.</p> <p>n. Based on contract No. OPR-18-0211 dated May 1, 2018, the Company has signed a contract with PT Pacific Global Utama concerning the rental of truck and heavy equipments with the period of 2 (two) years.</p> <p>o. Based on contract No.010/PJ-BKL-UN/2019 dated May 29, 2019, the Company has signed a contract with PT Banyan Koalindo Lestari (BKL), regarding the coal mining service owned by BKL with period of 3 (three) years.</p> <p>p. Based on contract No. 906A/SBS-HO/DIR/X/2019 dated October 17, 2019, the Company has signed a contract with PT Satria Bahana Sarana (SBS), concerning the rental of heavy equipment with period of 3 (three) years.</p> |
|--|--|

q. Pada tahun 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Duta Bara Utama (DBU) No. 001/LEG-DIR/DBU-PTUN/II/2019 tentang jasa pertambangan batubara milik DBU selama 2 (dua) tahun.

q. Based on contract No. 001/LEG-DIR/DBU-PTUN/II/2019, the Company has signed a contract with PT Duta Bara Utama (DBU) in 2019, concerning the mining service of coal owned by DBU with period of 2 (two) years.

Perjanjian Jasa Konstruksi

Pada tanggal 1 Desember 2015, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-17019337 dengan ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (COPI) tentang jasa konstruksi jalan dan sumur gas milik COPI dengan jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 November 2017 kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit alat berat yang disewakan dan pada tanggal 15 Desember 2017, kontrak diperbaharui kembali mengenai perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.

Construction Services Agreement

Based on contract No. CS-17019337 dated December 1, 2015, the Company has signed a contract with ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (COPI) concerning the construction service of roads and oil well owned by COPI with contract period of 2 (two) year. The contract has been amended on November 1, 2017, concerning the additional rental units of heavy equipments and on December 15, 2017, the contract was amended concerning the overall contract value.

Perjanjian Penanggulangan Keadaan Darurat dan Rehabilitasi Lingkungan

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Pertamina Gas No. 3900471013 tentang jasa penanggulangan keadaan darurat dan rehabilitasi lingkungan selama 3 (tiga) tahun.

Services of Emergency Response and Environmental Rehabilitation Agreement

Based on contract No. 3900471013 dated January 21, 2020, the Company has signed a contract with PT Pertamina Gas, concerning the service of emergency response and environmental rehabilitation with period of 3 (three) years.

33. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Perusahaan memiliki 4 (empat) segmen yang dilaporkan meliputi jasa pertambangan, sewa truk dan alat berat, jasa konstruksi dan lainnya.

33. Operating Segment

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. The Company has 4 (four) reportable segments including mining services, truck and heavy equipment rental, construction services and others.

	30 Juni 2020 (Enam Bulan)/June 30, 2020 (Six Months)					
	Jasa pertambangan/ Mining services	Sewa truk dan alat berat/ Truck and heavy equipment rental	Jasa konstruksi/ Construction services	Lainnya/ Others	Gabungan/ Combined	
						<u>Statements of Profit or Loss and Comprehensive Income</u>
						<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</u>
Pendapatan usaha						Net sales
Pendapatan usaha segmen	95.168.461.692	52.564.723.617	-	7.748.823.438	155.482.008.747	Segment sales
						<u>Segment results</u>
Hasil segmen						Segment gross profit
Labar kotor segmen	11.566.526.254	6.065.038.723	-	1.152.595.296	18.784.160.273	
Labar usaha	4.079.966.349	2.459.964.588	-	782.370.769	7.322.301.706	Operating income
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(3.157.320.200)	(2.201.036.030)	-	88.752.391	(5.269.603.839)	Other income (expense) - net
Labar sebelum pajak	922.646.149	258.928.558	-	871.123.160	2.052.697.867	Profit before tax
Beban pajak - bersih	(2.121.186.972)	(1.171.602.493)	-	(172.711.663)	(3.465.501.128)	Tax expense - net
Beban komprehensif lain setelah pajak	(56.973.379)	(31.468.302)	-	(4.638.897)	(93.080.578)	Other comprehensive loss - net of tax
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(1.255.514.202)	(944.142.237)	-	693.772.600	(1.505.883.839)	Total comprehensive income (loss)

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

30 Juni 2020 (Enam Bulan)/June 30, 2020 (Six Months)					
	Jasa pertambangan/ Mining services	Sewa truk dan alat berat/Truck and heavy equipment rental	Jasa konstruksi/ Construction services	Lainnya/ Others	Gabungan/ Combined
<u>Laporan Posisi Keuangan</u>					
Aset					Assets
Aset segmen					Segment assets
					558.788.259.008
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen					Segment liabilities
					282.552.492.859
31 Desember 2019 (Satu Tahun)/December 31, 2019 (One Year)					
	Jasa pertambangan/ Mining services	Sewa truk dan alat berat/Truck and heavy equipment rental	Jasa konstruksi/ Construction services	Lainnya/ Others	Gabungan/ Combined
<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</u>					
Pendapatan usaha					Net sales
Pendapatan usaha segmen	217.369.417.554	113.025.304.188	-	2.131.593.561	Segment sales
Hasil segmen					Segment results
Laba kotor segmen	37.765.595.845	19.603.346.921	-	430.089.596	Segment gross profit
Laba usaha	21.957.041.960	10.343.297.966	-	231.000.419	Operating income
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(5.552.840.456)	(7.606.205.338)	-	158.050.281	Other income (expense) - net
Laba sebelum pajak	16.404.201.504	2.737.092.628	-	389.050.700	Profit before tax
Beban pajak - bersih	(1.370.921.081)	(712.836.120)	-	(13.443.688)	Tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	26.383.885	13.718.796	-	258.729	Other comprehensive income - net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif	15.059.664.308	2.037.975.304	-	375.865.741	Total comprehensive income
<u>Laporan Posisi Keuangan</u>					
Aset					Assets
Aset segmen					Segment assets
					580.579.119.615
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen					Segment liabilities
					302.082.899.957
31 Desember 2018 (Satu Tahun)/December 31, 2018 (One Year)					
	Jasa pertambangan/ Mining services	Sewa truk dan alat berat/Truck and heavy equipment rental	Jasa konstruksi/ Construction services	Lainnya/ Others	Gabungan/ Combined
<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</u>					
Pendapatan usaha					Net sales
Pendapatan usaha segmen	178.919.923.395	142.464.090.404	22.047.420.668	1.592.161.459	Segment sales
Hasil segmen					Segment results
Laba (rugi) kotor segmen	30.123.595.913	23.963.285.563	3.755.854.554	283.838.568	Segment gross profit (loss)
Laba usaha	18.961.890.538	12.987.204.375	2.168.806.150	132.661.128	Operating income
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(3.777.021.776)	(2.165.242.596)	-	134.708.210	Other income (expense) - net
Laba sebelum pajak	15.184.868.762	10.821.961.779	2.168.806.150	267.369.338	Profit before tax
Beban pajak - bersih	(6.261.267.196)	(4.985.502.558)	-	(55.717.374)	Tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	45.116.710	35.923.954	5.559.510	401.482	Other comprehensive income - net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif	8.968.718.277	5.872.383.175	2.174.365.660	212.053.446	Total comprehensive income
<u>Laporan Posisi Keuangan</u>					
Aset					Assets
Aset segmen					Segment assets
					492.982.902.344
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen					Segment liabilities
					226.960.188.039

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember 2017 (Satu Tahun)/December 31, 2017 (One Year)					
	Jasa pertambangan/ Mining services	Sewa truk dan alat berat/Truck and heavy equipment rental	Jasa konstruksi/ Construction services	Lainnya/ Others	Gabungan/ Combined
<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan</u>					
<u>Komprehensif Lain</u>					
Pendapatan usaha					Net sales
Pendapatan usaha segmen	177.024.687.347	77.368.926.610	46.651.289.542	902.217.713	301.947.121.212
Hasil segmen					Segment results
Laba kotor segmen	25.692.114.901	11.033.630.552	6.889.801.770	152.117.711	43.767.664.934
Laba usaha	13.794.362.954	4.590.645.943	1.249.295.614	152.117.711	19.786.422.222
Beban lain-lain - bersih	(10.282.422.907)	(1.124.880.824)	(1.399.627.130)	-	(12.806.930.861)
Laba (rugi) sebelum pajak	3.511.940.047	3.465.765.119	(150.331.516)	152.117.711	6.979.491.361
Manfaat pajak - bersih	755.596.739	330.234.780	-	3.850.947	1.089.682.466
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(191.231.030)	(83.577.832)	(50.395.085)	(974.621)	(326.178.568)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	4.076.305.756	3.712.422.067	(200.726.601)	154.994.037	7.742.995.259
<u>Laporan Posisi Keuangan</u>					
<u>Aset</u>					
Aset segmen					439.074.248.177
<u>Liabilitas</u>					
Liabilitas segmen					188.279.054.429

34. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Sejak awal tahun 2020, perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) pada tahun 2020 telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri jasa pertambangan dan persewaan alat berat, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan.

34. Economic Environment Uncertainty

Since early 2020, the global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of coronavirus (Covid-19) in year 2020 has resulted to increased volatility in the value of financial instruments, trading interruptions, disruptions to operations of companies, unstable stock market and tight liquidity in certain sectors in Indonesia, including the heavy equipment rental and mining services industry, which may continue and result to unfavorable financial and operating impact to the Company. Indonesia's ability to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy is largely dependent on the eradication of Covid-19 threat, as well as the fiscal and other measures that are being taken and will be undertaken by the government authorities. These measures, actions and events are beyond the Company's control.

35. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Perjanjian dan Ikatan

- a. Berdasarkan kontrak No. 756/PJ/BKL-UN/2020 tanggal 16 Juli 2020, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Banyan Koalindo Lestari (BKL) tentang jasa pengangkutan batubara milik BKL sampai dengan mencapai 50.000 MT.
- b. Pada tanggal 19 Agustus 2020, Perusahaan dan BKL sepakat untuk melakukan perubahan jangka waktu kontrak No. 010/PJ/BKL-UN/2019 yang semula akan berakhir pada 26 Mei 2022 menjadi 26 Mei 2025 atau tercapainya *volume* pengupasan lapisan tanah sebesar 36.575.000 BCM.
- c. Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan dan PT Menambang Muara Enim sepakat untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam kontrak No. OPR-17-0461 dan OPR-17-0462.
- d. Pada tanggal 7 Oktober 2020, Perusahaan dan BKL sepakat untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam kontrak No. 010/PJ/BKL-UN/2019.

Pinjaman Bank Jangka Pendek

- a. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2021 melalui surat perubahan No. 117/IBG-PLG/VIII/2020.
- b. Berdasarkan surat persetujuan kredit No. KK/20/1200611/AMD/SME tanggal 26 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dari PT Bank Permata Tbk dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 3.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2021.
- c. Berdasarkan surat persetujuan kredit No. CM1.PLB/SPPK/387/2020 tanggal 30 September 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk:
 1. Menyetujui pencabutan atas pembatasan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus Perusahaan.

35. Events after the Reporting Period

Agreements and Commitments

- a. Based on contract No. 756/PJ/BKL-UN/2020 dated July 16, 2020, the Company has signed a contract with PT Banyan Koalindo Lestari (BKL), concerning the coal hauling owned by BKL with until achieved 50.000 MT.
- b. On August 19, 2020, the Company and BKL agree to amend contract period of contract No. 010/PJ/BKL-UN/2019 which is formerly will be end on May 26, 2022 become May 26, 2025, or the over burden removal volume of 36.575.000 BCM has been achieved.
- c. On September 9, 2020, the Company and PT Menambang Muara Enim agree to amend several clause of contract No. OPR-17-0461 and OPR-17-0462.
- d. On October 7, 2020, the Company and BKL agree to amend several clause of contract No. 010/PJ/BKL-UN/2019.

Short-Term Bank Loan

- a. On August 24, 2020, the Company obtained extension of the credit facility from PT Bank DBS Indonesia to June 25, 2021 through addendum letter No. 117/IBG-PLG/VIII/2020.
- b. Based on credit agreement letter No. KK/20/1200611/AMD/SME dated August 26, 2020, the Company obtained bank overdraft credit facility from PT Bank Permata Tbk with maximum credit of Rp 3,000,000,000 and was due on May 21, 2021.
- c. Based on credit agreement letter No. CM1.PLB/SPPK/387/2020 dated September 30, 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk:
 1. Approved the cancellation of restriction to change the Company's shareholder and management.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Menyetujui pencabutan atas pembatasan pembayaran deviden.</p> <p>3. Mewajibkan Perusahaan untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank apabila Perusahaan melakukan RUPS untuk merubah Anggaran Dasar, modal dasar, susunan pengurus, nama dan status Perusahaan serta pembagian deviden.</p> <p>4. Menyerahkan salinan RUPS serta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.</p> <p>d. Berdasarkan surat persetujuan rencana penawaran umum perdana saham No. 131/IBG-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, PT Bank DBS Indonesia menyetujui rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan serta melarang Perusahaan untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan apabila perubahan tersebut lebih dari 30% (tiga puluh persen).</p> <p>e. Berdasarkan surat persetujuan rencana penawaran umum perdana saham No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020, PT Bank Permata Tbk menyetujui rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan serta pencabutan terhadap pelarangan perubahan Anggaran Dasar dan pembayaran deviden.</p> <p>f. Berdasarkan surat persetujuan No. 133/SBK/VI/2020 tanggal 13 Oktober 2020, PT Bank Central Asia Tbk:</p> <p>1. Mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan secara tertulis apabila terdapat perubahan susunan pengurus dan pembayaran deviden lebih dari 30% (tiga puluh persen) laba tahun berjalan.</p> <p>2. Mewajibkan Perusahaan untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas Perusahaan atau lebih dari 60% (enam puluh persen) harus dimiliki oleh Ibu Jati Simina atau keluarganya serta manajemen Perusahaan harus dibawah pengendalian Ibu Jati Siminah atau keluarganya.</p> | <p>2. Approved the cancellation of dividend payments restriction.</p> <p>3. Obligate the Company to provide written notification to the Bank for any Company's AGM to change the Article of Association, authorized share capital, management, name and status and dividend payments.</p> <p>4. Submit the copy of AGM including the approval from the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia regarding the changes in the Company Article of Association.</p> <p>d. Based on letter of approval for initial public offering No. 131/IBG-PLG/X/2020 dated October 5, 2020, PT Bank DBS Indonesia approved the Company's plan for initial public offering, change of Company's Article of Association and restrict the Company to change the shareholders if the change is more than 30% (thirty percent).</p> <p>e. Based on letter of approval for initial public offering No. 35/SRK/SME/X/20 dated October 9, 2020, PT Bank Permata Tbk approve the Company's initial public offering and cancellation of restriction to change the Company's Article of Association and dividend payments.</p> <p>f. Based on credit agreement letter No. 133/SBK/VI/2020 dated October 13, 2020, PT Bank Central Asia Tbk:</p> <p>1. Obligate the Company to provide written notification if there is change of the Company's management and dividend payments of more than 30% (thirty percent) of current year's earnings.</p> <p>2. Obligate the Company to retain the majority ownership or more than 60% (sixty percent) of the Company's share capital by Mrs. Jati Simina or her family and the Company's management should be under the control of Mrs. Jati Simina or her family.</p> |
|---|---|

3. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Bank paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK untuk melaksanakan penawaran perdana saham Perusahaan.

3. The Company should notify the Bank maximum of 5 (five) working days after the Company receive the effective statement from the Financial Service Authority to execute the Company's initial public offering.

Lain-lain

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 September 2020 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui:

- a. Pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100.000 menjadi Rp 2 per saham.
- b. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 8.000.000.000 menjadi Rp 20.000.000.000 yang terdiri dari 10.000.000.000 lembar saham.
- c. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 1.000.000.000 saham dengan nominal per saham Rp 2 termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 10% dari saham baru serta alokasi saham baru yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) melalui program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan memperhatikan ketentuan perundang - undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
- d. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atau Direksi untuk menentukan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 saham atau 28,6% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan, termasuk didalamnya saham yang dapat dikonversi dari utang kepada PT Surya Fajar Capital Tbk dan PT Surya Fajar Corpora sebanyak-banyaknya 15% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan.
- e. Perubahan status Perusahaan yang semula tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Other

Based on Notarial Deed No. 10 dated September 2, 2020 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a public notary in Jakarta, the shareholders approved:

- a. Stocksplits from Rp 100,000 to Rp 2 per share.
- b. Increase the Company authorized capital from Rp 8,000,000,000 to Rp 20,000,000,000, which is consist of 10,000,000,000 shares.
- c. Issuance of the Company unissued share capital in the amount of maximum 1,000,000,000 shares with Rp 2 par value, including to allocate maximum 10% of that new issued share capital for Initial Public Offering through Employee Stock Allocation program with paying attention to the applicable Law, including but not limited to Indonesia Stock Exchange and Capital Market regulation.
- d. Authorized the Board of Commissioners or Directors to determine the number of shares that will be offered to the public with a maximum of 1,000,000,000 shares or 28.6% from the Company's issued and paid-up capital after Initial Public Offering, including convertible shares from the borrowing of PT Surya Fajar Capital Tbk and PT Surya Fajar Corpora with a maximum of 15% from the Company's issued and paid-up capital after Initial Public Offering.
- e. To change the Company status from private company to public company.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- f. Mengubah seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka.
- g. Perubahan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mertje Tjokro
 Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto

Direksi

Direktur Utama : Burhan Tjokro
 Direktur : Ulung Wijaya

Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0066428.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.

- f. To change the Company Articles of Association in relation of the Company status as public company.
- g. To change the Company management as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
 Independent Commissioner

Directors

President Director
 Directors

This amendment was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0066428.AH.01.02.Tahun 2020 dated September 25, 2020.

36. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:

	2020 (enam bulan/ six months)	2019 (enam bulan/ six months)	2019 (satu tahun/ one year)	2018 (satu tahun/ one year)	2017 (satu tahun/ one year)
Penambahan aset tetap melalui utang bank jangka panjang	-	2.842.400.000	40.091.400.000	115.549.378.000	35.802.425.000
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	910.000.000	9.758.620.000	55.860.850.000	23.146.474.000	34.840.787.990
Pembayaran utang lain-lain pihak ketiga (utang pembelian aset tetap) melalui utang pembiayaan konsumen jangka panjang	11.418.800.000	-	-	-	-

Acquisitions of property and equipment through long-term bank loans
 Acquisitions of property and equipment through consumer financing payable
 Payment of other accounts payable to third parties (liability for purchase of property and equipment) through long-term consumer financing payable

36. Supplemental Disclosures on Statements of Cash Flows

The following are the noncash investing and financing activities of the Company:

37. Rekonsiliasi Liabilitas Yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Non-kas/Non-cash Changes Pergerakan valuta asing/Changes in foreign exchange	Perolehan aset tetap/ Acquisition of property and equipment	30 Juni/ June 30, 2020	
Utang bank jangka pendek	62.294.292.251	(5.021.261.647)	-	-	57.273.030.604	Short-term bank loans
Pinjaman opsi konversi pihak ketiga	-	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000	Convertible loans to third parties
Utang bank jangka panjang	111.468.355.753	(32.012.600.504)	-	-	79.455.755.249	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	67.224.142.613	(18.373.493.870)	-	12.328.800.000	61.179.448.743	Long-term consumer financing payable
Jumlah	240.986.790.617	(15.407.356.021)	-	12.328.800.000	237.908.234.596	Total

37. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes:

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Non-kas/Non-cash Changes		30 Juni/ June 30, 2019	
			Pergerakan valuta asing/Changes in foreign exchange	Perolehan aset tetap/ Acquisition of property and equipment		
Utang bank jangka pendek	-	31.027.780.545	-	-	31.027.780.545	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	133.897.166.484	(31.199.992.176)	-	2.842.400.000	105.539.574.308	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	43.153.106.719	(15.468.141.109)	-	9.758.620.000	37.443.585.610	Long-term consumer financing payable
Jumlah	177.050.273.203	(15.640.352.740)	-	12.601.020.000	174.010.940.463	Total

	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Non-kas/Non-cash Changes		31 Desember/ December 31, 2019	
			Pergerakan valuta asing/Changes in foreign exchange	Perolehan aset tetap/ Acquisition of property and equipment		
Utang bank jangka pendek	-	62.294.292.251	-	-	62.294.292.251	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	133.897.166.484	(62.520.210.731)	-	40.091.400.000	111.468.355.753	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	43.153.106.719	(31.789.814.106)	-	55.860.850.000	67.224.142.613	Long-term consumer financing payable
Jumlah	177.050.273.203	(32.015.732.586)	-	95.952.250.000	240.986.790.617	Total

	1 Januari/ January 1, 2018	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Non-kas/Non-cash Changes		31 Desember/ December 31, 2018	
			Pergerakan valuta asing/Changes in foreign exchange	Perolehan aset tetap/ Acquisition of property and equipment		
Utang bank jangka pendek	15.802.653.870	(15.802.653.870)	-	-	-	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	62.857.581.397	(44.509.792.913)	-	115.549.378.000	133.897.166.484	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	57.164.400.296	(37.157.767.577)	-	23.146.474.000	43.153.106.719	Long-term consumer financing payable
Jumlah	135.824.635.563	(97.470.214.360)	-	138.695.852.000	177.050.273.203	Total

	1 Januari/ January 1, 2017	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Non-kas/Non-cash Changes		31 Desember/ December 31, 2017	
			Pergerakan valuta asing/Changes in foreign exchange	Perolehan aset tetap/ Acquisition of property and equipment		
Utang bank jangka pendek	18.946.408.826	(3.143.754.956)	-	-	15.802.653.870	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	66.935.200.073	(39.880.043.676)	-	35.802.425.000	62.857.581.397	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	60.786.642.763	(38.459.760.664)	(3.269.793)	34.840.787.990	57.164.400.296	Long-term consumer financing payable
Jumlah	146.668.251.662	(81.483.559.296)	(3.269.793)	70.643.212.990	135.824.635.563	Total

38. Tujuan Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk tujuan penawaran umum perdana saham Perusahaan dan sehubungan dengan perubahan pengungkapan sesuai dengan SAK di Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dengan disertai beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan dalam Catatan 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 28, 29, 33 dan 38 atas laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Catatan 1a, penambahan pengungkapan tentang kegiatan usaha Perusahaan saat ini.
2. Catatan 2a, penambahan pengungkapan tentang dasar pengungkapan sesuai Peraturan No. VIII.G.7.
3. Catatan 2i, penambahan pengungkapan tentang persentase penyusutan aset tetap.

38. The Purpose of Issuance of Financial Statements

For the purpose of the initial public offering of the Company's shares and pertinent to disclosure change in accounting with Indonesian SAK, the Company has reissued these financial statements for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 with several changes and additional disclosure in Notes 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 28, 29, 33 and 38 to the financial statements, with the details are as follows:

1. Notes 1a, additional disclosure regarding the Company's current activities.
2. Notes 2a, additional disclosure regarding the disclosure basis according to Regulation No. VIII.G.7.
3. Notes 2i, additional disclosure regarding depreciation percentage of property and equipment.

PT ULIMA NITRA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ULIMA NITRA Tbk
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- | | |
|---|---|
| <p>4. Catatan 2m, penambahan pengungkapan tentang kebijakan pengakuan pendapatan masing-masing segmen usaha.</p> | <p>4. Notes 2m, additional disclosure regarding revenue recognition policy for each business segment.</p> |
| <p>5. Catatan 5, penambahan pengungkapan tentang piutang PT Tritama Niaga Berjaya yang tidak terdapat pergerakan.</p> | <p>5. Notes 5, additional disclosure regarding the trade accounts receivable from PT Tritama Niaga Berjaya that have no movement.</p> |
| <p>6. Catatan 6, penambahan pengungkapan tentang nama perusahaan asuransi.</p> | <p>6. Notes 6, additional disclosure regarding the name of insurance Company.</p> |
| <p>7. Catatan 7, penambahan pengungkapan tentang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan.</p> | <p>7. Notes 7, additional disclosure regarding the amount of inventories that recognized as expense during the period.</p> |
| <p>8. Catatan 10, penambahan pengungkapan tentang pembelian tanah dari pihak berelasi.</p> | <p>8. Notes 10, additional disclosure regarding the purchased of land from related parties.</p> |
| <p>9. Catatan 11, penambahan pengungkapan tentang hubungan antara Perusahaan dengan perusahaan asuransi atas pertanggungan yang dimiliki, penambahan pengungkapan tentang jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan sepenuhnya namun masih digunakan dan penambahan pengungkapan tentang persentase penyelesaian aset dalam pembangunan.</p> | <p>9. Notes 11, additional disclosure regarding the relationship of the Company with the insurance company for coverage owned, additional disclosure regarding the gross value of assets that has been fully depreciated by still used by the Company and additional disclosure regarding the percentage of completion of construction in progress.</p> |
| <p>10. Catatan 12, penambahan pengungkapan tentang jangka waktu fasilitas dan jumlah pembayaran pokok untuk masing-masing periode dan pemenuhan pembatasan yang diwajibkan.</p> | <p>10. Notes 12, additional disclosure regarding the maturity period and the amount of principle paid for each period and the compliance with certain covenant.</p> |
| <p>11. Catatan 17, penambahan pengungkapan tentang jaminan dan pembatasan terkait pinjaman opsi konversi pihak ketiga.</p> | <p>11. Notes 17, additional disclosure regarding the collateral and certain covenant of convertible loan to third party.</p> |
| <p>12. Catatan 18, penambahan pengungkapan tentang periode jatuh tempo masing-masing fasilitas.</p> | <p>12. Notes 18, additional disclosure regarding the maturity period for each facility.</p> |
| <p>13. Catatan 28, penambahan pengungkapan tentang jumlah saham beredar.</p> | <p>13. Notes 18, additional disclosure regarding the amount of outstanding share.</p> |
| <p>14. Catatan 29, penambahan pengungkapan tentang gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan pihak berelasi dengan Perusahaan, penambahan pengungkapan tentang pembelian tanah dari pemegang saham serta penambahan pengungkapan tentang utang bank yang dijaminan dengan aset milik pemegang saham.</p> | <p>14. Notes 29, additional disclosure regarding remuneration and salaries of Board of Commissioner and Directors who is related parties to the Company, additional disclosure regarding the purchase of land fraud from the stockholders and additional disclosure regarding the bank loan that collateralize with asset of stockholder.</p> |
| <p>15. Catatan 33, penambahan pengungkapan terkait segmen operasi.</p> | <p>15. Notes 33, additional disclosure regarding operating segment disclosure.</p> |

16. Catatan 38, penambahan pengungkapan tentang tujuan penerbitan kembali laporan keuangan.

16. Notes 38, additional disclosure regarding the purpose for reissuing the financial statements.

39. Standar Akuntansi Keuangan Baru (“PSAK”)

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

1. Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
3. PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
4. PSAK No. 73, Sewa

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

Perusahaan memperkirakan bahwa penerapan amandemen PSAK di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

39. New Financial Accounting Standards (“PSAK”)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for the Company, but did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

1. Amendment to PSAK No. 1 Presentation of Financial Statement
2. PSAK No 71, Financial Instruments
3. PSAK No. 72, Revenues from Contracts with Customers
4. PSAK No. 73, Leases

Amendment to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after January 1, 2021 is as follows:

- Amendment to PSAK No. 22, Business Combination regarding Definition of Business

The Company does not expect that the above amended PSAK will have significant impact on the financial statements.
